ATLAS SAWIT PAPUA

Dibawah Kendali Penguasa Modal

Penyunting: Y.L. Franky dan Selwyn Morgan

ISBN 978-602-98794-1-4

ATLAS SAWIT PAPUA:

Dibawah Kendali Penguasa Modal

Penyunting: Y.L. Franky dan Selwyn Morgan

Penerbit:
PUSAKA

Selama puluhan tahun terakhir industri sawit di Indonesia berkembang sangat cepat dengan pusat utama di Kalimantan dan Sumatera. Kebanyakan kawasan hutan di Indonesia Barat tersebut telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan para investor melaporkan semakin sulitnya memperoleh tanah untuk perkebunan kelapa sawit, sehingga mereka cenderung mencari tanah ke Indonesia Timur.

Sampai tahun 2005, di tanah Papua hanya ada tujuh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kini di tanah Papua sudah terdapat lebih dari 21 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi (membuka lahan), kebanyakan mulai beroperasi dalam lima tahun terakhir. Dua puluh perusahaan lain berada dalam tahap lanjut proses perizinan dan diduga hampir siap membuka lahan. Puluhan perusahaan lain sudah memegang izin lokasi dari Bupati dan sedang mengurus syarat-syarat perizinan lainnya.

Perkembangan industri sawit yang sangat cepat ini membawa dampak sangat buruk untuk masyarakat adat Papua. Dalam hampir setiap kasus, ada masyarakat adat yang dirugikan karena hutan sumber kehidupan mereka sudah berubah, rusak dan menjadi perkebunan yang tidak jelas manfaatnya.

Atlas Sawit Papua adalah potret industri ini hingga akhir tahun 2014 dan untuk meningkatkan pemahaman tentang siapa aktor pemainnya dan dimana daerah-daerah yang menjadi minat investor.

ATLAS SAWIT PAPUA:

Dibawah Kendali Penguasa Modal

Penyunting: Y.L. Franky dan Selwyn Morgan

ISBN : 978-602-98794-1-4

Desain dan Tata Letak: Wishnu Tirta

Penerbit:
PUSAKA
Kompleks Rawa Bambu I, Jl. H No. 4, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan (12540), Indonesia
Telp & Fax : +62 21 7800844
Email: yay.pusaka@gmail.com
Website: pusaka.or.id

Edisi pertama: Maret 2015

Isi publikasi ini dapat diperbanyak dan didistribusikan untuk tujuan non komersial jika pemberitahuan sebelumnya diberikan kepada pemegang hak cipta dan penulis dicantumkan sepatutnya.

Peta-peta dalam laporan ini diolah dari berbagai sumber dan ditujukan hanya untuk keperluan indikatif dan ilustrasi saja. Informasi peta ini bisa berubah sewaktu-waktu.

Gambar pada publikasi ini merupakan dokumen PUSAKA dan diambil dari berbagai sumber.

Ucapan terimakasih

Penerbitan publikasi ini dihasilkan dari kerjasama antara organisasi PUSAKA, awasMIFEE, Sawit Watch di Bogor, JERAT Papua, JASOIL di Manokwari Papua, Perkumpulan Belantara Papua di Sorong, Perkumpulan Bin Madag Hom di Bintuni, SKP Keuskupan Merauke dan aktivis yang peduli dengan isu permasalahan hak asasi manusia dan lingkungan hidup di tanah Papua. Publikasi ini bertujuan untuk menyajikan informasi dan peta investasi perkebunan kelapa sawit, korporasi dan aktor-aktor yang terlibat dalam bisnis kelapa sawit, perizinan dan praktik perolehan tanah, termasuk praktik licik dan perampasan hak-hak masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih juga kepada para narasumber, organisasi dan aktivis yang terlibat berbagi informasi pengetahuan dan dokumentasi mereka, sehingga memungkinkan adanya publikasi ini, antara lain: sobat Charles Tawaru, Erens Womsiwor, keduanya aktivis Greenpeace di Papua, Leo Imbiri dari YADUPA, Robertino Hanebora di Nabire, Yuliana Langowuyo dari SKPKC Fransiskan Papua, Saul Wanimbo dari SKP Timika, Marianus Maknaipeku dan Dominikus Mitoro dari LEMASKO, Esau Yaung dari Paradisea, Sena dari KAMUKI, Andi Saragih dari Mnukwar, Jemris di Gemapala dan DAP Mbaham Matta, Fakfak, Steve Marani di Wasior, Agus Kalalu di Sorong, Tedi Kosamah di Teminabuan, SKP Sorong, kawan-kawan dari Eropa: Greenpeace, EIA International dan TAPOL. Penyusun publikasi ini bertanggung jawab atas laporan akhir dan ketidakakuratan yang mungkin ada menyangkut fakta atau interpretasi.

Penyunting
Y.L. Franky dan Selwyn Moran

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan 1
2. Kabupaten Sorong: Kelapa Sawit adalah Masa Depan Industri Kayu 7
3. Kabupaten Sorong Selatan dan Maybrat: Citra Publik dan Citra Tersembunyi dari Industri Kelapa Sawit 11
4. Kabupaten Teluk Bintuni dan Teluk Wondama: Lansekap Baru Industri Papua Barat: Minyak dan Gas Bumi di Bawah Tanah, Minyak Kelapa Sawit di Atas Pohon 15
5. Kabupaten Fakfak: Andalan Agropolitan dalam Kendali Modal 19
6. Kabupaten Manokwari dan Tambrauw: Pengelolaan Lahan Melanggar Ketentuan Mendatangkan Banjir dan Konflik 23
7. Kabupaten Keerom: Transmigrasi sebagai Pengaman Perbatasan Negara, Masyarakat Adat Terdesak 26
8. Kabupaten Jayapura: Industri Kelapa Sawit Ancaman Serius Kerusakan Hutan Lembah Mamberamo 30
9. Kabupaten Sarmi: Kelapa Sawit Tumbuh Sesak Diperbatasan Hutan Lindung 34
10. Kabupaten Waropen, Mamberamo Raya dan Kepulauan Yapen: Perkebunan Kelapa Sawit Ditolak Suku Kuriye 36
11. Kabupaten Nabire: Kekacauan Hukum, Hutan Rusak dan Rakyat Terbelah 38
12. Kabupaten Mimika: Tidak Cukup Freeport, Sawit Masuk Tanah Suku Kamoro 42
13. Kabupaten Asmat, Mappi, Yahukimo: Jejak Industri Sawit Menjangkau Pedalaman Komunitas Koroway 46
14. Kabupaten Merauke: Mengorbankan Orang Malind untuk Pangan Dunia 49
15. Kabupaten Boven Digoel: “Menara” Bisnis Perkebunan Kekuatan Modal Asing 54
16. Tabel Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Tanah Papua 59

PENDAHULUAN

Selama beberapa bulan, kami telah mencoba untuk mengumpulkan data sebanyak kemampuan kami tentang industri kelapa sawit di Papua. Kami telah melakukan ini melalui proses penelitian internet, komunikasi dengan LSM lokal Papua, organisasi gereja, lembaga adat dan aktivis lainnya, dan mengupayakan menghubungi sumber-sumber pemerintah dan korporasi. Kami berharap publikasi ini adalah panduan yang cukup baik tentang situasi industri kelapa sawit di Papua dan implikasinya bagi masyarakat setempat.

Sayangnya informasi ini tidak selengkap seperti yang kami kehendaki. Tujuan kami adalah menyajikan gambaran tentang setiap perusahaan kelapa sawit yang memiliki izin untuk beroperasi di Papua, dilengkapi dengan peta lokasi, informasi tentang pemilik perusahaan, dan jenis perizinan yang dimiliki. Namun, mewujudkan tujuan itu tidak selalu mudah. Kami belum bisa mendapatkan daftar lengkap perusahaan tersebut dari kantor-kantor pemerintah daerah di sebagian besar Tanah Papua, sehingga kekurangan tersebut harus kami lengkapi dari laporan masyarakat setempat, media dan penelitian kami sendiri. Kesulitan terbesar seringkali adalah upaya mendapatkan informasi dari pemerintah daerah, banyak yang menolak untuk memberi informasi, kebanyakan tidak mau menerima telepon dan menjadi lebih sulit lagi jika para narasumber ini tidak mau ditemui langsung.

Jika sebuah perusahaan kelapa sawit ingin mengajukan permohonan izin, biasanya harus mendekati Bupati, pemimpin terpilih masing-masing Kabupaten. Jika secara prinsip Bupati setuju, mereka akan mencari lahan yang cocok dan mengeluarkan Ijin Lokasi. Kemudian perusahaan akan membutuhkan rekomendasi di tingkat provinsi. Jika tanah tersebut

diklasifikasikan sebagai hutan negara, maka akan membutuhkan izin dari Menteri Kehutanan untuk melepaskan lahan itu dari kawasan hutan negara. Menariknya, ditemukan kecenderung meningkatnya pemberian izin lokasi berlangsung sejalan dengan masa berakhirnya pemimpin daerah dan menjelang pemilihan kepala daerah, sehingga menimbulkan opini bahwa sumber daya alam dijadikan komoditi untuk membiayai kepentingan aktor-aktor politik. Perusahaan maupun tim teknis juga mengeluarkan rekomendasi menggunakan argumentasi “hutan sekunder” untuk dapat lolos dari ketentuan kebijakan moratorium dalam pelepasan kawasan hutan. Hampir sedikit sekali dipertimbangkan situasi sosial setempat dalam pelepasan kawasan hutan.

Bagi masyarakat adat di dalam dan sekitar hutan yang berdiam di tanah yang diincar perusahaan, sangat penting bahwa mereka mendapatkan informasi lengkap dan memadai tentang perusahaan dan rencana perusahaan pada tahap sedini mungkin. Karena mereka adalah pemilik hutan berdasarkan hukum adat dan hidup mereka bergantung pada hutan, mereka memiliki hak untuk membuat keputusan yang bebas atas penggunaan tanah-tanah mereka. Namun, seringkali terjadi mereka baru mendengar untuk pertama kalinya tentang rencana perusahaan ketika perusahaan mendekati mereka dengan proposal untuk perolehan dan pengadaan tanah. Perusahaan sudah mengantongi izin dan hak pengelolaan tanah hutan tanpa musyawarah dan persetujuan masyarakat. Perusahaan sering menggunakan cara 'tipu-tipu' (manipulasi) atau intimidasi, melibatkan oknum aparat pemerintah dan aparat keamanan maupun lembaga perantara berasal dari warga setempat. Sangat mudah bagi perusahaan menciptakan konflik dalam masyarakat dengan cara ini, memecah-belah mereka menjadi pro dan kontra. Konflik-konflik ini digunakan demi keuntungan perusahaan. Idealnya, komunitas-komunitas dapat diberikan dan memperoleh informasi sebelum situasi menjadi rumit yang tentu akan mempunyai posisi lebih baik untuk membuat keputusan mengenai pemanfaatan hutan mereka.

Atlas Sawit Papua ini juga menyajikan informasi keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah menguasai lahan skala luas dan mengendalikan industri kelapa sawit di tanah Papua. Perusahaan tersebut sering menggunakan nama lokal dan nama tertentu untuk memberi kesan "pencitraan" pro rakyat dan pro lingkungan, meskipun faktanya berbeda, seperti: hijau lestari, matoa lestari, agro lestari, sawit lestari, agung sejahtera, nabire baru, sarmi sejahtera, dan sebagainya.

Perusahaan-perusahaan ini diketahui masih mempunyai hubungan dan dikendalikan para "taipan" penguasa modal besar. Meraka menggunakan dan berada dibawah payung group-group perusahaan besar dan bekerjasama dengan perusahaan transnasional. Mereka juga mengendalikan bisnis sektor usaha lainnya, seperti pembalakan kayu, hutan tanaman industri, pertambangan, penangkapan hasil laut di tanah Papua maupun di daerah lainnya di Indonesia.

Grup perusahaan bisnis kelapa sawit di tanah Papua yang dimiliki pengusaha kaya Indonesia versi Forbes (2014), antara lain: Musim Mas Group milik Bachtiar Karim (2 miliar USD), Raja Garuda Mas Group milik Sukanto Tanoto (2,11 miliar USD), Sinar Mas Group milik Eka Tjipta Widjaja (5,8 miliar USD), Salim Group milik Anthony Salim (5,9 miliar USD), Rajawali Group milik Peter Sondakh (2,3 miliar USD). Mereka mempunyai perusahaan perkebunan kelapa sawit di Papua lebih dari satu anak perusahaan. Musim Mas Group bahkan mempunyai 6 (enam) anak perusahaan bernama lokal dengan luas lahan yang dikuasai sebesar 163.000 hektar. Perusahaan ini juga mempunyai usaha lainnya, seperti Rajawali Group yang sedang mengusahakan perkebunan tebu di daerah Merauke.

Perusahaan besar kelapa sawit yang memiliki usaha besar lainnya di tanah Papua adalah Austindo Nusantara Jaya Group milik pengusaha kaya George S Tahija, yang sedang mengembangkan industri pengolahan sagu di daerah Metamani, Sorong Selatan, dan pengusaha listrik di Tembaga Pura, Mimika. Perusahaan Kayu Lapis Indonesia Group, yang memiliki bisnis pembalakan kayu dengan areal konsesi terluas di tanah Papua. Medco Group yang aktif juga dalam bisnis hutan tanaman industri, bubur kertas dan pertambangan di beberapa daerah di Papua. Perusahaan modal asing (PMA) Korindo Group, asal Korea Selatan, yang sedang mengusahakan eks lahan pembalakan kayu untuk perkebunan kelapa sawit. Selain Korindo Group, ada cukup banyak PMA melakukan bisnis kelapa sawit di tanah Papua, yakni: Tadmax Group asal Malaysia dan Pacific Interlink asal Yemen beroperasi di Boven Digoel; The Lion Group asal Malaysia; Noble Group berkantor di Hongkong dan Carson Cumberbatch asal Sri Lanka yang mengelola perkebunan kelapa sawit di Nabire. Sedangkan perusahaan kelapa sawit milik negara hanya ada satu, yakni PTPN II Arso. Sebelumnya terdapat PTPN II Prafi, belakangan PTPN II Prafi dikelola oleh perusahaan asal Cina, Yong Jing Investment.

Namun riset kami juga temukan bahwa ada banyak perusahaan 'misterius' yang mempelopori investasi dengan mendekati pemerintah daerah untuk mengurus izin perkebunan. Perusahaan-perusahaan ini biasanya beroperasi secara diam-diam dan menghindari ada informasi muncul di muka umum. Mereka tidak punya situs web, dan di kantornya di Jakarta tanpa tanda identifikasi apapun. Dua contoh adalah Menara Group yang dapat izin untuk tujuh anak perusahaannya di Boven Digoel (salah satu komisarisnya adalah mantan Kapolri) dan PT Pusaka Agro Sejahtera Group yang berhasil dapat izin lokasi di Sorong Selatan, Maybrat, Mimika dan Jayapura. Ada contoh lain di Boven Digoel, di mana tiga anak perusahaan punya alamat di sebuah law firm, tapi law firm tersebut ketika dikunjungi menolak memberikan informasi tentang perusahaan kelapa sawit. Di kantor PT Mega Mustika Plantation dan PT Cipta Papua Plantation yang akan beroperasi di Sorong Kota, kami dapat penolakan yang sama. Ada indikasi bahwa keterlibatan perusahaan-perusahaan seperti ini spekulatif - kalau sudah dapat semua izin, nanti perusahaan dijual kepada perusahaan lain (milika taipan atau asing misalnya) yang punya modal lebih besar untuk bisa mengoperasikan perkebunan. Pola kerja perusahaan yang sangat tidak terbuka seperti ini sama sekali tidak memungkinkan proses *Free Prior Informed Consent* dengan masyarakat adat pemilik hak ulayat di lokasi perkebunan.

Data kami belum lengkap tapi kami mencoba untuk jujur tentang banyak celah didalamnya. Peta pada halaman berikut, perkebunan-perkebunan yang ditandai dengan warna hijau gelap adalah tempat di mana batas-batas diketahui dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tempat-tempat dimana kami tahu lokasinya secara umum tetapi tidak tahu persis batas-batasnya diberi warna hijau muda. Akhirnya, tempat-tempat di mana kami sama sekali tidak memiliki informasi lokasi yang dapat diandalkan sama sekali, kami hanya menandainya dengan data perusahaan sedekat mungkin dengan tempat dimana kami perkirakan lokasi itu mungkin berada. Dalam artikel yang menyertai data, kami cantumkan sebanyak mungkin sumber-sumber rujukan yang digunakan. Kami belum memasukkan informasi yang kami anggap tidak bisa diandalkan, tapi kami harus mengakui bahwa data di sini adalah data sebaik yang menjadi rujukan artikel.

Namun, kami percaya bahwa sangat penting untuk berjuang untuk mendapatkan informasi lengkap dan dapat diakses tentang perkebunan dan rencana pembangunan lainnya, sehingga dapat menjadi alat perjuangan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengambil kendali atas masa depan mereka sendiri. Jika data sulit diakses, itu karena sengaja sedang disembunyikan oleh orang-orang dengan kepentingan tertentu yang mengingkari hak-hak masyarakat.

Semoga publikasi ini memberikan manfaat dan kontribusi untuk perjuangan keterbukaan informasi dan akses informasi data investasi perkebunan dan kehutanan di Papua. Kami harap publikasi ini dapat dikembangkan. Sampai ada perubahan sistem, dibutuhkan lebih banyak orang untuk pro-aktif mencari dan menemukan informasi di tingkat lokal untuk dibagikan dengan orang lain. Membawa informasi yang diperlukan dan selama ini disembunyikan ke dalam ruang publik memerlukan upaya kolaborasi dari banyak orang, seperti halnya memastikan informasi ini sampai kepada masyarakat di kampung-kampung yang mungkin akan terkena dampak proyek-proyek pembangunan.

Idealnya publikasi ini tidak akan menjadi proyek statis, tetapi bisa menghasilkan edisi lanjutan. Bagaimanapun, kelengkapan dari publikasi sangat tergantung pada informasi yang dapat dipercaya di tingkat lokal. Oleh karena itu kami menghimbau kepada aktivis setempat, anggota masyarakat atau mereka yang memiliki akses terhadap data pemerintah untuk mengakui pentingnya informasi yang terbuka dan dapat diakses, lalu mempublikasikan informasi sendiri, atau bisa juga menghubungi kami.

Tentu saja kami sangat senang untuk memberikan informasi lebih lanjut yang mungkin kami miliki tentang perusahaan yang dicantumkan di sini.

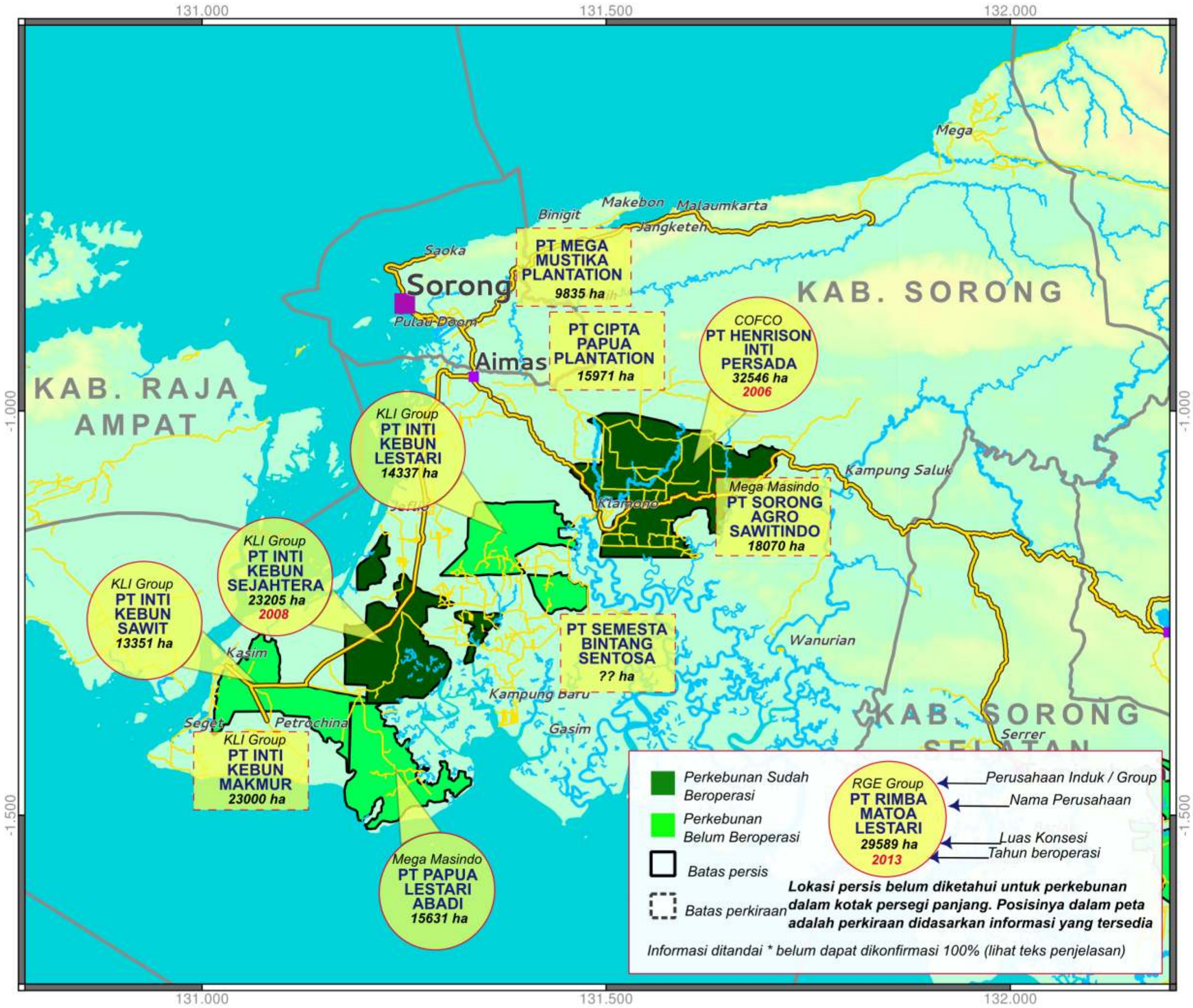

Kabupaten SORONG

Skala 1:700.000

KABUPATEN SORONG

Kelapa Sawit Adalah Masa Depan Industri Kayu

Kayu Lapis Indonesia Group (KLIG) merupakan perusahaan pembalakan kayu terbesar di Papua dengan menguasai areal hutan seluas 1,4 juta hektar[1]. Areal konsesi KLIG tersebar dibeberapa daerah di Papua. Konsesi KLIG terbesar dipegang oleh salah satu anak perusahaan bernama PT Intimpura Timber (IT) seluas 333.000 hektar, yang beroperasi di Kabupaten Sorong. KLIG juga menguasai pabrik kayu lapis raksasa dengan angka produksi mencapai 264.000 meter kubik setiap tahun. Tetapi, ketika hutan binasa sedemikian cepat, bagaimana perusahaan kayu raksasa semacam ini sanggup menjamin perkembangan usaha mereka di masa depan?

Maka, sebelum izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT IT berakhir pada tahun 2009 lalu, sebagaimana lazim dilakukan oleh perusahaan kayu lain, PT KLIG pun melakukan antisipasi dengan mengalihkan dan mengembangkan investasinya ke sektor industri yang tidak pernah berhenti berkembang dan berekspansi di seluruh wilayah Indonesia, yakni: industri kelapa sawit[2]. Setelah 15 tahun beroperasi di daerah Sorong, PT KLIG jelas sudah memiliki hubungan baik dengan penguasa lokal dan pemerintah setempat. Dengan demikian, izin lokasi dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit bagi kelima anak perusahaannya untuk beberapa tahun ke depan, tentu bukanlah hal yang sulit untuk diperoleh.

Saat ini, PT. Inti Kebun Sejahtera, salah satu anak perusahaan perkebunan kelapa sawit milik KLIG sudah mulai beroperasi di Sorong. Sementara, anak perusahaan kelapa sawit KLIG lainnya yang memulai lebih dahulu dan paling berkembang di kabupaten ini adalah PT Henrison Inti Persada (PT HIP). Sejak tahun 2006, semua izin yang diperlukan oleh PT HIP untuk membuka perkebunan di Distrik Klamono sudah lengkap (walaupun ditemukan bukti-bukti bahwa PT HIP telah memulai penebangan hutan dan penanaman kelapa sawit beberapa tahun sebelum perizinan lengkap)[3].

PT HIP membangun perkebunannya di atas hutan ulayat suku Mooi. Hingga saat ini, masyarakat adat setempat masih memendam amarah terhadap perusahaan yang telah merampas tanah mereka lewat cara-cara licik dan penipuan. Perusahaan ini juga dengan enteng menebar janji-janji manis soal akan didirikannya fasilitas-fasilitas baru atau

1 http://www.greenpeace.org/seasia/id/Global/seasia/report/2006/5/kayu-lapis-indonesia.pdf

2 http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/512f866db56de9ffc41033c159c856e5/pdf

3 http://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA_Clear_Cut_Exploitation_0512_FINAL.pdf

bantuan pendidikan yang tidak pernah terwujud. Uang ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat pun sangat rendah, bahkan jika dibandingkan dengan kasus-kasus lain di Tanah Papua. Marga Gilik misalnya, memiliki dokumentasi yang membuktikan bahwa tanah warisan leluhur mereka hanya dihargai Rp. 30.000 per hektar sebagai uang ganti rugi[4].

Pada tahun 2010, PT HIP dijual kepada Noble Group, sebuah perusahaan besar di bidang perdagangan komoditas hasil pertanian, termasuk minyak sawit (CPO). Noble adalah juga anggota dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Artinya, perusaahaan ini dapat mengajukan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan, yang sanggup menembus akses pasar-pasar penting dunia. Sebagai pemilik baru, Noble tidak memikul tanggung jawab atas pembalakan hutan liar dan perampasan tanah yang berlangsung ketika PT HIP masih menjadi bagian dari KLIG. Noble pun dengan sukses menampilkan sosok perusahaan baik tidak bermasalah di hadapan dunia bisnis. Pada saat bersamaan tidak perlu bersulit-sulit menyelesaikan sengketa dengan masyarakat lokal yang belum usai. Meski demikian, konflik baru terus saja bermunculan karena PT HIP masih terus mengembangkan usahanya dan menguasai lahan baru.

Bulan Maret 2014, perusahaan COFCO dari Cina mengakusisi mayoritas saham divisi agribisnis Noble. Ini merupakan salah satu strategi yang diambil oleh perusahaan negara dari Cina ini demi memperluas usaha sehingga mampu bersaing dengan para pemain raksasa di sektor perdagangan komoditas pertanian, yang umumnya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan dari negara-negara barat[5].

4 Awalnya di laporan EIA dan Telapak (http://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA_Clear_Cut_Exploitation_0512_FINAL.pdf ganti rugi dikira Rp 6000/Ha. Namun belakangan ini Marga Gilik konfirmasi bahwa tanah ulayat mereka hanya 420 hektar, bukan 1420 hektar. Tulisan dalam surat pernyerahan lahan tidak jelas. '±420 hektar' salah dibaca sebagai '1420 hektar'. Kalau Rp. 6.000 atau Rp. 30.000 per hektar, nilai keduanya tidak merupakan kompensasi yang adil.

5 http://www.reuters.com/article/2014/04/02/us-noble-group-cofco-idUSBREA3103E20140402

PT Inti Kebun Sejahtera (IKS) adalah anak perusahaan KLIG lainnya yang sudah beroperasi, meski luas lahan penanaman jauh lebih kecil dibandingkan PT HIP. Awalnya, PT IKS hanya memegang Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah seluas 4.000 hektar. Namun, sekarang lahan itu bisa dipastikan akan semakin luas karena Kementerian Kehutanan telah menyetujui untuk melepaskan kawasan hutan seluas 19.665 hektar pada September 2012 lalu. Hingga tahun 2014, masyarakat masih menunggu terpenuhinya janji PT IKS untuk membangun lahan plasma bagi masyarakat suku asli setempat[6].

Seakan tidak cukup, tiga anak perusahaan KLIG lainnya tengah menunggu giliran untuk beroperasi. Sejauh ini, Kementerian

6 http://pusaka.or.id/masyarakat-tagih-janji-perusahaan-kelapa-sawit-pt-iks/, http://pusaka.or.id/menolak-takluk-pada-iks/

Kehutanan telah melepas 14.377 hektar kawasan hutan untuk PT Inti Kebun Lestari dari izin lokasi seluas 34.000 hektar yang dikehendaki. PT Inti Kebun Sawit juga telah memperoleh persetujuan prinsip untuk pelepasan kawasan hutan seluas 13.351 hektar dari Kementerian Kehutanan. Sementara PT Inti Kebun Makmur telah memegang izin lokasi atas tanah seluas 20.000 hektar untuk digarap sebagai perkebunan kelapa sawit.

KLI Group, tentu saja, bukanlah satu-satunya. Setidaknya ada lima perusahaan lain yang tengah mengurus proses perizinan untuk perkebunan kelapa sawit di Sorong. Dua perusahaan yang telah terdaftar di kabupaten ini seperti PT Papua Lestari Abadi dan PT Sorong Agro Sawitindo, masing-masing telah mendapatkan izin lokasi seluas 15.631 hektar dan 18.070 hektar. Jika merujuk pada alamat kantornya, ditengarai kedua perusahaan ini dimiliki oleh Mega Masindo Group, sebuah perusahaan yang menurut situs resminya bergerak di sektor "alat berat, pertambangan dan perkebunan kelapa sawit".[7] Mega Masindo Group memiliki beberapa konsesi eksplorasi batubara di Kabupaten Mimika, sementara PT. Papua Lestari Abadi sendiri telah memegang konsesi Izin Usaha Pertambangan sejak tahun 2009 untuk melakukan aktivitas eksplorasi tambang batubara seluas 10.000 hektar di Sorong. Belum banyak informasi lebih lanjut tentang kepemilikan Mega Masindo Group, walaupun dalam iklan lowongan kerja yang dimuat, perusahaan ini menyebutkan diri sebagai perusahaan modal asing.

Jika merujuk pada situs resmi pemerintah kabupaten Sorong, tertera tiga nama perusahaan kelapa sawit lain di kabupaten ini, yaitu PT Mega Mustika Plantation, PT Cipta Papua Plantation, dan PT Semesta Bintang Sentosa.[8] Akhir tahun 2014, PT. Mega Mustika Plantation mengajukan pelepasan kawasan hutan seluas 9.835 hektar dan PT. Cipta Papua Plantation seluas 15.971 hektar, keduanya di wilayah Sorong Kota.

7 www.megamasindogroup.com - 'under construction' bulan Agustus 2014
8 http://www.sorongkab.go.id/Sektor_perkebunan.html (diakses Juli 2014)

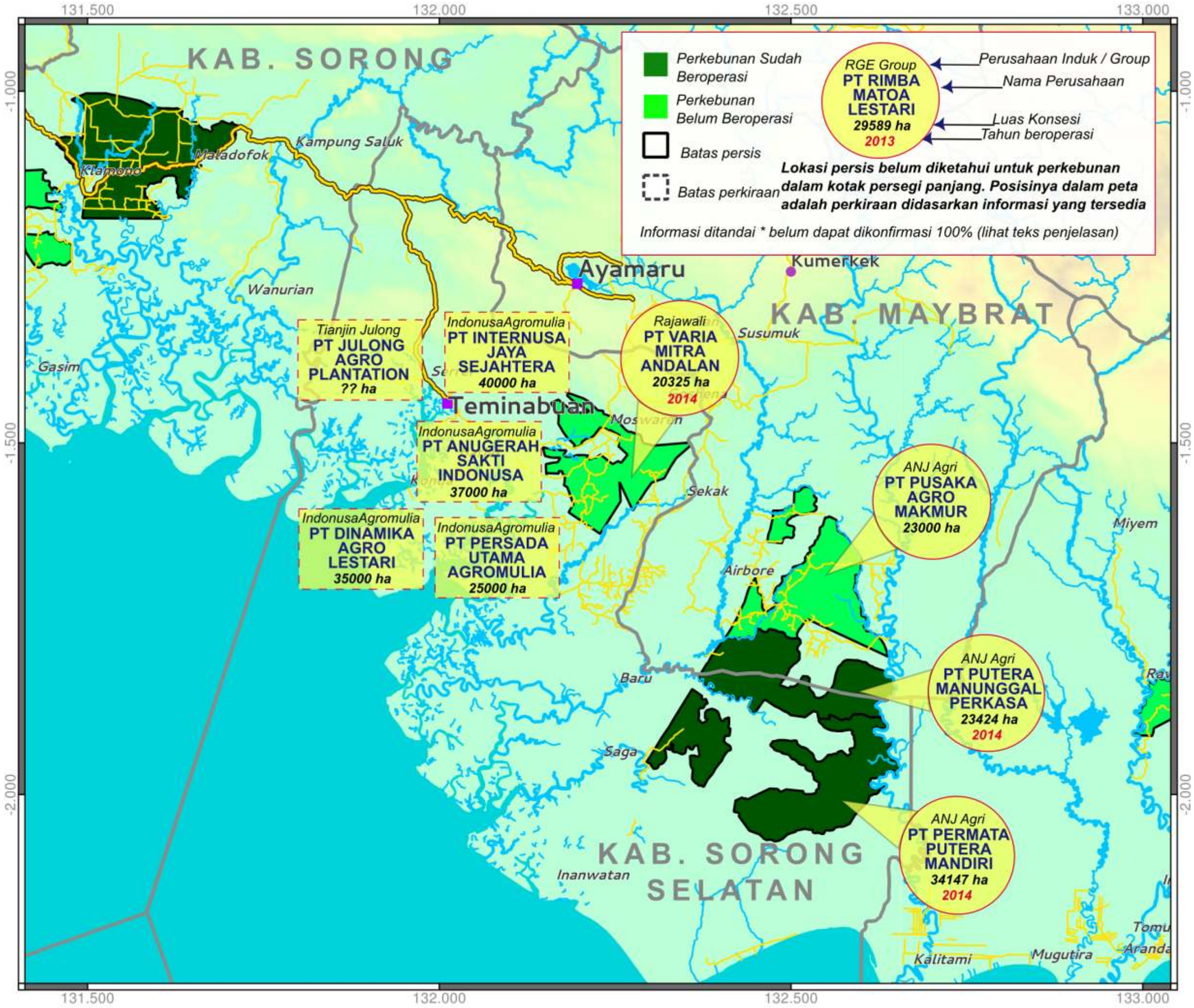

Kabupaten SORONG SELATAN, MAYBRAT

Skala 1:800.000

KABUPATEN SORONG SELATAN, MAYBRAT

Citra Publik dan Citra Tersembunyi dari Industri Kelapa Sawit

Kabupaten Sorong Selatan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Sorong sejak tahun 2002, juga mengalami situasi yang tidak jauh berbeda. Hutan-hutan di Kabupaten ini dicaplok dan digunduli untuk dijadikan industri kelapa sawit skala besar. Dua perusahaan kelapa sawit sudah membabat hutan, satu lagi telah memiliki rencana mumpuni dan matang untuk membuka perkebunan baru, sementara beberapa lainnya tengah dalam proses pengurusan izin.

Kisah PT Permata Putera Mandiri (PPM) dan PT Putera Manunggal Perkasa (PMP)[9] dapat dijadikan contoh tepat untuk memahami dinamika rintisan perluasan industri kelapa sawit di Tanah Papua. Kedua perusahaan ini dibeli oleh Austindo Nusantara Jaya Group (ANJ Agri) pada tahun 2013.[10] Saat transaksi berlangsung, kedua perusahaan ini telah memegang hampir semua izin penting yang dibutuhkan dan sudah berhasil membebaskan kawasan hutan yang sebelumnya merupakan wilayah hutan milik negara. Kedua perusahaan ini mulai membuka hutan pada akhir tahun 2013 atau awal 2014.[11]

ANJ Agri termasuk perusahaan "disegani" yang terdaftar dalam bursa efek Indonesia dan merupakan anggota RSPO. Sebelumnya, perusahaan ANJ Agri sudah beroperasi di wilayah Sorong Selatan sebagai perusahaan perkebunan sagu. Serupa dengan kasus Noble Group di Sorong, ANJ Agri terjun ke dalam bisnis kelapa sawit dengan cara membeli perusahaan yang sudah ada, dari pada harus kalang kabut mengurus perizinan yang berpotensi merusak citra baik, padahal perusahaan hendak membangun citra untuk disegani.

Kedua anak perusahaan PT. PPM dan PT. PMP yang dimiliki oleh ANJ Agri sebelumnya dimiliki oleh sebuah perusahaan PT. Pusaka Agro Sejahtera (PAS) yang beroperasi secara terselubung dan tidak diketahui oleh publik. Sepanjang pengetahuan penulis, perusahan PT. PAS yang sulit dilacak informasinya ini berkantor pusat pada sebuah rumah mewah di Jakarta. Meski demikian, tidak terdapat plang penanda apapun di pintu masuk yang dapat mengindikasikan aktivitas macam apa yang dijalankan oleh perusahaan di kantor itu. Selain itu, informasi yang berhasil dihimpun menunjukkan bahwa perusahaan PT. PAS ini

9 NB Sebagian konsesi Putera Manunggal Perkasa ada di Kapupaten Maybrat

10 http://www.kppu.go.id/id/wp-content/uploads/2013/09/PendapatKPPU_Austindo_PublikVer_19092013.pdf
11 http://www.greenomics.org/docs/ANJ-clearance-Papua-forest_%28LowRes%29.pdf

telah berusaha untuk memperoleh lahan yang akan dijadikan perkebunan di berbagai penjuru Papua setidaknya sejak tahun 2007. Selain PT PPM dan PT PMP yang kemudian menjadi anak perusahaan ANJ Agri, PT. PAS juga mengurus sejumlah izin untuk PT. Pusaka Agro Makmur (PAM) yang terletak di Kabupaten Maybrat. Pada Januari 2014, Kementerian Kehutanan melepaskan kawasan hutan didaerah tersebut kepada PT PAM untuk dijadikan wilayah perkebunan kelapa sawit. Dengan izin lengkap PT. PAM juga dibeli oleh ANJ Agri pada Oktober 2014.[12]

PT PAS juga ditengarai memiliki perkebunan di Kabupaten Mimika (PT Tunas Agung Sejahtera) dan di Jayapura-Sarmi (PT Permata Nusa Mandiri). Sebelumnya, perusahaan PT. PAS juga memegang izin lokasi di Kabupaten Merauke dan izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) di Pulau Obi, Maluku Utara.[13] Perusahaan ini juga diduga memiliki kepentingan di sektor tambang.

12 http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201410/cSee9e51f3_6d9db1a5f7.pdf

13 Belum diketahui kalau PT Pusaka Agro Sejahtera juga pemilik PT Pusaka Agro Lestari dulu sebelum perusahaan yang punya perkebunan di Timika ini dijual kepada Nobel Group pada tahun 2011. Walaupun nama sangat mirip, belum dapat bukti tentang hubungan langsung.

ANJ Agri dimiliki oleh George Tahija. Keluarga Tahija sendiri sudah memiliki sejarah panjang di Tanah Papua. Ayah George Tahija, Julius Tahija, adalah seorang perantara penting yang mendukung masuknya investasi awal Freeport pada dekade 1960an. George Tahija masih menjadi komisaris PT. Freeport dan memiliki perusahaan listrik swasta PT. Puncak Jaya Power berkapasitas 100 MW yang menggerakkan industri tambang Freeport di Timika. Sebagai Presdir ARC Exploration, George Tahija mengembangkan industri pertambangan secara berkesinambungan, yang telah mengeksplorasi emas di Pegunungan Papua Barat[14] hingga dia mundur sebagai direktur perusahaan tambang ini pada bulan Mei 2014.[15]

Meski begitu nyata terlibat dalam industri perusak lingkungan, George Tahija senantiasa mencitrakan dirinya sebagai seorang pencinta lingkungan dan aktif sebagai pencinta alam. Tidak hanya dikenal sebagai pendaki yang telah menjelajah beberapa puncak gunung tertinggi di dunia dan menuliskan beberapa buku terkait petualangannya di alam bebas,[16] George sekaligus menjabat sebagai dewan penasihat NGO konservasi alam, “The Nature Conservancy”,[17] serta mendirikan LSM lingkungan “Coral Triangle Center”.[18]

Perusahaan lain yang beroperasi di Kabupaten Sorong Selatan adalah PT Varia Mitra Andalan (PT VMA). Perusahaan ini bernaung di bawah Green Eagle Group,[19] namun kepemilikannya sudah mengalami beberapa perubahan dalam tahun 2014. Sampai bulan Juli 2014, Green Eagle Group merupakan sebuah usaha patungan antara Rajawali Group dan Louis Dreyfus Group. Rajawali dimiliki oleh pengusaha terkenal Peter Sondakh yang juga menguasai perkebunan

14 http://www.arcexploration.com.au/IRM/content/projects_papua.html Perusahaan yang sama menjadi sasaran protes di pelabuhan Sapi, Bima pada tahun 2011 dimana tiga orang tewas ditembak polisi.

15 http://www.arcexploration.com.au/IRM/Company/ShowPage.aspx/PDFs/1647-22486449/DirectorRetirementMrGeorgeTahija

16 Salah satu buku 'A walk in the clouds' (2005) menceritakan sebuah perjalanan di Papua sampai gunung tertingginya di Puncak Jaya.

kelapa sawit di sekitar Jayapura dan perkebunan tebu di sekitar Merauke, sementara Louis Dreyfus merupakan salah satu perusahaan perdagangan komoditas terbesar di dunia asal Perancis. Belakangan ini Louis Dreyfus dilaporkan mundur dari joint venture ini.[20] Pada bulan September 2014, BW Plantations umumkan rencana mengakuisisi Green Eagle Group. Namun PT VMA tetap milik Rajawali dan mempunyai mayoritas saham BW Plantation.[21]

PT. VMA memegang izin lokasi usaha perkebunan seluas 23.000 hektar di Distrik Moswaren dan Wayar. Menteri Kehutanan telah berkomitmen untuk mengalih fungsikan 20.325 hektar kawasan hutan untuk dijadikan industri perkebunan. Menurut berita lokal, Bupati Sorong Selatan telah secara resmi menanam bibit kelapa sawit yang pertama pada tanggal 19 Desember 2014.[22]

Wilayah kerja PT VMA terletak di area konsesi yang dahulu izinnya dipegang oleh PT Bangun Kayu Irian. Para aktivis lokal di Sorong menuturkan bahwa perusahaan kayu tersebut tiba-tiba angkat kaki dari daerah itu pada tahun 1997. Gelondongan-gelondongan kayu yang sudah ditebang ditinggalkan begitu saja di tengah hutan. Izin konsesi PT Bangun Kayu Irian yang masih berlaku ini lantas diambil alih oleh PT. Rajawali. Pada tahun 2008, PT. Rajawali mulai menebang wilayah hutan. Aktivitas ini diduga merupakan rintisan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit.[23]

17 http://www.tnc.org.hk/about-us/asia-pacific-volunteer-leadership/
18 http://coraltrianglecenter.org
19 http://sawit-indonesia.com/index.php/berita-terbaru/123-sepak-terjang-green-eagle-group Sayangnya sudah tidak terdapat online.20 http://in.reuters.com/article/2014/07/24/louisdreyfus-greeneagle-idINL6N0PZ3WT20140724
21 http://www.thejakartapost.com/news/2014/09/25/bwpt-raise-trilions-rights-issue-acquisition.html
22 http://www.radarsorong.com/index.php?mib=berita.detail&id=31152
23 Belantara Papua, Media Release 'GUGATAN 7 MARGA PEMILIK HAK ULAYAT DI KAMPUNG BAGARAGA, WARDIK DAN TOKAS DISTRIK WAYER-MOSWAREN KABUPATEN SORONG SELATAN TERHADAP PT. BANGUN KAYU IRIAN', Agustus – Oktober 2013

Rencana terbesar di Sorong Selatan sepertinya berada di tangan Indonusa Agromulia Group, sebuah perusahaan yang tercatat memiliki perkebunan kelapa sawit di Kalimantan dan berinvestasi dalam bidang properti di Jakarta. Di Sorong Selatan, perusahaan ini telah mengantungi izin lokasi untuk empat anak perusahaannya: PT Anugerah Sakti Internusa, PT Internusa Jaya Sejahtera, PT Dinamika Agro Lestari, dan PT Persada Utama Agromulia. Perkebunan di atas lahan seluas 137.000 hektar jelas merupakan ekspansi besar-besaran yang teramat ambisius bagi perusahaan yang terbilang sebagai pendatang baru dalam industri minyak sawit.[24]

Berdasarkan laporan LSM lokal, sebuah Perusahaan asal Cina bernama Tianjin Julong Group juga bermaksud untuk membuka perkebunan kelapa sawit di Distrik Saifi dan Seremuk lewat anak perusahaannya, PT. Julong Agro Plantation. Belum ada informasi kalau perusahaan ini berhasil dapat izin di Papua. Tianjin Julong Group adalah perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan komoditas. Dalam situs resminya, perusahaan ini mengklaim diri sebagai pengimpor minyak kelapa sawit mentah (CPO) terbesar di Cina dan berencana untuk membuka lebih banyak perkebunan kelapa sawit.[25] Padahal perusahaan ini sesungguhnya baru beberapa tahun saja berspekulasi dalam industri kelapa sawit. Salah satu anak perusahaan Tianjin Julong Group di Kalimantan Tengah, PT. Graha Inti Jaya, mempunyai masalah dengan warga Suku Dayak Ngaju di Kapuas, karena menggusur lahan sumber pangan dan kebun karet rakyat dengan memberikan nilai ganti rugi yang tidak adil.

24 http://www.beritasatu.com/hunian/74815-indonusa-group-mulai-rambah-bidang-properti.html
25 http://www.julongchina.com/en/company.asp?g=1

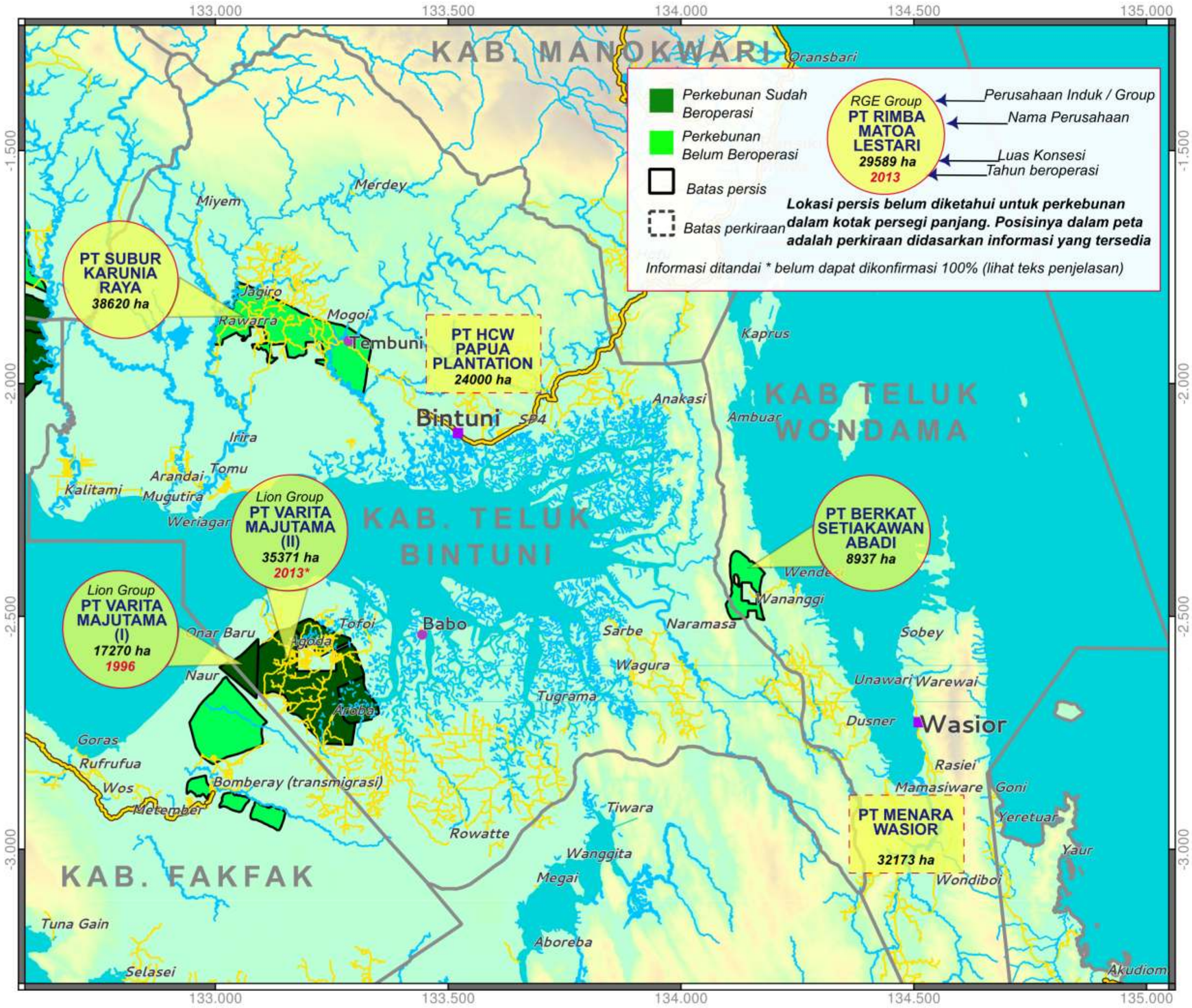

Kabupaten TELUK BINTUNI, TELUK WONDAMA

Skala 1:1.200.000

TELUK BINTUNI, TELUK WONDAMA

Lansekap Baru Industri Papua Barat: Minyak dan Gas Bumi di Bawah Tanah, Minyak Kelapa Sawit di Atas Pohon

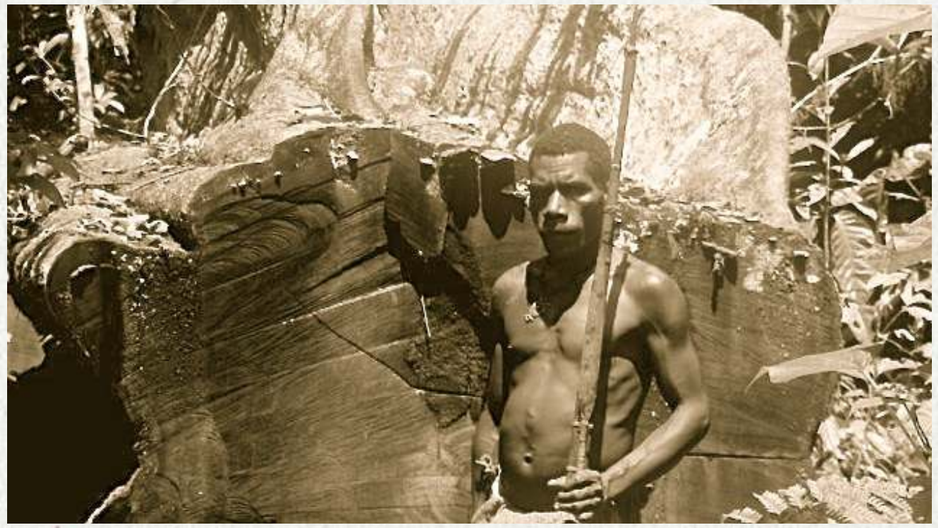

Dataran rendah di sepanjang Teluk Bintuni adalah pusat industri Migas di Papua Barat. Di sini, beberapa perusahaan seperti BP Tangguh, Genting Oil dan Eni Oil tengah mengeksploitasi dan mengeksplorasi cadangan minyak dan gas bumi. BP Tangguh jelas merupakan sebuah proyek raksasa, dengan dua train milik perusahaan yang sudah beroperasi dan kini train ketiga pun tengah dibangun. Bersama-sama dengan Sorong, Teluk Bintuni direncanakan sebagai simpul penting bagi perkembangan industri migas sebagaimana termaktub dalam Master Plan untuk Percepatan dan Perluasan Pembanungan Indonesia (MP3EI). MP3EI juga berencana untuk membangun industri hilir sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah yang dikeruk dari industri sumber daya migas. Dalam rangka MP3EI beberapa perusahaan asing (dengan sekutu lokal) punya rencana untuk membangun pabrik petrokimia, termasuk Ferrostaal (asal Jerman, pabrik methanol), LG (Asal Korea Selatan, pabrik methanol) dan PT Pupuk Indonesia (pabrik urea)[26]. Di bagian timur Kabupaten Teluk Bintuni terdapat banyak konsesi tambang batu bara yang kini berada dalam tahap eksplorasi.

Artinya, Teluk Bintuni yang dahulu sangat terpencil, yang diselimuti hutan hujan tropis dan mangrove, kini tengah dalam proses beralih wujud menjadi lansekap industrial. Separuh dari perubahan lansekap ini adalah akibat dari pembangunan industri migas dan menyusul industri perkebunan kelapa sawit skala raksasa. Hari ini, bahan bakar minyak tidak hanya dihasilkan oleh migas yang terletak di bawah tanah, melainkan juga bersumber dari minyak nabati yang tumbuh dari pohon.

PT Varita Majutama adalah perusahaan pertama yang membuka perkebunan kelapa sawit di Teluk Bintuni. Pada tahun 1996, perusahaan tersebut mendapat izin untuk membuka tiga blok perkebunan, masing-masing seluas 6.460 hektar, 5.510 hektar dan 5.300 hektar. Saat itu, PT Varita Majutama masih dimiliki oleh Jayanti Group yang telah mengantungi izin HPH untuk penebangan kayu di wilayah yang sama melalui anak perusahaannya, PT Agoda Rimba Irian. PT Varita Majutama telah beralih kepemilikan beberapa kali; pertama kepada PT Karya Teknik dan kemudian kepada PT Expedisi. Akhirnya pada tahun 2012, 100% sahamnya diakuisisi oleh sebuah perusahaan asal Malaysia, The Lion Group.[27]

---

26 http://www.antaranews.com/berita/386201/ferrostaal-gandeng-chandra-asri-investasi-pabrik-petrokimia , http://www.up4b.go.id/index.php/prioritas-p4b/5-infrastruktur-dasar/item/434-lokasi-rencana-pembangunan-pabrik-petrokimia-di-teluk-bintuni-disepakati

27 Disebut di laporan ini di Mongabay.co.id: http://www.mongabay.co.id/2012/10/09/bisnis-sawit-malaysia-terus-berjaya-gunduli-hutan-indonesia/ Setelah reorganisasi dalam group, kepemilikan nanti dipindah dari Lion Forest Industries Berhad kepada Lion Agriculture (Indonesia) Sdn Bhd: http://www.liongroup.com.my/images/company/Report20131127115257.pdf

PT Varita Majutama sendiri sudah berkonflik dengan masyarakat adat setempat sejak tahun 1996. Perusahan ini berhasil mendapatkan surat yang ditandatangani oleh tujuh ketua marga yang berisi penyerahan hak atas tanah yang luasnya berkisar antara 15.000 dan 40.000 ha (sumber yang berbeda menunjukkan versi luas tanah yang berbeda) dengan nilai ganti rugi teramat murah, yaitu sebesar Rp. 10 juta saja. Surat ini diragukan keabsahannya dan ditengarai kental penipuan, karena beberapa ketua marga yang dimaksud sudah berusia lanjut dengan penglihatan yang rabun atau bahkan buta huruf, sehingga mustahil mereka memahami isi surat itu. Selain itu, terdapat keraguan bahwa para ketua marga ini adalah pemegang hak ulayat sesungguhnya yang berhak mengambil keputusan atas tanah yang disengketakan.[28]

Pada tahun 2009, PT Varita Majutama lagi-lagi menunjukkan cara picik yang sama. Perusahaan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 100 juta atas tanah seluas 3.300 hektar atau per hektar tanah sekitar Rp 30.000. Bayangkan! tidak hanya itu, perusahaan ini juga membebankan syarat bahwa warga setempat tidak boleh menuntut kembali tanah mereka hingga generasi cucu mereka nanti.[29]

Masyarakat adat di sekitar Tofoi tanpa kenal lelah terus menuntut kompensasi layak atas kerugian yang harus mereka tanggung, meliputi kayu yang dikuasai, tempat keramat yang dihancurkan, satwa liar khas yang hilang dari wilayah ini, serta insiden intimidasi yang kerap dilakukan oleh aparat terhadap warga. Pada tahun 2007 dan tahun 2012, mereka berinisiatif untuk melakukan aksi blokade terhadap perkebunan karena merasa tuntutan mereka tidak pernah dipedulikan oleh perusahaan.[30]

28 Masyarakat Adat Sumuri Teluk Bintuni & LP3BH Manokwari, 20th September 2013
29 http://jasoilpapua.blogspot.com/2013/09/sektor-tambang-dan-sawit-di-teluk.html
30 Masyarakat Adat Sumuri Teluk Bintuni & LP3BH Manokwari, 20th September 2013

Walaupun demikian, bukan berarti PT Varita Majutama jera untuk berekspansi. Pada Januari 2013, Kementerian Kehutanan melepaskan hak atas kawasan hutan tambahan seluas 35.371 hektar kepada perusahaan ini. Seakan belum cukup, masyarakat adat di sekitar Tofoi juga harus menghadapi dua perusahaan migas yang bernafsu untuk menguasai tanah ulayat mereka, yaitu Genting Oil dari Malaysia dan Eni Oil dari Italia. Kedua perusahaan ini semakin menambah berat masalah, apalagi kian banyak aparat kepolisian dan tentara yang diterjunkan untuk berjaga di wilayah ini. Sebagai contoh, pada tahun 2012, terjadi sengketa batas tanah ulayat antara marga Kamisopa dan marga Sodefa yang berujung pada perkelahian antar warga. Salah seorang dari warga pun ditangkap oleh polisi dengan tuduhan telah berbuat kriminal. Pihak kepolisian kemudian memaksa kakak laki-laki dari tahanan tersebut untuk menandatangani surat pelepasan hak ulayat kepada Genting Oil. Jika ia menolak, maka Polisi mengancam adiknya akan dipenjarakan selama lima tahun.[31]

Ada perusahaan lain bernama PT Suber Karunia Raya yang punya rencana untuk buka kebun sawit di Teluk Bintuni bagian utara, di lokasi tersebar di Distrik Mayaado, Biscoop Aranday dan Tembuni. Walaupun perusahaan ini dapat persetujuan prinsip untuk melepaskan kawasan hutan pada tahun 2011 lalu, belum ada berita kalau rencana masih aktif sampai sekarang.

Pada tahun 2013, tersiar kabar bahwa empat marga pemilik hak ulayat (Iba, Menci, Hornas, dan Irai) telah menyerahkan kontrak atas hak tanah seluas 24.000 hektar kepada perusahaan kelapa sawit PT HCW Papua Plantation untuk jangka waktu 30 tahun. Perusahaan ini sendiri sebenarnya sudah pernah gagal mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan untuk prinsip pelepasan kawan hutan, walau tentu saja mereka masih bisa untuk mengupayakannya lagi. Belum ada informasi lebih lanjut terkait kepemilikan PT HCW Papua Plantation. Saat mendatangi kantornya yang terletak di Jakarta Utara (alamat yang sama dengan PT Mega Mustika Plantation dan PT Cipta Papua Plantation di Sorong), karyawan yang berhasil ditemui tidak bersedia memberikan informasi apapun tentang perusahaan ini. Lagi-lagi, di kantor ini juga tidak ditemukan plang penanda apapun yang terpampang, sehingga aktivitas sesuangguhnya dari perusahaan ini masih tetap merupakan teka-teki.

Awal Maret 2015, satu calon investor perkebunan kelapa sawit lainnya bernama PT Menara Wasior, mengumumkan rencana kegiatan pembangunan kelapa sawit seluas 32.173 hektar dan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 2 x 90 ton TBS/Jam, berlokasi di Distrik Kuriwamesa dan Naikere, Kabupaten Teluk Wondoma. Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Teluk Wondama mengkonfirmasi bahwa perusahaan PT. Menara Wasior sudah memiliki Izin Lokasi dari Bupati dan Izin Prinsip dari Kementerian Kehutanan. Kepala Distrik Naikere mengkonfirmasi sudah mendengar rencana tersebut, tetapi belum pernah ada pertemuan sosialisasi perusahaan kepada masyarakat.

31 Bin Madag Hom, press release 17th April 2013, Konflik Tapal Batas antara Marga Ateta-Agoba, Suku Sumuri

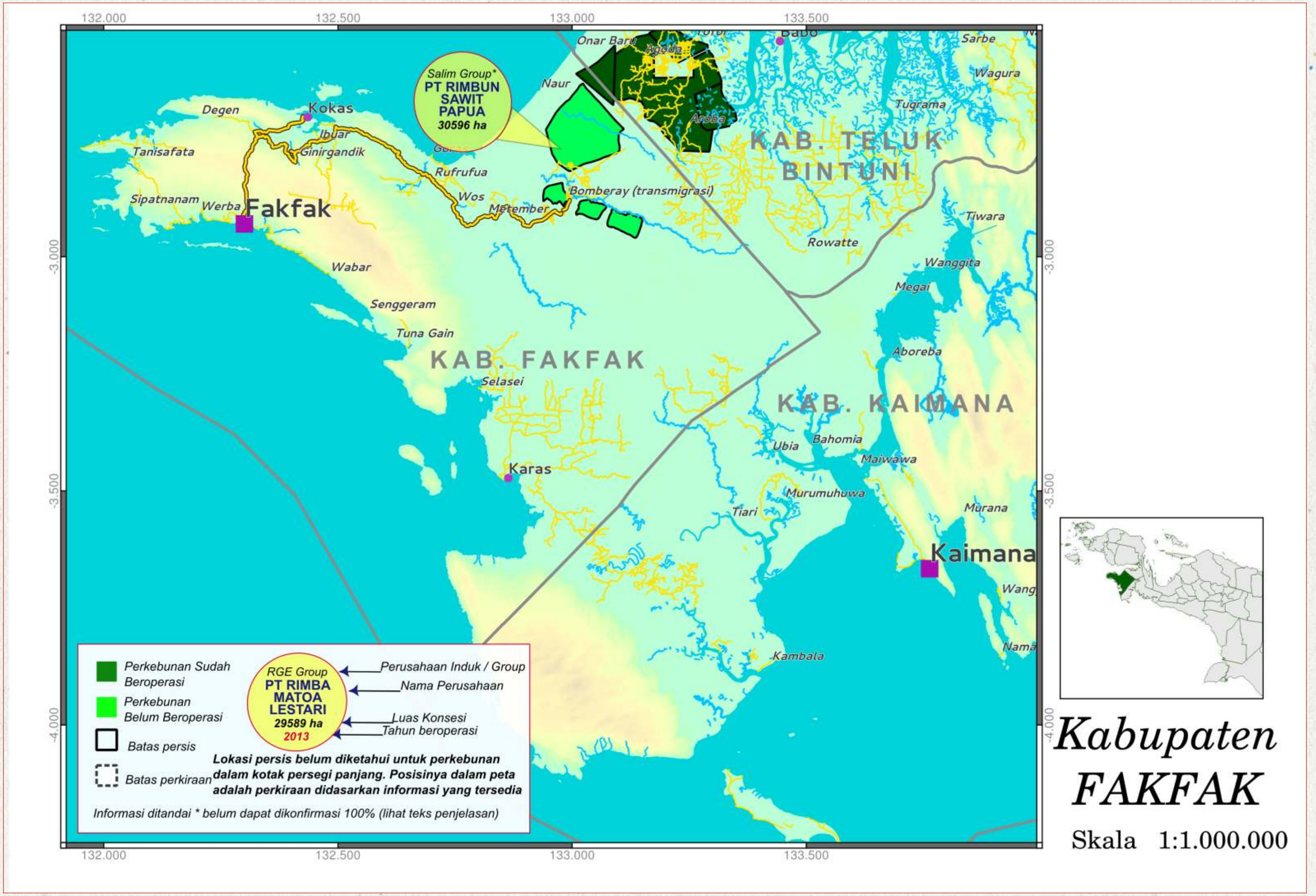
132.000
132.500
133.000
133.500
-3.000
-3.500
-4.000
Salim Group*
PT RIMBUN SAWIT PAPUA
30596 ha
Onar Baru
Naur
Sarbe
Wagura
Tugrama
Degen
Kokas
Ibuar
Ginirgandik
Tanisafata
Rufrufua
Wos
Metember
Bomberay (transmigrasi)
Sipatnanam
Werba
Fakfak
KAB. TELUK BINTUNI
Tiwara
Rowatte
Wanggita
Megai
Wabar
Senggeram
Tuna Gain
KAB. FAKFAK
Selasei
Aboreba
KAB. KAIMANA
Ubia
Bahomia
Maiwawa
Karas
Murumuhuwa
Tiari
Murana
Kaimana
Kambala
Perkebunan Sudah Beroperasi
Perkebunan Belum Beroperasi
Batas persis
Batas perkiraan
RGE Group
PT RIMBA MATOA LESTARI
29589 ha
2013
Perusahaan Induk / Group
Nama Perusahaan
Luas Konsesi
Tahun beroperasi
Lokasi persis belum diketahui untuk perkebunan dalam kotak persegi panjang. Posisinya dalam peta adalah perkiraan didasarkan informasi yang tersedia
Informasi ditandai * belum dapat dikonfirmasi 100% (lihat teks penjelasan)
Kabupaten FAKFAK
Skala 1:1.000.000

F A K F A K

Andalan Agropolitan dalam Kendali Modal

PT Rimbun Sawit Papua adalah salah satu perusahaan yang berencana membuka perkebunan kelapa sawit di Kampung Otoweri dan Kampung Mbina Jaya, Distrik Bomberay. Perkebunan yang akan dibuka ini berada persis di sisi perbatasan Kabupaten Teluk Bintuni, dengan demikian posisinya berdampingan langsung dengan lokasi PT Varita Majutama yang termasuk dalam zona industri utama Kabupaten Teluk Bintuni. Tidak hanya menjadi target para investor kelapa sawit, daerah ini merupakan sasaran para investor pemburu gas bumi.

PT Rimbun Sawit Papua (RSP) sangat mungkin akan beroperasi dan mulai menggunduli hutan dalam waktu dekat, mengingat perusahaan ini telah mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan seluas 25.286 hektar pada Januari 2014 lalu. Selain itu, perusahaan ini juga sudah mengantungi izin lokasi yang diklasifikasikan sebagai “area penggunaan lain” seluas 7.581 hektar di sekitar pemukiman-pemukiman transmigrasi Bomberay.

Dalam dokumen AMDAL, perusahaan PT. RSP tercatat beralamat di Kompleks Duta Merlin di Jalan Gajah Mada, Jakarta. Alamat ini adalah alamat yang sama dengan beberapa anak perusahaan Salim Ivomas Pratama, yang merupakan bagian dari Indofood Agri Resources milik Salim Group. Direktur PT RSP adalah Jef Setiawan Winata, seorang pengusaha asal Bandung yang sudah bertahun-tahun malang melintang di dunia bisnis beragam sektor di Kabupaten Fakfak.

Meski hingga hari ini PT RSP belum mulai beroperasi, namun sudah ada laporan tentang tindakan represif aparat dalam menyikapi penolakan penduduk lokal terhadap industri kelapa sawit di daerah

tersebut. Pada Februari 2012, media lokal mewartakan soal penangkapan sepuluh orang di kota Fakfak yang melakukan aksi demonstrasi saat rombongan dari Kementerian Pertanian datang untuk memantau lahan perkebunan kelapa sawit di daerah Bomberay.[32]

Para aktivis lokal di Fakfak mengkhawatirkan bahwa perkebunan kelapa sawit bisa jadi hanya merupakan satu bagian kecil saja dari rencana yang jauh lebih luas untuk mengembangkan kawasan andalan agropolitan di segala penjuru Kabupaten Fakfak[33]. Di lokasi yang tidak terlalu jauh dari konsesi PT Rimbun Sawit Papua di Distrik Bomberay, direncanakan pembangunan kota agrikultur dan peternakan skala besar. Rencana potensial lain misalnya hutan tanaman industri untuk industri pulp dan perkebunan jagung raksasa. Meski demikian, rincian spesifik soal perusahaan apa saja yang akan terlibat dalam industri besar-besaran ini belum bisa dipastikan.

Di Kabupaten Kaimana, tetangga Fakfak, ada dua perusahaan sedang memohon pelepasan kawasan hutan untuk membuka perkebunan kelapa sawit pada Juli 2013, yakni: PT. Cipta Palm Sejati dengan areal seluas 49.000 ha dan PT. Agro Mulya Lestari dengan areal seluas 50.500 ha. Permohonan tersebut belum berhasil dan belum diketahui kalau kedua perusahaan ini masih melanjutkan investasinya. Tidak ada informasi kalau ada perusahaan lain yang berhasil mengajukan penanaman kelapa sawit di Kaimana.

32 http://z.tabloidjubi.com/index.php/2012-10-15-06-23-41/seputar-tanah-papua/17168-10-warga-fak-fak-di-tahan-polisi . (Sayangnya artikel ini tidak lagi terdapat online)
33 https://awasmifee.potager.org/?p=745

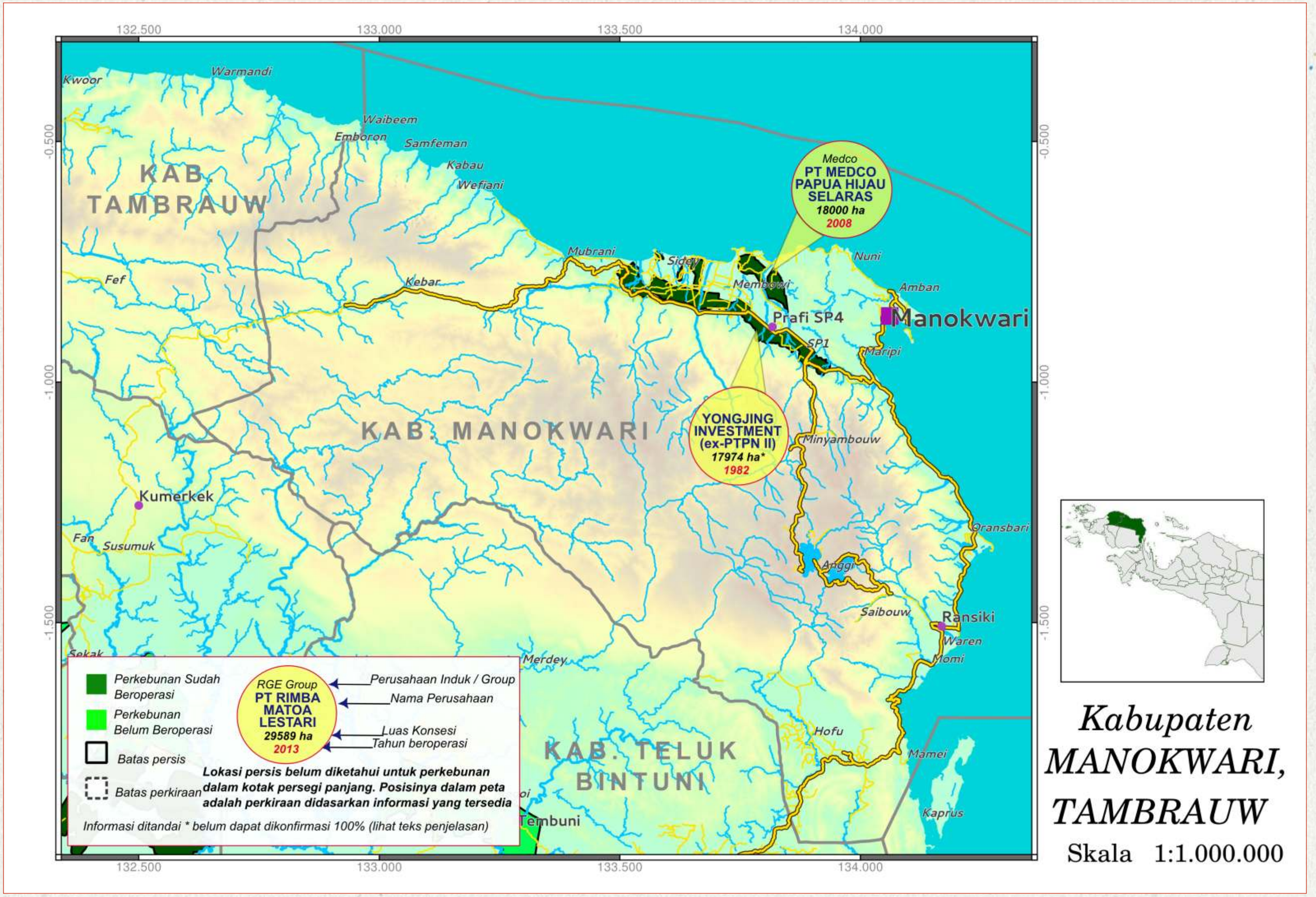
132.500
133.000
133.500
134.000
-0.500
-1.000
-1.500
Kwoor
Warmandi
Waibeem
Emboron
Samfeman
Kabau
Wefiani
KAB. TAMBRAUW
Fef
Kebar
Mubrani
Sidey
Membowi
Nuni
Amban
Prafi SP4
Manokwari
SP1
Maripi
Medco
PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS
18000 ha
2008
YONGJING INVESTMENT (ex-PTPN II)
17974 ha*
1982
KAB. MANOKWARI
Minyambouw
Kumerkek
Fan
Susumuk
Oransbari
Anggi
Saibouw
Ransiki
Waren
Momi
Sekak
Merdey
Hofu
Mamei
KAB. TELUK BINTUNI
Tembuni
Kaprus
Perkebunan Sudah Beroperasi
Perkebunan Belum Beroperasi
Batas persis
Batas perkiraan
RGE Group
PT RIMBA MATOA LESTARI
29589 ha
2013
Perusahaan Induk / Group
Nama Perusahaan
Luas Konsesi
Tahun beroperasi
Lokasi persis belum diketahui untuk perkebunan dalam kotak persegi panjang. Posisinya dalam peta adalah perkiraan didasarkan informasi yang tersedia
Informasi ditandai * belum dapat dikonfirmasi 100% (lihat teks penjelasan)
Kabupaten
MANOKWARI, TAMBRAUW
Skala 1:1.000.000

MANOKWARI, TAMBRAUW

Pengelolaan Lahan Melanggar Ketentuan Mendatangkan Bencana Banjir dan Konflik

Kabupaten Manokwari umumnya merupakan daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan curam, namun di kaki pegunungan sisi barat kota, terbentang tanah datar memanjang sejauh 100 km. Persis di dataran rendah inilah terdapat dua perkebunan kelapa sawit yang sudah beroperasi. Badan Usaha Milik Negara PTPN II adalah perkebunan kelapa sawit pertama di Tanah Papua dengan luas konsesi 23.000 hektar, yang beroperasi di Distrik Warmare, Masni dan Prafi, Manokwari, sejak tahun 1982. Penananam kelapa sawit ini awalnya dimaksudkan untuk memfasilitasi para transmigran yang didatangkan dari wilayah lain Indonesia, yaitu para petani dari pulau Jawa, Bali dan Timor Barat. Akibatnya, banyak lahan transmigrasi di daerah ini merupakan program lahan plasma. Para transmigran dan segelintir orang asli Papua masing-masing dialokasikan dua hektar kebun kelapa sawit untuk dikelola, untuk kemudian menyerahkan hasilnya kepada perusahaan.

Kini, Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II di wilayah ini sudah kadaluarsa, masa depan dari lahan perkebunan pun belum bisa dipastikan. Rencana pihak Pemda akan mengambil alih hak atas perkebunan ini dan mengelolanya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum terealisasi. Pihak PTPN II justeru sudah melelang asset kebun kelapa sawit yang sudah memiliki HGU (Hak Guna Usaha) seluas 3.000 hektar dan satu pabrik minyak kelapa sawit terjual Rp. 85 miliar kepada perusahaan asal Cina, PT. Yong Jing Investment (YJI), senilai Rp. 87,3 miliar. Proses lelangnya terbilang ganjil, tidak sesuai prosedur dan nilai penjualannya masih dibawah perhitungan PT. Sucofindo sebesar Rp. 114 miliar. Ditemukan pula dokumen perjanjian pengikatan pembelian tanah dan asset yang ditandatangani Direktur PT. YJI dan Direktur PADOMA, perusahan daerah provinsi Papua Barat.[34]

Pemerintah dan PTPN II belum pernah menginformasikan kepada masyarakat setempat tentang penjualan dan pengalihan asset tersebut. Pengalihan HGU tanpa sepengetahuan masyarakat melanggar perjanjian. Masyarakat adat setempat masih mempunyai hak atas tanah perkebunan tersebut dan apalagi belum ada penyelesaian secara

34 http://www.radarsorong.com/index.php?mib=berita.detail&id=24131

adil atas klaim lahan maupun janji pembangunan fasilitas sosial padahal HGU sudah berakhir. Di sisi lain, kegelisahan menyelimuti para transmigran yang selama puluhan tahun telah mengelola lahan plasma. Banyak dari mereka belum kunjung mendapat sertifikat hak atas tanah, menjadikan posisi mereka begitu rentan tersingkir tanpa jaminan apapun. Permasalahan ini terletak pada skema program transmigrasi itu sendiri, ketika pemerintah tidak pernah menyelesaikan persoalan hak tanah ulayat dengan sepenuh hati. Pemerintah merebut tanah adat untuk dikelola masyarakat transmigran begitu saja, tanpa ada dialog untuk menjembatani secara sungguh-sungguh, tanpa pernah memberikan ganti rugi. Persoalan inilah yang di kemudian hari kerap menjadi pangkal perseteruan antara para transmigran dan masyarakat lokal, antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah.[35]

Perusahaan kedua yang beroperasi di Manokwari adalah Medco Group, lewat anak perusahaannya yang bernama PT Medcopapua Hijau Selaras. Perkebunan milik Medco terletak tak jauh dari perkebunan kelapa sawit milik PTPN II di Distrik Sidey dan Masni. Mulai dibuka sejak 2008, perkebunan kelapa sawit Medco berdiri di atas lahan berstatus “area penggunaan lain”, termasuk juga di atas lahan yang dahulu dicanangkan untuk dikelola oleh PTPN II. Pada tahun 2012, Kementerian Kehutanan melepaskan lagi kawasan hutan seluas 6.791 hektar untuk dikuasai oleh perusahaan ini. Menurut laporan warga, ditengarai PT Medcopapua masih terus berproses untuk semakin memperluas area perkebunan mereka.

Kepada para kepala suku pemegang hak ulayat, PT Medco menawarkan harga rata-rata Rp. 450.000 per hektar untuk masa kontrak selama 30 tahun. Meski angka ini bisa jadi harga ganti rugi termahal yang pernah

35 https://awasmifee.potager.org/?p=754

ditawarkan oleh perusahaan perkebunan kepada masyarakat Papua, namun kita tidak bisa menutup mata bahwa jumlah ini tidak ada arti apa-apa jika dibandingkan dengan manfaat ekonomi yang bisa diperoleh oleh masyarakat Papua atas hutan selama 30 tahun. Pada November 2012, media melaporkan bahwa masyarakat adat menduduki kantor Medco hingga menyebabkan perusahaan lumpuh dan tidak bisa beroperasi. Aksi ini dilancarkan karena kekecewaan mereka atas janji-janji perusahaan untuk memberikan lahan plasma dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal Papua yang tidak pernah ditepati.[36]

Sejak perkebunan Medco mulai menanam kelapa sawit, penduduk di sekitar Sungai Wariori kerap kali mengeluhkan banjir yang semakin sering terjadi. Maret 2014 lalu, banjir besar dari air sungai yang meninggi telah menyapu seluruh desa, meluluhlantakkan pemukiman dan lahan pertanian mereka. Ratusan rumah rusak, penduduk mau tidak mau harus dievakuasi dan mengungsi. Kerugian materiil ditaksir miliaran rupiah. Selama ini Medco menanam kelapa sawit persis di sepanjang tepian sungai, tindakan yang jelas melanggar regulasi pengendalian banjir.[37]

Kabupaten Tambrauw adalah kabupaten baru yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong pada tahun 2008. Sebelumnya pada tahun 2009, perusahaan kelapa sawit bernama PT Bintuni Agro Prima Perkasa berhasil memperoleh persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan seluas 40.000 hektar di Distrik Abun dan Kebar. Di sisi lain, PT Papua Sawita Raya (Rajawali) juga telah memegang izin lokasi dari Bupati Sorong untuk beroperasi di Distrik Moraid. Kedua perusahaan ini kini tidak lagi aktif beroperasi.

Distrik Kebar dan Distrik Moraid sendiri kini tengah menjadi objek sengketa perebutan antar Pemda. Untuk kasus Moraid, Pemda Sorong terus mengklaim bahwa seharusnya Distrik Moraid menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Sorong. Padahal, tuntutan ini sudah dikalahkan oleh keputusan MK dan undang-undang baru tahun 2013 yang memaparkan bahwa Distrik Moraid termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Tambrauw.[38] Desa-desa yang berbeda mendukung kabupaten yang berbeda pula, sehingga timbul kekhawatiran peperangan antar desa akan berpotensi pecah di masa-masa pemilihan legislatif 2014. Sejauh ini, Kepala Distrik bahkan sudah dianiaya dan mengalami kekerasan fisik.[39] Beberapa pihak juga gencar mendorong terbentuknya Kabupaten Manokwari Barat, yang wilayahnya meliputi bagian timur Kabupaten Tambrauw dan bagian barat Kabupaten Manokwari. Jika terwujud, artinya Distrik Kebar akan masuk menjadi bagian dari wilayah pemekaran yang baru ini.

Kesimpulan yang tidak bisa dihindari dari sengketa antar Pemda ini adalah besarnya nafsu pihak pemerintah untuk mengeruk keuntungan dari potensi industri sumber daya alam yang ada di daerah ini. Industri kelapa sawit adalah salah satunya.

36 http://teropongonline.com/detail-3147-kebun-sawit-medco-diduduki-warga-manokwari.html
37 http://www.mongabay.co.id/2014/03/08/kala-hutan-terbabat-berganti-sawit-banjir-pun-terjang-manokwari/ , http://jasoilpapua.blogspot.com/2014/02/pahitnya-sawit-baru-terasa-di-manokwari.html

38 Undang Undang 14 tahun 2013 http://produk-hukum.kemenag.go.id/downloads/cff2962de655ea1ccc56fe015bbab582.pdf
39 http://infopublik.kominfo.go.id/read/74132/situasi-kamtibmas-distrik-moraid-kembali-kondusif.html

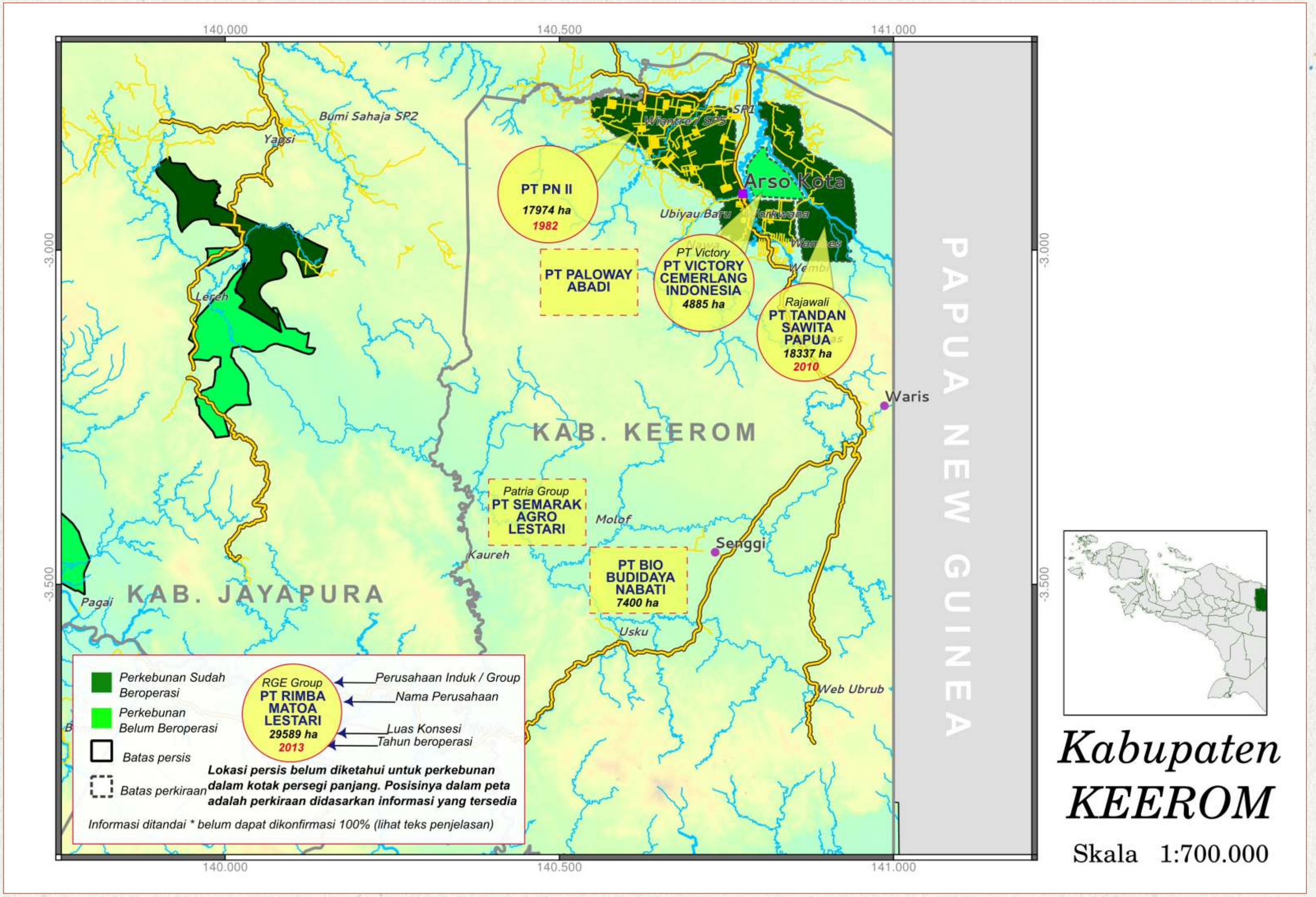
140.000
140.500
141.000
-3.000
-3.500
Bumi Sahaja SP2
Yapsi
Lereh
Pagai
KAB. JAYAPURA
KAB. KEEROM
PAPUA NEW GUINEA
Wiantre / SP5
SP1
Arso Kota
Ubiyau Baru
Kankwana
Wamaes
Wembi
Waris
Senggi
Molof
Kaureh
Usku
Web Ubrub
PT PN II
17974 ha
1982
PT PALOWAY ABADI
PT Victory
PT VICTORY CEMERLANG INDONESIA
4885 ha
Rajawali
PT TANDAN SAWITA PAPUA
18337 ha
2010
Patria Group
PT SEMARAK AGRO LESTARI
PT BIO BUDIDAYA NABATI
7400 ha
Perkebunan Sudah Beroperasi
Perkebunan Belum Beroperasi
Batas persis
Batas perkiraan
RGE Group
PT RIMBA MATOA LESTARI
29589 ha
2013
Perusahaan Induk / Group
Nama Perusahaan
Luas Konsesi
Tahun beroperasi
Lokasi persis belum diketahui untuk perkebunan dalam kotak persegi panjang. Posisinya dalam peta adalah perkiraan didasarkan informasi yang tersedia
Informasi ditandai * belum dapat dikonfirmasi 100% (lihat teks penjelasan)
Kabupaten
KEEROM
Skala 1:700.000

K E E R O M

Transmigrasi sebagai Pengaman Perbatasan Negara, Masyarakat Adat Terdesak

Terletak di selatan Kota Jayapura, Kabupaten Keerom berada di sisi garis perbatasan dengan Papua Nugini. Pada Awal 1980 an, dikembangkan rencana untuk menjadikan Distrik Arso sebagai wilayah transmigrasi. Sebagaimana halnya yang terjadi di Manokwari, salah satu kunci untuk membuka lahan transmigrasi adalah dengan menyediakan perkebunan kelapa sawit untuk dioperasikan oleh badan usaha milik Negara PTPN II. Umumnya lahan kelapa sawit ini akan dibagikan dan digarap oleh para transmigran dalam program yang dikenal sebagai PIR atau perkebunan plasma.

Begitu banyak tanah ulayat milik masyarakat adat setempat dirampas untuk kepentingan perkebunan. Masyarakat lokal tidak bisa membuat apa-apa, karena takut diberi stigma sebagai anggota separatis OPM. Ketakutan ini beralasan, mengingat konflik antara para gerilyawan Papua dan NKRI masih sangat panas bergulir saat itu.[40] Strategi menakut-nakuti warga semacam ini sama sekali bukan hal baru dan biasa digencarkan oleh PTPN II, demi tercapainya tujuan mereka untuk menguasai lahan. Pada tahun 1970an misalnya, sebagian besar lahan di pusat aktivitas PTPN II di Sumatra Utara diperoleh dengan cara menerjunkan ABRI untuk merampas tanah petani. Di saat bersamaan, ABRI juga memperlakukan mereka yang menolak diberi label 'komunis' dan sebagai bentuk ancaman negara.

Jika diukur dari nilai ekonomi, PTPN II di Keerom sebenarnya tidak pernah benar-benar berhasil. Para petani transmigran yang berpartisipasi dalam program PIR tidak pernah hidup sejahtera dan harus berjuang keras untuk bertahan hidup, sementara masyarakat pribumi yang menjadi bagian dari program ini juga bahkan hidup lebih susah dan lebih miskin lagi.[41] Meski demikian, rencana perkebunan PTPN II untuk menjadikan Arso sebagai daerah pertanian perintis di wilayah perbatasan Papua, bisa dikatakan berhasil karena Arso kemudian memang menjadi daerah pertanian yang subur dan maju. Namun yang perlu dicatat, populasi masyarakat mayoritas yang merasakan dampak dari hal ini utamanya adalah para pendatang, sementara masyarakat asli Papua sendiri hidup terpinggirkan dengan kondisi ekonomi yang teramat buruk.[42]

PTPN II mengakui bahwa kelapa sawit yang diterima oleh pabrik mereka berasal dari 8.339 hektar perkebunan, termasuk didalamnya

---

40 *http://nasional.kompas.com/read/2010/02/08/0501214/Ketika.Kebun.Kelapa.Sawit.Datang*
41 Laporan SKP, sekarang hanya tersedia di Scribd http://www.scribd.com/doc/58520644/smp-18i
42 Cypri JP Dale dan John Djonga, Paradox Papua, Foker LSM, 2012

1.068 hektar yang dikelola oleh perusahaan swasta bernama PT Bumi Irian Perkasa (BIP). PT BIP juga dikenal sebagai perusahaan kontraktor yang terlibat dalam kontrak pelebaran jalan Jayapura-Sentani.

Pada tahun 2010, PT Tandan Sawita Papua (TSP) menjadi perusahaan kedua yang beroperasi di Kabupaten Keerom. Perusahaan PT. TSP dimiliki oleh Green Eagle Group, (dulu sebuah usaha patungan antara Rajawali Group dan perusahan Perancis Louis Dreyfus Commodities ini namun status sekarang dibawah naungan BW Plantation dengan Rajawali sebagai pemegang saham utama).[43] PT. TSP membabat hutan setelah mendapat izin usaha perkebunan seluas 18.337 hektar (dari izin lokasi awal seluas 26.300 hektar).

Dalam banyak laporan, pengalaman warga Keerom dengan perusahaan baru ini sama pahitnya seperti dengan PTPN II dulu. Pertama, rata-rata uang tali asih untuk pelepasan tanah ulayat hanya berkisar Rp. 384.000 per hektar.[44] Negosiasi hanya dilakukan dengan para kepala marga dan tokoh masyarakat laki-laki.[45] Setelah empat tahun beroperasi, PT TSP belum kunjung memenuhi janjinya untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan.[46] Kondisi tempat kerja dan upah juga kerap kali menjadi persoalan yang dikeluhkan oleh para karyawan.[47] Pada April 2014, dua orang karyawan diperintahkan untuk melapor kepada aparat kepolisian terkait demonstrasi tuntutan kenaikan upah yang mereka gelar sebelumnya. Mereka ditahan selama dua minggu dan dilepaskan setelah dipaksa untuk menandatangani surat yang berisi pernyataan pemecatan dari perusahaan serta perjanjian untuk tidak akan menyuarakan tuntutan lagi.[48]

Dengan masuknya dua perusahaan kelapa sawit dan akibat perluasan daerah transmigrasi, kini ruang hidup suku-suku pribumi yang bergantung kepada hutan semakin terancam. Mereka harus berjuang untuk mempertahankan sisa-sisa lapak hutan yang masih tersisa. Salah satu contoh bisa dilihat di daerah “segitiga emas”, yang meliputi Arso Kota, Workwama dan Wambes. Sebelumnya masyarakat sekitar sudah pernah membakar kamp-kamp pembalakan kayu liar sebagai upaya untuk menyelamatkan hutan.[49] Sekarang, sebuah perusahan yang sudah bergerak beberapa tahun di bidang kayu, PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industries, sudah mendapatkan izin untuk membuka perkebunan kelapa sawit seluas 4.885 ha. Masyarakat lokal pun dengan tegas menyatakan penolakannya.[50]

Perusahaan lainnya, PT. Paloway Abadi diduga punya rencana perkebunan kelapa sawit di Distrik Skanto, bahkan mungkin sudah mulai menanam, namun data masih kurang tentang izin dan status perusahaan tersebut.

Ketika daerah di sekitar Arso semakin padat penghuninya, nun jauh di pedalaman Keerom, masih banyak daerah terpencil yang diselimuti hutan lebat, yang sebagian besar merupakan hutan primer. Meski demikian, telah disusun rencana untuk menjadikan daerah ini sebagai daerah transmigrasi. Pada tahun 2009, pemerintah menelurkan kebijakan tentang “Kota Terpadu Mandiri”, sebagai sebuah rencana strategis untuk mengkonsolidasikan kekuasaan negara Indonesia di

43 http://www.thejakartapost.com/news/2014/09/25/bwpt-raise-trilions-rights-issue-acquisition.html
44 http://www.wartapapuabarat.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/548-3-m2-tanah-adat-senilai-sepotong-pisang-goreng (versi asli di Bintang Papua sudah tidak online)
45 Papuan Voices, Mama Kasmira Pu Mau, https://www.engagemedia.org/Members/emnews/videos/mama_kasmira_pu_mau_final.mp4
46 http://www.fransiskanpapua.net/2014/05/1345/potret-kenistaan-perusahaan-sawit-kepada-masyarakat.php
47 http://www.mongabay.co.id/2013/09/25/derita-buruh-sawit-rajawali-group-di-papua-protes-beban-kerja-berbuah-pemecatan/
48 http://www.fransiskanpapua.net/2014/05/1349/upah-buruh-menunggu-kebijakan-bupati-jayapura.php
49 http://hidupbiasa.blogspot.com/2012/03/west-papuan-community-ecological.html (terjemahan). Artikel asli oleh ALDP http://www.aldepe.com/2012/03/merasa-hutannya-dirusak-warga-arso.html sudaah tidak ada online.
50 http://www.aldp-papua.com/pt-victory-diduga-akan-merusak-segitiga-emas-orang-keerom/

sepanjang perbatasan. Distrik Senggi di Kabupaten Keerom termasuk di dalamnya.[51] Dalam RTRW Provinsi Papua tahun 2014, lahan yang masih berupa hutan lebat nan subur ini pun dikeluarkan dari peta kawasan hutan negara dan direncanakan untuk dialihfungsikan sebagai kawasan pemukiman.

Tentu saja perkebunan kelapa sawit juga termasuk dalam rencana pembangunan di Senggi, sebagaimana yang terjadi di Arso dan di banyak daerah transmigrasi lainnya. Ada dua nama perusahaan yang pernah disebut oleh media terkait pembangunan kelapa sawit di dearah Senggi.[52] Yang pertama adalah PT Semarak Agri Lestari, yang masih merupakan satu perusahaan dengan PT Semarak Dharma Timber, pemegang hak konsesi kayu di area yang sama. Patria Group milik Jemmy Tamstil dan Fery Tamstil diduga sebagai induk dari kedua perusahaan ini. Perusahaan lain yang dilaporkan aktif berkegiatan di Senggi adalah PT Bio Budidaya Nabati yang dikabarkan akan kelola lahan seluas 5.000 hektar dari luas izin 7.400 hektar.[53] PT. Budidaya Nabati di Abepura memiliki alamat yang sama dengan PT Bumi Irian Perkasa, yang mengelola 1.068 hektar sawit di areal PTPN II. Namun, ketika dihubungi, PT. Bumi Irian Perkasa mengaku tidak memiliki hubungan dengan PT. Budidaya Nabati. Belum ada informasi lebih lanjut tentang kedua perusahaan ini, maupuan rencana operasi mereka di Keerom.

Dampak dari semua proyek ini adalah terbentuknya sebuah koridor sepanjang perbatasan yang didominasi oleh kaum transmigran. Hal ini juga akan mampu mendukung tujuan TNI untuk memperketat kuasa NKRI di daerah tempat gerilyawan OPM masih aktif beroperasi.

Namun masih ditemukan celah dalam rencana ini. Masyarakat di Distrik Waris telah menolak tegas perkebunan kelapa sawit dan menyatakan penolakan sejak awal, bahkan sebelum izin dikantungi calon investor. Pemerintah setempat sudah mengumumkan bahwa daerah ini akan dicadangkan sebagai perkebunan, namun masyarakat sekitar telah menyadari pengalaman pahit yang dirasakan oleh warga Arso sebelumnya. Selain itu, pengalaman buruk di Waris sendiri akibat pembalakan hutan liar telah menjadikan mereka begitu yakin akan penolakan terhadap pembangunan semacam ini.[54] Sejauh ini nampaknya keinginan mereka cukup diindahkan dan belum ada perusahaan yang diizinkan masuk ke daerah tersebut. Penolakan umumnya lebih mungkin berhasil di tahap awal, sebelum perusahaan dan permerintah benar-benar berkomitmen atas kepentingannya untuk mengeruk keuntungan dari daerah ini. Meski demikian, semua ini hanya bisa dimungkinkan terjadi jika masyarakat memiliki akses informasi terhadap rencana investasi.

51 http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/38255-2_kota_terpadu_mandiri_di_papua_diresmikan
52 http://bintangpapua.com/index.php/keerom/item/6834-pemerintah-kabupaten-keerom-siapkan-lahan-investasi (link broken)
53 http://bintangpapua.com/index.php/2012-12-03-03-14-02/2013-01-02-06-12-35/item/20124-investor-kelapa-sawit-akan-kelola-lahan-5000-hektar 54 http://tabloidjubi.com/2013/06/07/akibat-pengalaman-pahit-warga-waris-tolak-investor/ , http://www.fransiskanpapua.net/2013/06/552/masyarakat-di-distrik-waris-kabupaten-keerom-menolak-investasi.php

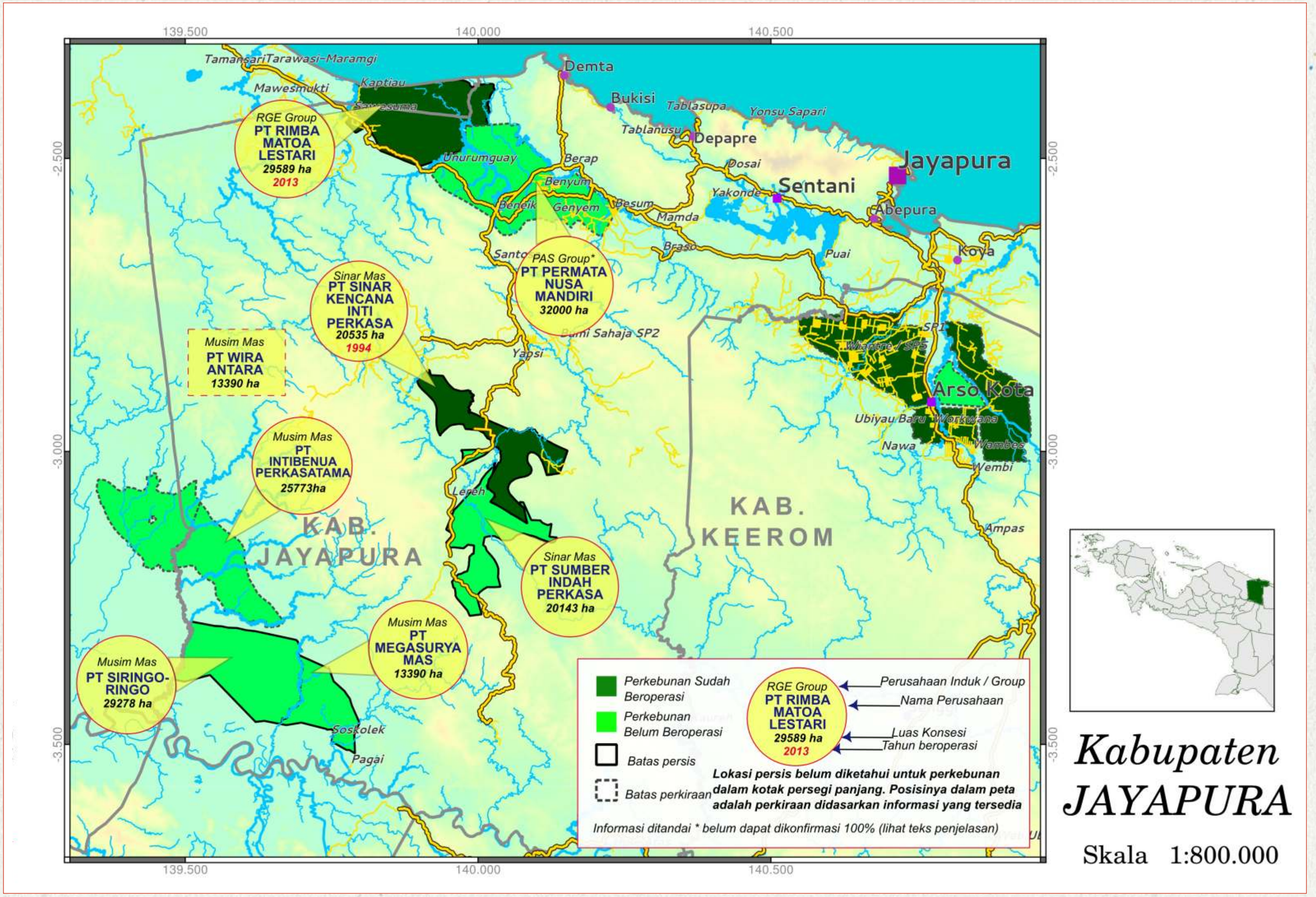
139.500
140.000
140.500
-2.500
-3.000
-3.500
TamansariTarawasi-Maramgi
Mawesmukti
Kaptiau
Demta
Bukisi
Tablasupa
Yonsu Sapari
Tablanusu
Depapre
Jayapura
Sentani
Dosai
Yakonde
Abepura
Koya
Puai
Ununumguay
Berap
Benyum
Beneik
Genyem
Besum
Mamda
Braso
Santo
Yapsi
Lereh
Soskolek
Pagai
Arso Kota
Ubiyau Baru
Workwana
Nawa
Wambes
Wembi
Ampas
KAB. JAYAPURA
KAB. KEEROM
RGE Group
PT RIMBA MATOA LESTARI
29589 ha
2013
Sinar Mas
PT SINAR KENCANA INTI PERKASA
20535 ha
1994
PAS Group*
PT PERMATA NUSA MANDIRI
32000 ha
Musim Mas
PT WIRA ANTARA
13390 ha
Musim Mas
PT INTIBENUA PERKASATAMA
25773ha
Sinar Mas
PT SUMBER INDAH PERKASA
20143 ha
Musim Mas
PT MEGASURYA MAS
13390 ha
Musim Mas
PT SIRINGO-RINGO
29278 ha
Perkebunan Sudah Beroperasi
Perkebunan Belum Beroperasi
Batas persis
Batas perkiraan
Perusahaan Induk / Group
Nama Perusahaan
Luas Konsesi
Tahun beroperasi
Lokasi persis belum diketahui untuk perkebunan dalam kotak persegi panjang. Posisinya dalam peta adalah perkiraan didasarkan informasi yang tersedia
Informasi ditandai * belum dapat dikonfirmasi 100% (lihat teks penjelasan)
Kabupaten JAYAPURA
Skala 1:800.000

J A Y A P U R A

Industri Kelapa Sawit Ancaman Serius Kerusakan Hutan Lembah Mamberamo

Wilayah Kabupaten Jayapura terentang memanjang dari Danau Sentani hingga Lembah Sungai Mamberamo nun jauh ke pedalaman. Daerah ini sangat mungkin dijadikan sebagai pusat pertumbuhan industri kelapa sawit. Dua dari tiga kelompok perusahaan agribinsis kenamaan dari Indonesia telah menanam kelapa sawit, sedangkan yang satunya lagi telah memiliki beberapa konsesi untuk merambah hutan primer terpencil. Perusahaan kelapa sawit lainnya mencari tempat di lembah Grime yang lebih padat penghuni, dengan harapan sanggup mengeser pertanian coklat skala kecil di daerah itu untuk menjadi perkebunan kelapa sawit raksasa.

PT Sinar Kencana Inti Perkasa, anak perusahaan Sinar Mas, adalah salah satu perusahaan swasta yang menjadi pelopor industri kelapa sawit di Lereh, Jayapura, pada tahun 1994. Saat perusahaan ini mulai melancarkan operasinya, mereka hanya membayar Rp. 11 juta kepada setiap marga. Perusahaan juga berjanji akan membayar 0,5 % dari nilai minyak sawit hasil produksi perkebunan kepada semua marga, angka yang tentu tidak seberapa ketika dibagikan kepada setiap marga.[55] Amarah warga memuncak pada tahun 2011. Mereka pun *memalang* perusahaan dan menuntut Rp. 50 miliar sebagai kompensasi 12.000 hektar dari 22.000 hektar luas total perkebunan.[56] Aksi palang kembali terjadi pada tahun 2012.[57]

Sinar Mas juga pernah memiliki rencana untuk membuka perkebunan di kawasan hutan yang letaknya bertetangga dengan lokasi anak perusahaan lainnya, PT Sumber Inti Perkasa. Namun saat ini Sinar Mas sudah membatalkan rencana tersebut, karena berhasil diyakinkan bahwa rencana itu melanggar Kebijakan Konservasi Hutan yang sebelumnya sudah pernah disepakati oleh divisi agribisnis Sinar Mas (Golden Agri Resources) pada tahun 2011.[58]

Sebagian besar lahan yang disasar oleh PT Sumber Inti Perkasa merupakan hutan tutupan hutan primer, yang semestinya masuk ke dalam kategori dilindungi jika merujuk pada Instruksi Presiden tentang moratorium pemberian izin terbaru yang dikeluarkan pada tahun 2011.[59] Meski demikian, karena Sinar Mas sudah mendapatkan persetujuan prinsip dari Kementerian Kehutanan untuk diperbolehkan

55 eia/telapak up for grabs
56 https://papuapost.wordpress.com/2011/06/10/tuntut-rp-50-m-warga-palang-pt-sinar-mas/
57 https://papuapost.wordpress.com/2011/06/10/tuntut-rp-50-m-warga-palang-pt-sinar-mas/
58 http://news.mongabay.com/2013/1106-gar-papua.html
59 Lihat Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, yang telah diperbaharui melalui Inpres Nomor 6 tahun 2013.

mengelola kawasan hutan itu, maka mereka bisa melobi agar area yang disasar tidak lagi dimasukkan ke dalam peta wilayah yang dilindungi oleh Inpres moratorium. Demikianlah, terjadi satu tahun kemudian, lahan itu lantas dikategorikan ulang sebagai "Areal Penggunaan Lain" demi mengakomodir rencana Sinar Mas.[60] Artinya, terlepas dari ikrar Sinar Mas untuk tidak membuka perkebunan di atas lahan konsesi ini, lahan tersebut tetap saja bukan lagi menjadi bagian dari moratorium yang berlaku dan bukan lagi menjadi kawasan hutan. Maka tak heran, sangat mudah bagi pemerintah daerah untuk menyerahkan izin atas lahan yang sama kepada perusahaan lain. Sinar Mas juga tentu akan sangat gampang untuk menjual izin konsesi yang dipegangnya kepada perusahaan lain yang mengabaikan dan tidak berpegang teguh pada kebijakan konservasi hutan.

60 http://www.greenomics.org/docs/GAR_Expansion_Papua_June2013.pdf

Perkebunan kelapa sawit lain yang telah beroperasi di Kabupaten Jayapura adalah PT Rimba Matoa Lestari, anak perusahaan dari Agrindo Group yang merupakan bagian dari Raja Garuda Mas Group. Walaupun PT Rimba Matoa Lestari sudah memegang izin di wilayah tersebut sejak tahun 1990 an, perusahaan ini baru mulai beroperasi dan mulai membuka lahan serta menanam kelapa sawit sejak beberapa tahun lalu. Sejauh ini, belum ada laporan terkait konflik perusahaan dengan masyarakat setempat.

Salah satu perusahaan perkebunan terbesar di Indonesia, Musim Mas, ditengarai akan menjadi perusahaan selanjutnya yang akan mengalihfungsikan hutan belantara Papua menjadi ladang kelapa sawit. Dua anak perusahaannya, PT Siringo-Ringo (29.278 ha) dan PT Megasurya Mas (13.389 ha), telah memegang semua izin yang dibutuhkan untuk mulai beroperasi di Distrik Kaureh, sebuah daerah sangat terpencil di dekat Sungai Mamberamo. Sungai raksasa ini bisa dikatakan sebagai sungai Amazon Pulau Papua, mengalir deras dan mengular panjang segaris pantai pesisir bagian utara Papua, belum banyak tersentuh pembangunan skala industri maupun pemukiman besar.

Informasi dari Greenpeace membenarkan bahwa wilayah ini masih merupakan hutan belantara yang teramat lebat dan berbatasan dengan suaka margasatwa Mamberamo-Foja. Beberapa jenis fauna langka berada dalam konsesi ini, seperti kanguru pohon mantel emas (*Dendrolagus pulcherrimus*) yang berstatus terancam punah dalam derajat yang kritis, kura-kura raksasa (*Pelochelys cantorii*) yang berstatus terancam dan Kakaktua Raja (*Probosciger aterrimus*).[61]

61 http://www.greenpeace.org/international/Global/international/briefings/forests/2014/ProcterGambleDS_MediaBriefing_Final.pdf

Dua anak perusahaan Musim Mas lainnya, masih tengah mengupayakan perizinan, namun belum kunjung mendapat persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan. PT Intibenua Perkasatama tengah mengajukan permohonan pemanfaatan lahan untuk perkebunan seluas 25.773 hektar dan PT Wira Antara menghendaki lahan seluas 31.561 hektar. Pada Mei 2013, PT Intibenua Perkasatama, bersama anak perusahaan Musim Mas lainnya di Sarmi (PT Daya Indah Nusantara) mengirimkan surat permohonan kepada Departemen Kehutanan agar lahan tersebut tidak semestinya masuk ke dalam cakupan moratorium atas izin kehutanan terbaru. Dalam hemat perusahaan, area ini bukanlah merupakan hutan primer dan bukan pula hutan gambut melainkan hutan sekunder dengan tanah yang kaya mineral. Padahal dalam beberapa decade terakhir tidak pernah ada perusahaan kayu yang beroperasi didaerah tersebut.

Pada Desember 2013, sebagaimana bisa diduga, area ini pun dikeluarkan dari peta moratorium revisi kelima.[62]

Sementara itu, lokasi PT Wira Antara belum terlacak, namun diduga berada tidak jauh dari lokasi anak perusahaan Musim Mas lainnya. Rencana Musim Mas di Jayapura dapat dianggap sebagai sebuah ancaman teramat serius terhadap keseimbangan ekologi di Papua, karena hutan yang dirambah perusahaan ini termasuk sebagai hutan belantara yang teramat subur dan kaya keanekaragaman hayati. Pembabatan atas hutan terpencil ini demi kepentingan pengembangan agribisnis jelas akan berdampak terhadap kerusakan hutan hujan sekaligus ekosistem di sekitar Lembah Sungai Mamberamo.

Desember 2014, Musim Mas Group mengumumkan kebijakan kelestarian, yang berarti semua anak perusahaannya tidak akan membuka kebun di hutan nilai konservasi tinggi atau stok karbon tinggi. Makanya kemungkinan besar Musim Mas tidak akan melanjutkan rencananya di Papua ketika izin lokasi kadaluwarsa pada Maret 2015 mendatang. Kalau demikian, situasi akan mirip dengan lahan konsesi PT. Sumber Indah Perkasa, perusahaan mundur dengan alasan kelestarian, namun kemudian lebih mudah untuk perusahaan lain masuk karena hutan sudah dilepaskan menjadi Areal Penggunaan Lain dan juga dikeluarkan dari peta moratorium.

Lembah Sungai Grime mengalir dari Danau Sentani ke arah barat laut hingga akhirnya berujung di laut adalah sasaran ekspansi kelapa sawit yang lain. Wilayah ini dihuni oleh masyarakat asli Papua maupun warga transmigran yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani coklat. Bercocok tanam coklat sendiri bukannya tanpa masalah, namun setidaknya pertanian jenis ini sanggup menjadikan mereka sebagai petani mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelapa sawit jelas mengancam pertanian coklat serta kemandirian kaum petani ini. Bahkan kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura dilaporkan pernah berujar, "Jika sawit sudah masuk ke Papua, habis sudah kakao punya cerita".[63]

Salah satu perusahaan yang berencana untuk menancapkan kuku di Lembah Grime adalah PT Permata Nusa Mandiri. Perusahaan ini diduga merupakan anak perusahaan dari Pusaka Agro Sejahtera Group (keterangan lebih lanjut tentang perusahaan misterius ini bisa di lihat dalam pemaparan Kabupaten Maybrat). PT Permata Nusa Mandiri juga dikabarkan sudah memiliki izin lokasi di Kabupaten Sarmi, yang lokasinya tidak jauh dari Jayapura. Namun masih belum jelas apakah izin yang telah dipegang tersebut merupakan izin lokasi lintas kabupaten atau merupakan dua izin lokasi yang berbeda.

62 https://awasmifee.potager.org/?p=857

63 https://haideakiri.wordpress.com/2014/02/28/ekspansi-sawit-ancam-kelestarian-lingkungan-di-papua/ "Jika Sawit sudah masuk ke Papua, habis sudah Kakao punya cerita"

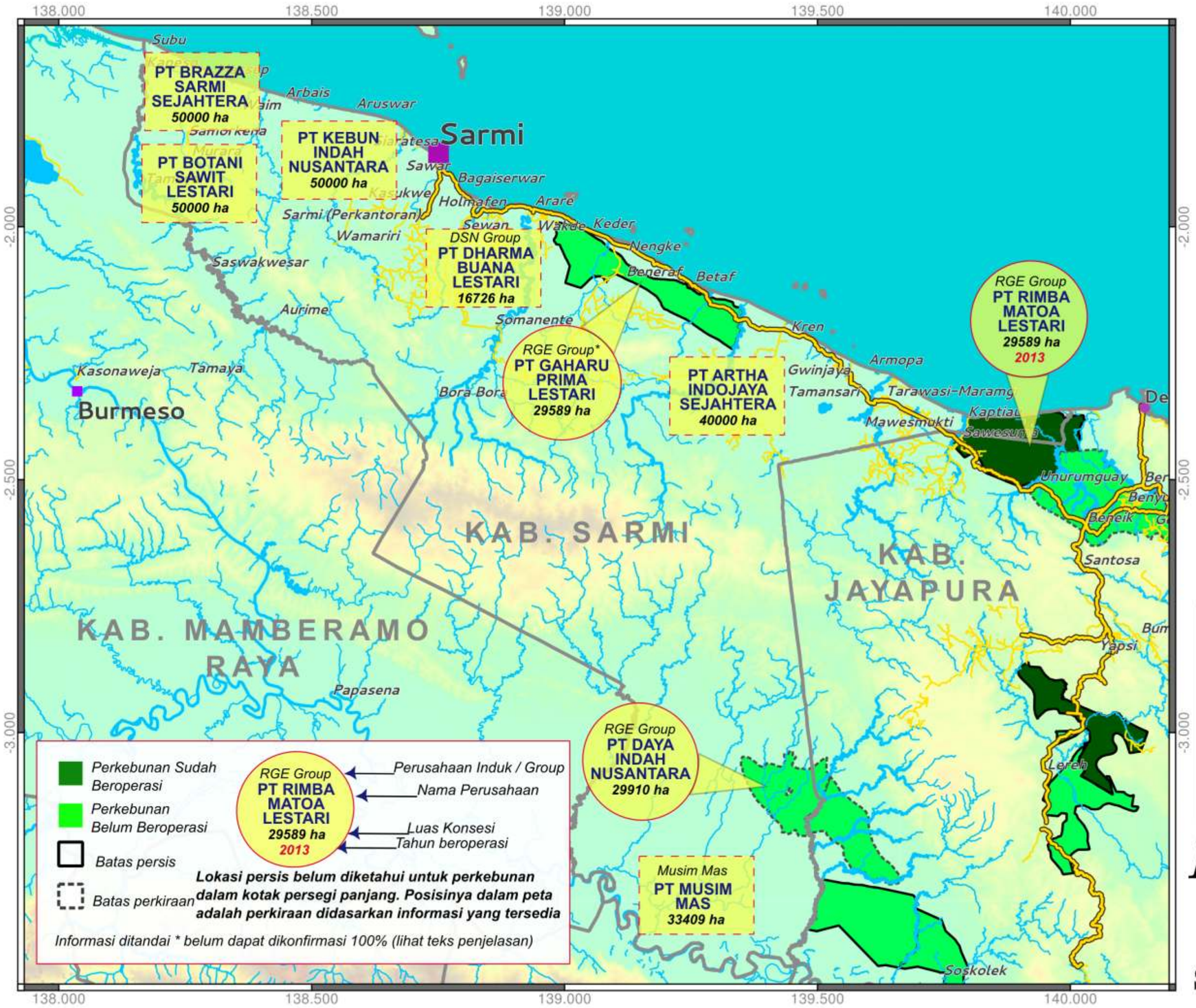

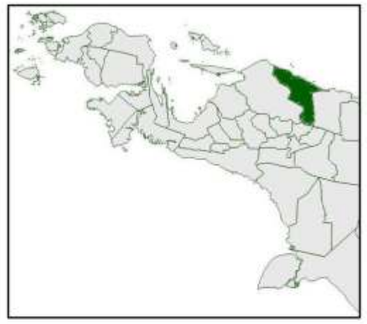

Kabupaten SARMI

Skala 1:1.100.000

S A R M I

Kelapa Sawit Tumbuh Sesak Diperbatasan Hutan Lindung

Jika menyusuri arah timur Kabupaten Jayapura, maka kita akan tiba di Kabupaten Sarmi. Di kabupaten ini, dataran luas pesisir menghampar hingga ketinggian puncak pegunungan Foja, tanah landai di sisi selatan membentang hingga keluasan sungai Mamberamo nun jauh di bawah sana. Karena banyak wilayah pegunungan dan lembah Mamberamo merupakan hutan lindung, maka sebagian besar rencana industri kelapa sawit dialokasikan sepanjang garis pesisir. Saat ini, tercatat ada delapan perusahaan yang tengah mengupayakan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Sarmi, meski belum ada yang mulai beroperasi.

Perusahan yang paling pesat prosesnya dan ditengarai akan paling segera beroperasi adalah PT Gaharu Prima Lestari. Perusahaan ini sudah mendapat pelepasan kawasan hutan seluas 31.378 hektar pada tahun 2000, dan pada Februari 2012 lalu berhasil memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari Kementerian Pertanian. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Jerat Papua di Sarmi pada 2013 menunjukkan bahwa perusahaan ini belum mulai mengoperasikan perkebunannya.[64] Terdapat beberapa indikasi bahwa PT Gaharu Prima Lestari saat ini atau dulu adalah bagian dari Raja Garuda Mas Group.

Ada perusahaan PT Dharma Buana Lestari, anak perusahaan dari Dharma Satya Nusantara (DSN) Group, yang dimiliki oleh salah satu pengusaha terkaya di Indonesia, Theodore Rachmat. PT Dharma Buana Lestari memegang izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit seluas 16.726 hektar. Masih menurut riset Jerat Papua, perusahaan ini sudah mulai aktif melakukan kegiatan sosialisasi dan mulai menjabarkan rencana-rencana perusahaan kepada masyarakat lokal di sekitar wilayah perkebunan.

Data Pemkab Sarmi menyatakan PT Permata Nusa Mandiri (PNM), yang diperkirakan bagian dari anak perusahaan Pusaka Agro Sejahtera Group, telah memiliki izin lokasi seluas 23.813 hektar di dekat wilayah perbatasan kabupaten Sarmi dan Jayapura. Masih belum jelas apakah izin ini sesungguhnya merupakan izin yang sama dengan wilayah Jayapura sebagaimana disebut di atas, atau apakah izin yang dipegang perusahaan adalah izin lintas kabupaten.

Jika ditelusuri lebih jauh ke arah Distrik Pantai Barat, terdapat tiga perusahaan yang tengah mengupayakan izin di Kabupaten Sarmi. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi PT Brazza Sarmi Sejahtera, PT Kebun Indah Nusantara dan PT Botani Sawit Lestari. Setiap perusaahaaan ini berharap untuk mendapatkan lahan hingga seluas 50.000 hektar. Meski demikian, belum ada informasi lebih lanjut tentang perusahaan-perusahaan ini.

Nun jauh di pedalaman, terdapat pula dua anak perusahaaan Musim Mas Group yang memiliki izin lokasi di Sarmi, letaknya tidak jauh dari empat anak perusahaan Musim Mas Group lainnya yang sudah mulai beroperasi di Kabupaten Jayapura, yakni: PT Daya Indah Nusantara berlokasi di samping perkebunan PT Intibenua Perkasatama dengan lahan konsesi seluas 29.910 hektar dan PT Musim Mas seluas 33.409, lokasinya juga terletak tidak jauh (meski hingga saat ini penulis belum berhasil memperoleh data soal lokasi persis dari perusahaan yang dimaksud).

Ada informasi yang belum dikonfirmasi bahwa satu perusahaan lain sudah dapat IUP di Sarmi bulan Mei 2014, bernama PT. Artha Indojaya Sejahtera, dengan luas lahan 40.000 ha.

64 http://www.jeratpapua.org/wp-content/uploads/2013/11/JERAT-Papua-Sarmi-Perijinan-Pemanfaatan-Hutan-dan-Lahan-2013-CLUA.pdf

Kabupaten WAROPEN, MAMBERAMO RAYA, KEPULAUAN YAPEN

Skala 1:1.200.000

WAROPEN, MAMBERAMO RAYA, YAPEN

Perkebunan Kelapa Sawit Ditolak Suku Kuriye

Sebagaimana dilaporkan beberapa LSM lokal di Papua, belum ada satu pun perusahaan kelapa sawit yang berhasil memperoleh lahan, apalagi aktif beroperasi di Kabupaten Waropen, meski ada begitu banyak perusahaan yang terus mengupayakan dan menyatakan minatnya berinvestasi di daerah ini. Salah satu alasan dibalik kegagalan ini adalah penolakan dari masyarakat adat di wilayah ini. Tahun 2012, penulis bertemu dengan pemimpin Suku Kuriye di Distrik Oadate, Waropen, mereka menyampaikan secara terbuka menolak perusahaan perkebunan kelapa sawit menggunakan tanah dan hutan adat mereka. Sikap ini didukung oleh Ketua DPRD Waropen, HugoTebay, STh, yang sudah mengunjungi dan membandingkan keberadaan masyarakat dan manfaat perkebunan kelapa sawit di Sumatera.[65]

Kabupaten Waropen maupun Kabupaten Mamberamo Raya memiliki area hutan teramat luas yang digolongkan sebagai Hutan Produksi Konversi (HPK), sehingga walau belum ada satu pun dari perusahaan ini diinformasikan sudah memegang izin, namun areal HPK seringkali menjadi sasaran izin baru perkebunan dan sangat mungkin dikeluarkan di masa mendatang.

Di Pulau Yapen sendiri, sebelumnya pernah dikeluarkan izin lokasi seluas 30.000 hektar kepada PT Bina Mitra Global untuk mengoperasikan perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Kosiwo. Izin lokasi ini ditolak keras oleh masyarakat setempat.[66] Perusahaan ini dipercaya tidak mampu untuk memperoleh izin lebih lanjut karena lahan yang disasar digolongkan sebagai wilayah hutan konservasi. Dengan demikian, perusahaan ini pun akhirnya tidak lagi aktif di Serui.

---

65 http://pusaka.or.id/prolegda-waropen-memasukkan-rancangan-perda-pengakuan-dan-perlindungan-hak-hak-masyarakat-adat/

66 http://z.tabloidjubi.com/index.php/2012-10-15-06-23-41/seputar-tanah-papua/17163-perusahaan-kelapa-sawit-bakal-beroperasi-di-kepulauan-yapen , http://www.aldp-papua.com/kelapa-sawit-jawaban-untuk-kesejahteraan-masyarakat-yapen/

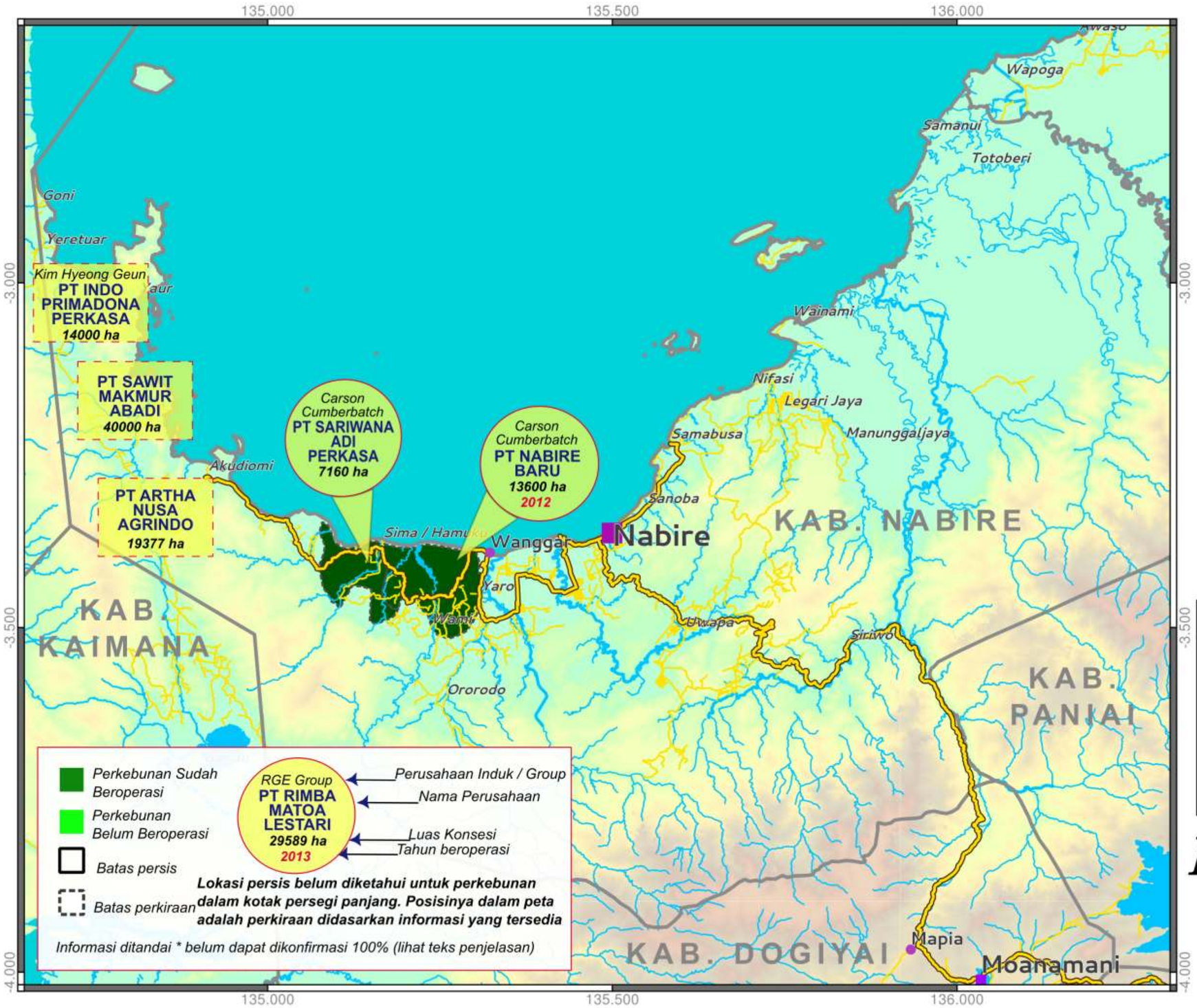
135.000
135.500
136.000
-3.000
-3.500
-4.000
Wapoga
Samanui
Totoberi
Goni
Yeretuar
Kim Hyeong Geun
PT INDO PRIMADONA PERKASA
14000 ha
PT SAWIT MAKMUR ABADI
40000 ha
PT ARTHA NUSA AGRINDO
19377 ha
Carson Cumberbatch
PT SARIWANA ADI PERKASA
7160 ha
Carson Cumberbatch
PT NABIRE BARU
13600 ha
2012
Wainami
Nifasi
Legari Jaya
Samabusa
Manunggaljaya
Akudiomi
Sanoba
Nabire
KAB. NABIRE
Sima / Hamukui
Wanggar
Yaro
Wami
Uwapa
Siriwo
KAB. KAIMANA
Ororodo
KAB. PANIAI
KAB. DOGIYAI
Mapia
Moanamani
Perkebunan Sudah Beroperasi
Perkebunan Belum Beroperasi
Batas persis
Batas perkiraan
RGE Group
PT RIMBA MATOA LESTARI
29589 ha
2013
Perusahaan Induk / Group
Nama Perusahaan
Luas Konsesi
Tahun beroperasi
Lokasi persis belum diketahui untuk perkebunan dalam kotak persegi panjang. Posisinya dalam peta adalah perkiraan didasarkan informasi yang tersedia
Informasi ditandai * belum dapat dikonfirmasi 100% (lihat teks penjelasan)
Kabupaten
NABIRE
Skala 1:800.000

N A B I R E

Kekacauan Hukum, Hutan Rusak dan Rakyat Terbelah

Kisah PT Nabire Baru adalah kisah soal kekacauan dalam proses perizinan perkebunan kelapa sawit yang bercampur baur dengan beragam kepentingan, sehingga pada akhirnya berujung pada situasi banyak pihak yang ditelantarkan, hak masyarakat adat diabaikan, para pekerja terlantar atau terintimidasi dan hutan habis digundul, tanpa ada satupun solusi nyata yang bisa ditawarkan.

Salah satu penyebab utama dari permasalahan-permasalahan ini berpangkal dari izin yang diberikan kepada PT Nabire Baru (NB) tumpang tindih dengan izin HPH milik PT Jati Dharma Indah yang masih berlaku hingga 2017. Selama bertahun-tahun, PT Jati Dharma Indah aktif melakukan pembalakan kayu di daerah ini dan bahkan sempat merencanakan menanam kelapa sawit di area tersebut.[67] Namun, perusahaan ini sudah tidak lagi aktif beroperasi sejak 2010.

Jika merujuk pada prosedur perijinan, maka izin yang dipegang oleh PT NB, jelas perlu dipertanyakan kesahihannya. PT NB nampaknya memilih untuk memotong jalur terkait pengurusan syarat-syarat penting perizinan dan tentu ada bekingan birokrasi. Misalnya, perusahaan ini mengabaikan pentingnya proses negosiasi dengan masyarakat pemilik hak ulayat dan ketidakjelasan perusahaan ini dalam proses penyusunan dan penilaian AMDAL. Pada tahun 2011, perusahaan PT. NB dan perusahaan pemilik IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) PT. Sariwarna Unggul Mandiri membabat hutan tanpa tedeng aling-aling di sekitar perkampungan Sima dan Wami di Distrik Yaur. Gelondongan-gelondongan kayu diangkut menggunakan kapal keluar daerah. Masyarakat suku Yerisiam pun tidak bisa membendung amarahnya karena mereka belum permah memberikan persetujuan atas hal ini. Kepala Suku Yerisiam, Simon Petrus Hanebora berulang kali mencoba untuk mengangkat permasalahan ini dan mengajak berbagai pihak untuk memberikan perhatiannya terhadap kasus pencurian semacam ini. Dengan tegas ia menyampaikan bahwa, *Pengabaian hak-hak masyarakat pribumi Suku Yerisiam oleh PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Unggul Mandiri, tidak sejalan dengan*

67 Diduga PT Jati Dharma Indah dulu teribat dalam usaha patungan bernama PT Harvest Raya bersama investor berasal Korea. PT Harvest Raya sempat ditolak oleh masyarakat dan tidak jadi.

amanat hukum dan melecehkan hukum nasional dan internasional yang mengatur kepada hak-hak asasi penduduk pribumi,".[68]

Kala itu, PT Nabire Baru mempekerjakan sekitar 1800 karyawan, sebagian diantaranya berasal dari luar Papua. Perusahaan ini juga telah menggundulkan ribuan hektar hutan, termasuk hutan sagu yang merupakan sumber bahan pangan pokok masyarakat setempat, serta situs yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Dua juta bibit pohon kelapa sawit sudah disediakan dan siap untuk ditanam. Pada tahun 2013, Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (BPSDALH) Provinsi Papua *mengambil tindakan, PT Nabire Baru dilarang untuk melanjutkan operasinya sebelum mengantungi AMDAL.*[69]

Saat itu karyawan perusahaan, baik masyarakat lokal maupun pendatang, terlantar tanpa pekerjaan.[70] Namun PT Nabire Baru kembali beroperasi dengan dukungan anggota Brimob yang sudah menjadi satpam perusahaan. Sudah ada daftar panjang kasus kekerasan dan intimidasi dari Brimob yang bertugas di PT Nabire Baru, termasuk penganiayaan kepada karyawan yang menuntut upah layak dan penangkapan anggota warga suku Yerisiam yang dituduh sebagai perantara OPM.[71] Siapapun yang ingin menolak perusahaan harus menghadapi intimidasi dari aparat negara.

Konflik kepentingan dan keinginan dalam masyarakat pun mencuat dan mereka terbelah. Sebagian masyarakat lokal merasa telah ditipu oleh perusahaan sehingga mereka pun dengan gencar menolak keberadaan perusahaan ini. Sebagian lainnya berpendapat bahwa karena kini hutan sudah gundul, maka artinya bekerja di perusahaan kelapa sawit adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar.

Pendapat bahwa perusahaan harus tetap beroperasi, sesungguhnya dikarenakan mereka tidak memiliki pilihan lain. Susana Inggelina Weiwai, seorang perempuan asal Kampung Yaur pernah berujar, *"Saya ini pengangguran. Masih banyak anak perempuan pengangguran. Kami punya adik-adik banyak. Jadi, kami pu bapak dong bermasalah karena kami anak-anak butuh makan. Kami punya hutan sagu dan tempat cari babi dong su tebang habis. Jadi, biar sudah perusahaan jalan saja. Biar kami kerja di sana."*[72]

PT NB adalah anak perusahaan Goodhope Company, yang dimiliki oleh sebuah perusahaan transnasional asal Sri Lanka bernama Carson Cumberbatch. Perusahaan yang berkecimpung di berbagai bidang ini, merupakan pemain skala menengah dalam industri kelapa sawit. Pada tahun 2013, perusahaan ini mengaku memiliki 63.971 hektar

68 *http://tabloidjubi.com/2013/07/30/perkebunan-kelapa-sawit-di-nabire-abaikan-hak-pribumi/*
69 https://awasmifee.potager.org/?p=908&lang=id
70 https://awasmifee.potager.org/?p=908&lang=id
71 https://awasmifee.potager.org/?p=1025&lang=id
72 http://www.mongabay.co.id/2013/05/30/sawit-masuk-nabire-dari-hutan-sagu-sampai-hutan-keramat-dibabat-bagian-2/

perkebunan yang sudah ditanami kelapa sawit. Sebagian besar lahan perkebunan ini berlokasi di Indonesia.[73] Sebenarnya masih ada tiga perusahaan di Nabire yang memiliki hubungan dengan grup usaha ini. Masyarakat di Kampung Wami melaporkan bahwa PT NB menjalin kerjasama dengan PT Sariwana Unggal Mandiri dan telah beroperasi di wilayah mereka. Sementara di Kampung Sima terdapat 8.000 hektar lahan konsesi yang dikuasai oleh PT Sariwana Adi Perkasa (SAP), yang sebelumnya dibeli dari Bukit Darah PLC pada tahun 2013. Perusahaan yang disebut terakhir ini juga memiliki kaitan dengan Carson Cumberbatch.[74]

Pada Desember 2014, Bupati Nabire, menyerahkan AMDAL PT. SAP di Kampung Sima, padahal perusahaan sudah beroperasi sebelumnya tanpa AMDAL,[75] membongkar dan menggusur hutan, menggarap lahan kelapa sawit.

Lebih jauh ke arah barat, di antara Distrik Yaur dan Distrik Teluk Umar, PT Indo Primadona Perkasa juga dikabarkan telah memiliki izin untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Sepanjang pengetahuan penulis, perusahaan ini dimiliki oleh seorang pebisnis asal Korea Selatan, Kim Hyeoung Geun. Selain menjadi makelar untuk perdagangan berbagai komoditas antara Indonesia dan Korea, Kim juga tengah menjelajahi beragam peluang bisnis baru di Papua. Surat elektronik dari seorang konsultan yang sempat terpublikasi di dunia maya, mengungkap bahwa Kim turut pula memiliki konsesi tambang batu bara di lahan yang terletak berdampingan dengan PT Indo Primadona Perkasa. Tambang ini sebelumnya memakai nama PT Indo Primadona Perkasa, namun karena nama ini dipakai untuk nama perkebunan kelapa sawit, maka perusahaan tambang itu selanjutnya memakai nama PT Inko Bersatu Internasional.[76]

Masyarakat setempat yang tinggal di sekitar lokasi perusahaan dibuat bingung oleh apa yang sesungguhnya terjadi. Berita di sebuah koran lokal, Papua Pos Nabire, pada Oktober 2013 lalu menuliskan bahwa izin yang semestinya dipegang oleh PT Indo Primadona Perkasa adalah izin perkebunan semata, namun perusahaan ini mengklaim telah pula memegang izin pemanfaatan kayu (IPK). Warga lantas menuntut klarifikasi atas rencana sesungguhnya dari pihak perusahan. Sebuah perusahaan kontraktor pada tahun 2012 sempat membersihkan 200 hektar lahan dan menanam kelapa sawit. Namun, dalam sebuah pertemuan pada Oktober 2013 yang dihadiri oleh masyarakat setempat, DPRD, dan pihak perusahaan; pihak perusahaan dinilai tetap tidak mampu menjelaskan rencana ini dengan gamblang. [77] Hendik Andoi, seorang anggota DPRD Nabire dilaporkan pernah menyatakan bahwa, *"Bagi kami di DPR tahu mana ijin kebun dan mana ijin kayu, ijin kayu itu ikutan dari ijin kebun, kalau tidak ada ijin perkebunan tidak bisa ada IPK hal ini ditegaskan Kadishut saat rapat koordinasi lalu. Jadi berarti kebun dulu baru ijin untuk kayu, tapi dalam pengerjaannya justeru kayu dulu yang diambil karena memang harus dibersihkan lahannya dulu baru bisa ditanam,"*

Ada informasi lagi yang belum dapat di konfirmasi bahwa ada dua perusahaan lain yang sudah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan di Nabire pada Juli 2014, yakni: PT. Sawit Makmur Abadi dengan luas lahan seluas 40.000 hak dan PT. Artha Nusa Agrindo, dengan lahan seluas 19.377 ha.

---

73 Carson Cumberbatch Annual Report 2012, (add link)
74 http://www.carsoncumberbatch.com/investor_information/quarterly_reports/second_quarterly_reports_2013/bukit_2nd_ qu arter_30_9_2013.pdf
75 http://pusaka.or.id/amdal-diserahkan-hutan-sudah-habis/
76 http://cluster1.cafe.daum.net/_c21_/bbs_search_read?grpid=1N4TC&fldid=mVtP&datanum=165&openArticle=true& docid =1N4TCmVtP16520130206120347
77 http://papuaposnabire.com/index.php/nabire/450-persoalan-sawit-pt-indo-primadona-perkasa-belum-tuntas

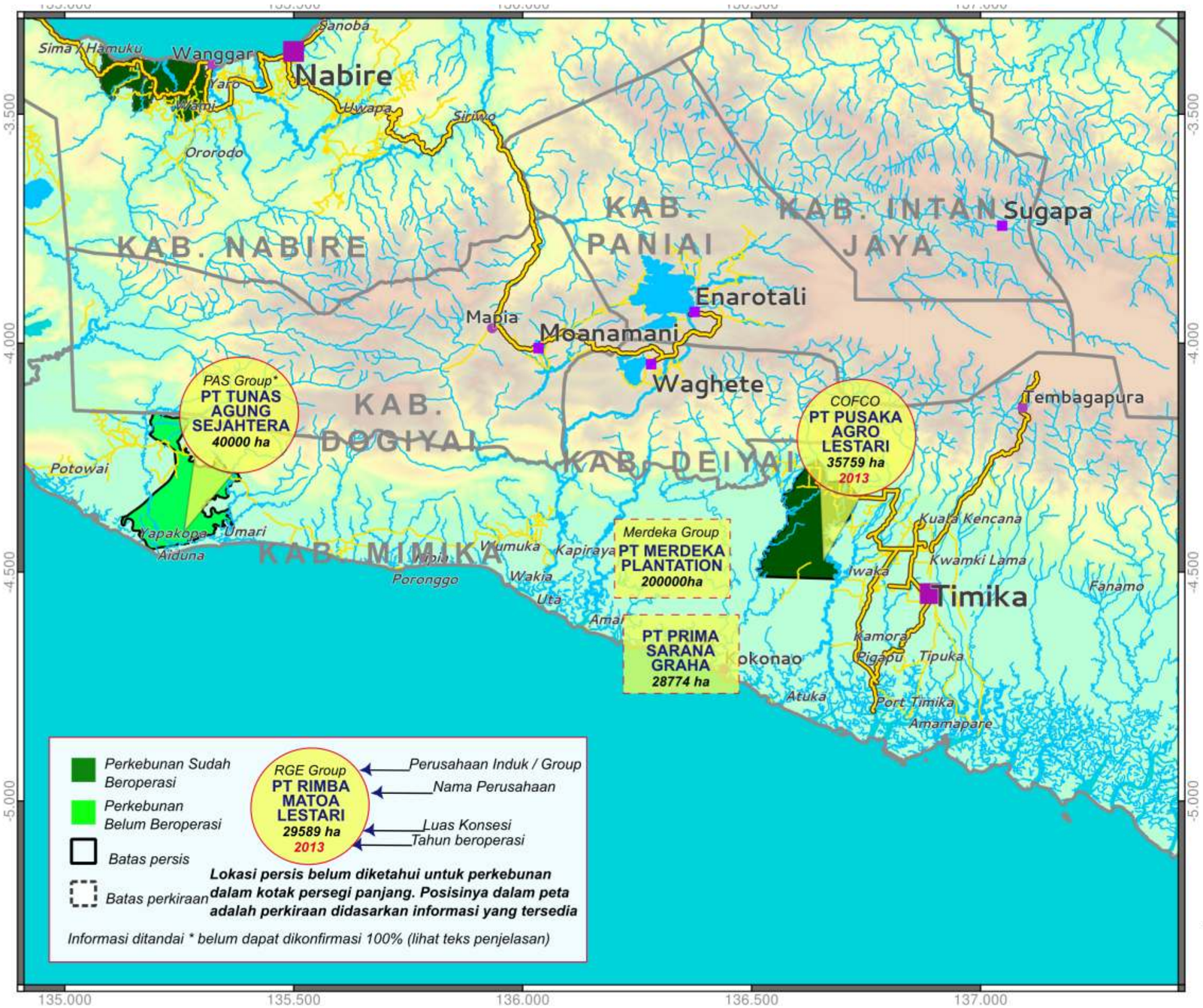

Kabupaten MIMIKA

Skala 1:1.200.000

M I M I K A

Tidak Cukup Freeport, Sawit Masuk Wilayah Suku Kamoro

Dari seluruh Tanah Papua, masyarakat adat di Mimika adalah korban yang paling lama sekaligus paling berat merasakan penderitaan akibat dampak buruk investasi skala besar. Di kabupaten inilah Freeport McMoran beroperasi sejak tahun 1960an. Selama beberapa dekade, perusahaan Amerika Serikat ini telah menghadirkan konflik dan kerusakan lingkungan tak berujung yang bersumber dari pertambangan tembaga dan emas Grasberg. Selain masalah pertambangan, saat ini setidaknya terdapat tiga perusahaan yang berencana untuk membuka perkebunan kelapa sawit di Mimika dan ada satu perusahaan lagi yang ambisius berencana untuk membuka perkebunan raksasa seluas 200.000 hektar, sebagaimana izin konsesi penebangan hutan yang sudah dikantunginya. Namun niatan ini terpaksa harus ditunda sementara waktu.

Perusahaan Merdeka Group paling ambisius merencanakan pengembangan perkebunan skala luas di Kabupaten Mimika. Merdeka Group berkantor pusat di Hong Kong namun diregistrasi di Kepulauan Caymen, mendapat konsesi penebangan kayu seluas 313.500 hektar, dengan 200.000 hektar diantaranya direncanakan untuk ditanami kelapa sawit.

Pembabatan hutan mulai dilakukan pada tahun 2010 dan berlanjut pada tahun 2011. Suku Kamoro yang berdiam di Distrik Kokonau hanya diberikan uang kompensasi sebesar Rp. 2,5 juta. Suku Kamoro yang sebagai besar pola hidup semi-nomaden cenderung pasrah dan menerima dengan tangan terbuka akan kehadiran proyek baru dan eksploitasi berjalan mulus.

Pada tahun 2012, dengan alasan situasi politik yang tidak kondusif di Papua, perusahaan ini menghentikan operasinya. Dalam laporan tahunan kepada pihak pemegang saham, perusahaan ini melaporkan bahwa, “Kami harus memperbaiki rencana produksi kami dan mengurangi jalannya operasi. Operasi komoditas hulu dari penebangan hutan telah dihentikan pada tahun 2012. Sepanjang tahun itu pula, operasi komoditas hilir dari pengolahan kayu juga telah dihentikan. Dengan demikian, tidak seperti tahun 2011 ketika kami dapat melaporkan pendapatan dari penjualan kayu; maka untuk tahun 2012, Merdeka Grup tidak mengeluarkan catatan pendapatan apapun dari bisnis ini. ... Sementara itu, untuk rekanan bisnis perkebunan,

disampaikan bahwa tidak ada penanaman baru yang dilakukan pada tahun 2012, karena aktivitas penebangan dan pembukaan hutan telah ditangguhkan. Mempertimbangkan bahwa skala ekonomi tidak dapat diperoleh dalam kondisi ini, dan mempertimbangkan bahwa pengkajian ulang atas penebangan hutan tidak bisa ditentukan dalam waktu dekat, maka pihak manajemen memutuskan untuk membubarkan tim kerja yang mengurus perkebunan di lokasi dan membatalkan aset biologis yang bernilai kurang lebih HK$ 9.579.000."[78]

Meski demikian, Merdeka Group berharap dapat kembali melanjutkan operasinya jika situasi berangsur menjadi lebih ramah. Pada tahun 2013, perusahan mencatat bahwa pihaknya telah "menjual sejumlah alat berat dan perangkat kerja yang terbengkalai demi mempertahankan sumber finansial perusahaan sebelum proyek kehutanan ini dapat diteruskan lagi".[79] Perusahaan ini tetap bertahan di wilayah Mimika, dengan kontrak dagang untuk pembelian 0,8 juta ton tailings (limbah tambang) dari tambang Freeport. Dalam sebuah laporan pada bulan Agustus 2014, Merdeka Group menjelaskan bahwa walaupun staf perusahaan sudah tidak ada di kota Timika akibat konflik antar-suku di sana, masih ada penduduk lokal yang menjadi konsultan mereka dan akan memberi nasihat tentang proses perizinan.[80] Sepertinya mereka masih berharap perkebunan ini akan jadi.

Tahun 2012, perusahaan PT Pusaka Agro Lestari (PAL) mulai membabat hutan di arah barat dekat Kota Timika. PT. PAL memiliki izin lokasi seluas 38.000 hektar, rencananya lahan seluas 30.817 hektar akan ditanami bibit kelapa sawit. PT PAL baru didirikan pada 2004, lalu dibeli oleh Noble Group, sebuah perusahaan perdagangan komoditas asal Hong Kong senilai US$ 30,9 juta pada tahun 2011.[81] Kini kepemilikan perusahaan ini sudah beralih ke tangan perusahaan Cofco dari Cina. Noble Group sendiri sebelumnya sudah pernah membeli perusahaan kelapa sawit lainnya, yaitu PT Henrison Inti Persada di Sorong.

Perusahaan PAL mengklaim bahwa pihaknya telah membayar kompensasi hak ulayat terhadap semua marga pemilik tanah di wilayah ini, meskipun tidak ada informasi lebih terperinci soal isi kesepakatan dan seberapa besar angka yang mereka bayar. Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) dari Keuskupan Timika sempat melontarkan kekhawatirannya akan dampak dari perkebunan kelapa sawit ini bagi masyarakat Suku Kamoro yang tinggal di hilir sungai. Suku Kamoro adalah masyarakat semi-nomaden yang selalu berpindah, kehidupannya sangat bergantung dan senantiasa mengikuti kondisi sungai. Mereka tinggal dan pergi kemanapun menggunakan sampan tradisional mereka dan sagu adalah makanan pokok dari suku ini.[82]

PT PAL juga pernah dilumpuhkan selama beberapa hari oleh para karyawan yang menuntut peningkatan gaji dari 75.000 Rupiah per hari menjadi100.000 Rupiah per hari.[83]

Sepanjang tahun 2014, setelah ribuan hektar hutan sudah dibabat, banyak kritik terhadap operasi PT. PAL mulai muncul, termasuk dari Uskup Timika.[84] Akhirnya Bupati Mimika Eltinus Omaleng memutuskan untuk mencabut izin PT. PAL dengan alasan untuk melindungi masyarakat suku Kamoro yang berdiam dipesisir. Tanggal

78 Merdeka Annual Report 2012 http://www.merdeka.com.hk/wp-content/upload/1364443987.pdf
79 Merdeka 2013 interim Report http://www.merdeka.com.hk/wp-content/upload/1376474707.pdf
80 http://www.merdeka.com.hk/wp-content/uploads/2013/12/GLN20140814197-Interim-Report.pdf
81 http://www.rspo.org/file/acop2013/submissions/NOBLE%20PLANTATIONS%20PTE%20LTD.pdf
82 http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/papua/papua-selatan/item/13158-skp-perkebunan-kelapa-sawit-ancam-warga-kamoro

16 Desember 2014, Bupati mendatangi lokasi perusahaan bersama Kapolres dan Komandan Kodim untuk membaca surat keputusan penghentian operasional kegiatan perkebunan.[85] Belum jelas kalau pihak perusahaan akan menggugat keputusan bupati ini ke pengadilan.

Perusahaan lainnya, PT Tunas Agung Sejahtera (TAS) kini masih berada dalam proses perizinan perkebunan untuk lahan seluas 40.000 hektar. Tanah yang sedang diincar ini terletak nun jauh di sisi barat Mimika, di antara Sungai Aindua dan Sungai Umar, tidak jauh dari perbatasan Kabupaten Mimika-Kaimana. Pada tahun 2013, proses AMDAL mulai dievaluasi dan pada awal 2014, PT TAS mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Departemen Kehutanan.

PT TAS diduga dimiliki oleh Pusaka Agro Sejahtera Group, sebuah perusahaan yang telah mendapat izin perkebunan di berbagai penjuru Tanah Papua. Meski demikian, perusahaan ini terendus beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada secuil pun profil soal perusahaan yang terpublikasi secara resmi ataupun informasi terang apapun yang bisa diakses publik. Untuk informasi lebih lanjut tentang PT Pusaka Agro Sejahtera bisa dilihat dalam penjabaran Kabupaten Maybrat yang sudah dituliskan di atas.

Pada Juni 2014 lalu, satu perusahaan bernama PT Prima Sarana Graha juga telah mengajukan permohonan izin untuk pelepasan kawasan hutan seluas 28.774 kepada Departmen Kehutanan. Belum ditemukan informasi lebih lanjut soal kepemilikan perusahaan ini ataupun lokasi persis lahan yang tengah diurus perizinannya ini.

83 http://suluhpapua.com/read/2013/10/24/pt-pal-tanam-ribuan-kelapa-sawit/
84 http://suarapapua.com/read/2014/25/2068/uskup-timika-perkebunan-kelapa-sawit-di-timika-ancaman-bagi-masyarakat-pesisir
85 http://papua.antaranews.com/berita/448472/bupati-mimika-resmi-hentikan-operasional-perkebunan-sawit-pt-pal84 http://suarapapua.com/read/2014/25/2068/uskup-timika-perkebunan-kelapa-sawit-di-timika-ancaman-bagi-masyarakat-pesisir

137.000
137.500
138.000
138.500
139.000
139.500
140.000
-5.000
-5.500
-6.000
-6.500
-7.000
Dekei
KAB. YAHUKIMO
PT DEWI GRAHA INDAH
KAB. ASMAT
Agats
Kepi
KAB. MAPPI
Mur
Bade
Salim Group*
PT PUTRA PALMA CEMERLANG
33775 ha
Perkebunan Sudah Beroperasi
Perkebunan Belum Beroperasi
Batas persis
Batas perkiraan
RGE Group
PT RIMBA MATOA LESTARI
29589 ha
2013
Perusahaan Induk / Group
Nama Perusahaan
Luas Konsesi
Tahun beroperasi
Lokasi persis belum diketahui untuk perkebunan dalam kotak persegi panjang. Posisinya dalam peta adalah perkiraan didasarkan informasi yang tersedia
Informasi ditandai * belum dapat dikonfirmasi 100% (lihat teks penjelasan)
Kabupaten ASMAT, MAPPI, YAHUKIMO
Skala 1:1.500.000

ASMAT, MAPPI, YAHUKIMO

Jejak Industri Sawit Menjangkau Pedalaman Komunitas Koroway

Perusahaan kelapa sawit juga bisa dijumpai di beberapa lokasi paling terpencil di Tanah Papua. Kampung Tokuni di Kabupaten Yahukimo, misalnya, tidak memiliki akses jalan darat yang layak. Jika tidak memakai pesawat, maka satu-satunya cara untuk tiba ke kampung ini adalah dengan menggunakan kapal yang melintasi Sungai Eilanden dari Pantai Asmat. Perjalanan menuju pedalaman ini jelas bukan perjalanan singkat dan sangat melelahkan. Pun dalam kondisi demikian, warga setempat telah melaporkan bahwa pada awal tahun 2014, sebuah perusahaan bernama PT Dewi Graha Indah telah melakukan kegiatan survei terkait perkebunan kelapa sawit di hutan sekitar kampung.

Sejauh ini, belum diketahui apakah perusahaan yang beralamat di kota Jayapura ini telah memegang izin lokasi untuk beroperasi.

Kampung Tokuni adalah tanah suku Koroway dan Kombay, suku-suku di Papua yang terkenal atas adat kebiasaan mereka membangun rumah pohon di kanopi hutan yang teramat tinggi sebagai tempat tinggal. Kala cara hidup orang Korowai kerap diulas dengan penuh minat dalam banyak majalah dan dokumenter tentang mayarakat adat yang "eksotis", namun bagi kaum birokrat di Indonesia, mereka adalah simbol suku primitif terbelakang yang dianggap perlu diselamatkan dengan pembangunan.

Mantan jenderal TNI Bambang Darmono yang ditunjuk oleh Presiden sebagai kepala Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B) pernah memberikan contoh yang teramat jelas atas sikap semacam ini. Setelah melakukan kunjungan terhadap suku Korowai, ia berujar, *"Sungguh saya sedih dan mau menangis, hampir 70 tahun negara ini ada ternyata masih ada yang hidup telanjang,"*[86]

Bagaimana masyarakat nomaden Korowai dan Kombay dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya jika perkebunan kelapa sawit merenggut keberadaan hutan-hutan mereka? Pengalaman menunjukkan, tiap kali kelapa sawit merangsek dan berkembang di Papua, hampir selalu masyarakat adat setempat mengeluhkan kehidupan mereka yang justru kian terpinggirkan dan terabaikan oleh pembangunan perkebunan-perkebunan tersebut. Bagaimana bisa suku yang memiliki ikatan begitu erat dengan hutan, dipaksakan untuk beradaptasi dan membiasakan diri menjadi buruh-buruh perkebunan? Memang sulit dibayangkan bahwa pembangunan agribisnis di wilayah

86 http://www.up4b.go.id/index.php/prioritas-p4b/10-sosial-budaya/item/108-suku-korowai-batu-bangun-lapangan-terbang-dengan-kapak-batu "Sungguh saya sedih dan mau menangis, hampir 70 tahun negara ini ada ternyata masih ada yang hidup telanjang,"

ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat asli Papua. Akankah ada yang bersedia menghargai wewenang masyarakat suku Korowai dan Kombay untuk menentukan masa depan mereka sendiri? Pun jika mereka menghendaki pembangunan, maka tidakkah mereka yang berhak menentukan pembangunan seperti apa yang mereka inginkan?

Dua kabupaten yang cukup luas, yaitu Mappi dan Asmat, terletak di sisi selatan wilayah Korowai. Lahan di Kabupaten Asmat utamanya digolongkan sebagai hutan lindung atau hutan produksi terbatas, sehingga agak sulit untuk membayangkan perusahaan kelapa sawit beroperasi di daerah ini.

Sementara di Mappi, terdapat hamparan luas hutan produksi, sehingga potensi kawasan hutan yang dapat dikonversi menjadi perkebunan sangatlah besar. Jelas tidak mengejutkan jika ada perusahaan yang berminat untuk menguasai daerah ini. Beberapa perusahaan sudah mendapatkan izin prinsip dari Kementerian Kehutanan semenjak tahun 1998, yaitu: PT. Aboge Maju Perdana, PT. Agats Sawit Lestari, PT. Asmat Sawit Lestari, PT. Atsy Sawit Makmur, berlokasi Distrik Assue dan Haju (Mappi), hingga perbatasan Kabupaten Asmat. Sekarang keempat perusahaan ini diduga tidak aktif. Pada 2007, Sinar Mas dan Chinese National Offshore Oil Company berencana untuk membuka satu juta hektar lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Rencana itu batal. Namun, jika kelak Merauke dan Boven Digoel menjadi pusat perkembangan produksi kelapa sawit, maka tidak mustahil Mappi pun turut menjadi target penting untuk industri ini.

Ternyata ada beberapa perusahaan yang berminat investasi di Mappi, namun informasi tentang rencananya kurang lengkap. Dalam tahun 2014, ada empat perusahaan yang sempat mengajukan izin pelepasan kawasan hutan. Tiga diantaranya adalah anak perusahaan Himalaya Everest Jaya Group, yang berlokasi di Distrik Bamki, Syahme dan Edera. Perusahaan tersebut, yakni: PT. Bangun Mappi Mandiri (20.000 ha), PT. Mappi Sejahtera Bersama (20.000 ha), PT. Himagro Sukses Selalu (40.000 ha). Ada indikasi bahwa karet dan palawija akan menjadi komoditas utama, bukan kelapa sawit.[87]

Perusahaan keempatnya, PT. Putera Palma Cemerlang (33.775 ha) pernah memegang izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sarmi pada tahun 2010 namun izinnya dicabut Bupati karena tumpang tindih dengan perusahaan lain. Saat ini alamat perusahaan ada di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Alamat yang sama dari Sawitindo Group, bagian dari Salim Ivomas Pratama (Indofood Agri Resources).

87 http://www.majalahlani.com/suplemen-daerah/mappi-berkarya/482-himalaya-group-segera-beroperasi

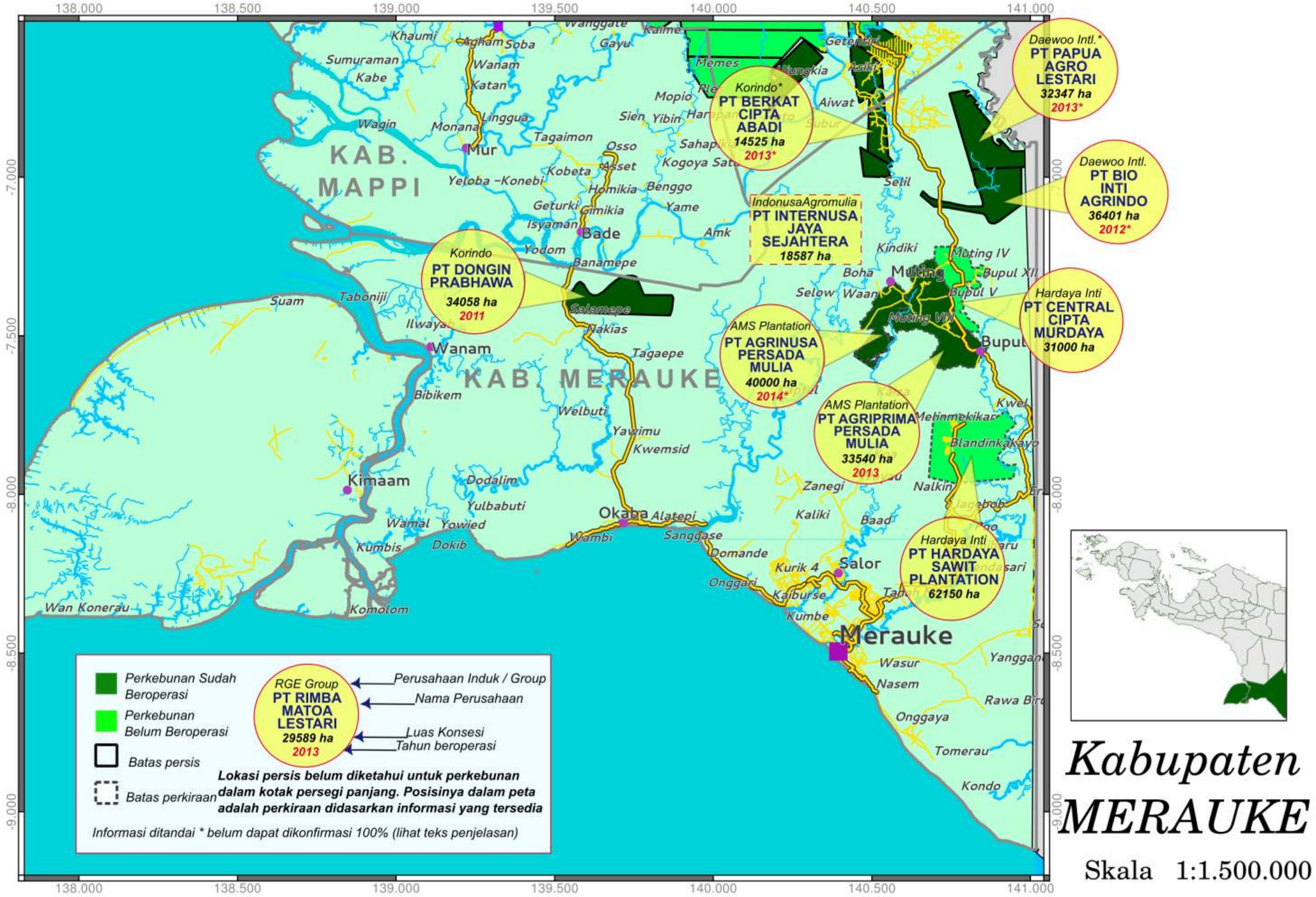
KAB. MAPPI
KAB. MERAUKE
Mur
Bade
Wanam
Kimaam
Okaba
Salor
Merauke
Muting
Bupul
Korindo*
PT BERKAT CIPTA ABADI
14525 ha
2013*
Daewoo Intl.*
PT PAPUA AGRO LESTARI
32347 ha
2013*
Daewoo Intl.
PT BIO INTI AGRINDO
36401 ha
2012*
IndonusaAgromulia
PT INTERNUSA JAYA SEJAHTERA
18587 ha
Korindo
PT DONGIN PRABHAWA
34058 ha
2011
Hardaya Inti
PT CENTRAL CIPTA MURDAYA
31000 ha
AMS Plantation
PT AGRINUSA PERSADA MULIA
40000 ha
2014*
AMS Plantation
PT AGRIPRIMA PERSADA MULIA
33540 ha
2013
Hardaya Inti
PT HARDAYA SAWIT PLANTATION
62150 ha
Perkebunan Sudah Beroperasi
Perkebunan Belum Beroperasi
Batas persis
Batas perkiraan
RGE Group
PT RIMBA MATOA LESTARI
29589 ha
2013
Perusahaan Induk / Group
Nama Perusahaan
Luas Konsesi
Tahun beroperasi
Lokasi persis belum diketahui untuk perkebunan dalam kotak persegi panjang. Posisinya dalam peta adalah perkiraan didasarkan informasi yang tersedia
Informasi ditandai * belum dapat dikonfirmasi 100% (lihat teks penjelasan)
Kabupaten MERAUKE
Skala 1:1.500.000

M E R A U K E

Mengorbankan Orang Malind untuk Pangan Dunia

Hutan bercampur savana dan rawa merupakan vegetasi khas alami yang utama di ujung selatan Papua, Merauke. Daerah ini memang tidak pernah menjadi sasaran penting industri penebangan kayu. Kini, daerah ini menjadi incaran peminat industri perkebunan. Sudah berkali-kali pemerintah merencanakan pembangunan megaproyek perkebunan atau pertanian di daerah ini dan mencanangkan tanah skala luas serta kemudahan kebijakan, tetapi proyek terlantar dan tidak jelas juntrungannya. Sinar Mas dan Chinese National Offshore Oil Company pernah mengagas rencana untuk membuka perkebunan kelapa sawit seluas satu juta hektar di Merauke dan sekitarnya. Bin Laden Group dari Arab Saudi juga pernah berencana menjadi pemegang saham utama Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) dengan melakukan investasi di atas lahan seluas 500 ribu hektar.[88]

Pada Agustus 2010, pemerintah meresmikan program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang bertujuan untuk memperkuat cadangan pangan dan bio energy nasional, memantapkan ketahanan pangan dalam memasuki pasar pangan dunia dan sebagainya. Megaproyek MIFEE diandalkan sebagai peluang ekonomi dan bermanfaat membantu krisis pangan dan energy dunia. Kebijakan MIFEE juga memayungi dan mendukung inisiatif proyek pengembangan pangan skala luas yang sudah ada di Merauke. Kenyataannya, rencana strategi pengembangan swasembada dan usaha tanaman pangan utama, seperti beras, kedelai, singkong, jagung, tebu dan sebagainya, tidak berjalan mulus. Program MIFEE justeru hanya memberikan manfaat kepada perusahaan-perusahaan perkebunan besar untuk pengembangan tanaman kelapa sawit dan tebu skala luas. Jutaan hektar tanah hutan, savana dan rawa luas milik Orang Malind menjadi sasaran proyek. Akses memanfaatkan hasil alam kian terbatas dan lapangan kerja yang dijanjikan tidak dapat mendongkrak kesejahteraan Orang Malind.

Dalam Masterplan MIFEE, kuota untuk perkebunan kelapa sawit seharusnya hanya mencapai 20% dan untuk perkebunan tebu sebesar 30 % dari keseluruhan lahan proyek ini. Ujung-ujungnya, justru kedua komoditas ini mendominasi rencana investasi di Merauke.[89] Berdasarkan dokumentasi PUSAKA (2014), diketahui ada 33

88 http://wcaroko.blogspot.com/2010/07/merauke- integrated-food-and-energy.html
89 https://awasmifee.potager.org/?p=584

perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah mengkantongi Izin Prinsip sepanjang tahun 2007 – 2014 dengan rata-rata luas lahan konsesi 30.000 hektar. Kini, terdapat 10 perusahaan kelapa sawit di Merauke yang aktif melakukan aktivitas pengukuran lahan dan penanaman.[90]

Salah satu perusahaan yang memotori ekspansi kelapa sawit di Merauke adalah Korindo Group asal Korea Selatan. Korindo telah sekian lama terlibat dalam beragam sektor ekonomi di Indonesia. Sejak tahun 1990an, perusahaan ini mengoperasikan berbagai industri di areal Kabupaten Boven Digoel yang berbatasan dengan Merauke, seperti konsesi hutan untuk penebangan kayu, pabrik kayu lapis dan perkebunan kelapa sawit. Di Merauke, perusahaan ini menaungi dua perkebunan yang kini sudah beroperasi: PT Dongin Prabhawa yang berada di sekitar Sungai Digoel di Mam dan PT Berkat Cipta Abadi di Distrik Ulilin yang terletak tidak jauh dari area perkebunan lama PT Korindo di Asiki.

Korindo ditengarai memiliki keterkaitan kuat dengan PT Bio Inti Agrindo dan PT Papua Agro Lestari. Kedua perkebunan ini dimiliki oleh perusahaan Korea lainnya, Daewoo International Corporation, merupakan bagian dari perusahaan raksasa POSCO. Sangat mungkin Korindo memanfaatkan jaringan lokal dan pengalaman bisnisnya selama bertahun-tahun untuk memudahkan Daewoo berkembang mapan di Merauke. Kerjasama ini masih bergulir hingga sekarang. Menurut laporan masyarakat lokal, kedua perusahaan milik Daewoo ini sesungguhnya memiliki manajemen yang sama dengan PT Berkat Cipta Abadi.

90 http://pusaka.or.id/mifee-dalam-pemerintahan-romanus-izin-baru-dan-ancaman-deforestasi/

Menjurus lebih jauh ke selatan, terdapat dua perkebunan kelapa sawit milik Agro Mandiri Semesta Plantations, yang juga dikenal sebagai Ganda Group. Perusahaan Ganda yang dimiliki oleh adik dari pendiri Wilmar Internasional, Martua Sitorus, diketahui memiliki kedekatan dengan Wilmar. Berbeda dengan Wilmar yang selalu berupaya agar dipandang sebagai perusahaan bertanggung jawab dalam pengurusan kontraknya dengan beberapa perusahaan konsumen minyak sawit raksasa seperti Unilever, Ganda lebih cenderung untuk tidak peduli. Kasus paling terkenal yang melibatkan kedua perusahaan ini terjadi di Provinsi Jambi, saat Wilmar diam-diam menjual anak perusahaaannya, PT Asiatic Persada, kepada AMS Plantations. Wilmar misalnya, mengelak dari komitmen yang sudah dirumuskan dalam proses mediasi konflik dengan Suku Anak Dalam yang difasilitasi oleh

91 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/11/setara-report.pdf

Bank Dunia.[91] Beberapa bulan kemudian, dengan mengerahkan aparat yang tidak segan-segan melakukan kekerasan, PT AMS Plantation menggusur seluruh Suku Anak Dalam yang tinggal di wilayah areal HGU PT Asiatic Persada.[92]

Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan yang diajukan oleh PT Agriprima Cipta Persada, anak perusahaan dari Ganda Group, ditolak di Merauke. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan ini telah membuka lahan yang sangat luas dan mulai menanam kelapa sawit. Tindakan ini jelas ilegal karena diduga bahwa sebagian dari lahan yang dibuka ini belum ada pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan.[93] Anak perusahaan AMS lainnya, PT Agrinusa Persada Mulia kini telah mengantungi persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dan dilaporkan telah mulai membuka lahan di Distrik Eligobel.

Selain itu, PT Cahaya Bone Lestasi diketahui telah melakukan aktivitas penanaman di lahan seluas 403 hektar. Meski perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Merauke, namun operasinya dijalankan oleh pihak swasta.

Dua perusahaan milik pasangan suami istri Murdaya Poo dan Siti Hartati Murdaya, Berca Group / Hardaya Inti Plantations juga telah memiliki izin lokasi di Merauke. Tetapi, selama satu tahun terakhir belum terlihat banyak perkembangan yang dilakukan oleh PT Hardaya Sawit Plantations atau PT Central Cipta Murdaya. Bisa jadi ini berhubungan dengan dipenjarakannya Siti Hartati Murdaya selama 2 tahun 8 bulan sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena terbukti menyuap Bupati Buol, Sulawesi Tengah, demi mendapatkan izin perkebunan.[94]

Saat hampir semua perusahaan telah mengantungi izin lokasi, bahkan sejak sebelum MIFEE diluncurkan, masih ada perusahaan yang baru muncul belakangan. Pada Juli 2013, PT Internusa Jaya Sejahtera mendapat izin lokasi seluas 18.587 hektar untuk perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini dilaporkan membagikan uang ke warga lokal, rata-rata 5 Juta Rupiah per orang, tindakan yang kemudian berujung konflik di antara sesama marga dan juga dengan marga lainnya.[95] Selain di Merauke, PT Internusa Jaya Sejahtera juga berminat membuka perkebunan kelapa sawit seluas 40.000 hektar di Kabupaten Sorong Selatan, sebagai bagian dari investasi di atas lahan seluas 137.000 hektar yang dilakukan oleh perusahaan induknya, Internusa Agromulia Group. Meski perusahaan ini tidak terlalu besar, namun jelas mereka memiliki rencana ekspansi besar-besaran.

Membanjirnya perkebunan kelapa sawit yang dibuka pada saat bersamaan, belum lagi rencana perluasan areal perkebunan tebu, memiliki dampak layaknya tsunami. Masyarakat Malind di Merauke yang memiliki hubungan sangat dekat dengan alam yang mereka huni, memandangnya sebagai ancaman langsung bagi kelangsungan hidup mereka. Sebagai contoh, identitas marga mereka berkaitan erat dengan satwa dan tumbuhan tertentu.[96] Hampir tidak ada masyarakat adat yang percaya bahwa perkebunan akan membawa kesejahteraan. Berita telah tersebar ke setiap penjuru, bahwa begitu perkebunan masuk kampung, maka dampak buruk yang berujung pada penderitaan, penyakit dan kematian masyarakat telah menanti. Banyak dampak

92 http://www.mongabay.co.id/2013/12/10/perusahaan-kelapa-sawit-asiatic-persada-usir-paksa-suku-anak-dalam/
93 https://awasmifee.potager.org/?p=707
94 http://nasional.kompas.com/read/2013/02/04/12134267/Hartati.Murdaya.Divonis.2.Tahun.8.Bulan.Penjara
95 http://www.jeratpapua.org/perusahan-sawit-masuk-merusak-tali-persaudaraan-orang-muting-dan-bupul/

96 http://malindanim.wordpress.com/2010/08/30/a-small-paradise-that-will-be-annihilated/
97 https://awasmifee.potager.org/?p=632
98 https://awasmifee.potager.org/?p=650

buruk yang telah dialami seperti konflik berdarah antar warga atau antar desa, meningkatnya kematian balita, tergusurnya hutan sagu dan tempat keramat, punahnya binatang buruan, tercemarnya sungai yang menjadi sumber air, janji-janji palsu perusahaan untuk membangun fasilitas publik, serta intimidasi dari aparat negara. Daftar mengerikan ini masih sangat mungkin bertambah panjang.[97]

Di banyak desa di Merauke, warga lokal telah melakukan perlawanan terhadap perusahaan dan menolak untuk jual tanahnya.[98] Namun dalam sebagian besar kasus, perusahaan pada akhirnya berhasil meyakinkan marga-marga pemilik hak ulayat untuk melepaskan tanahnya. Uang ganti rugi yang mereka terima rata-rata sebesar Rp. 300.000 per hektar. Harga ini jelas sangat murah. Dalam banyak kasus lain, tuduhan dilakukannya intimidasi atau penipuan demi mendapatkan tanda tangan juga marak terdengar. Ini terutama terjadi di wilayah perkebunan kelapa sawit yang terletak di dekat perbatasan negara, karena banyak pos-pos tentara (TNI) yang ditempatkan di titik-titik ini untuk menjaga perbatasan. Namun, mereka sekaligus menjadi alat pengamanan perusahaan yang tidak segan untuk meneror warga.

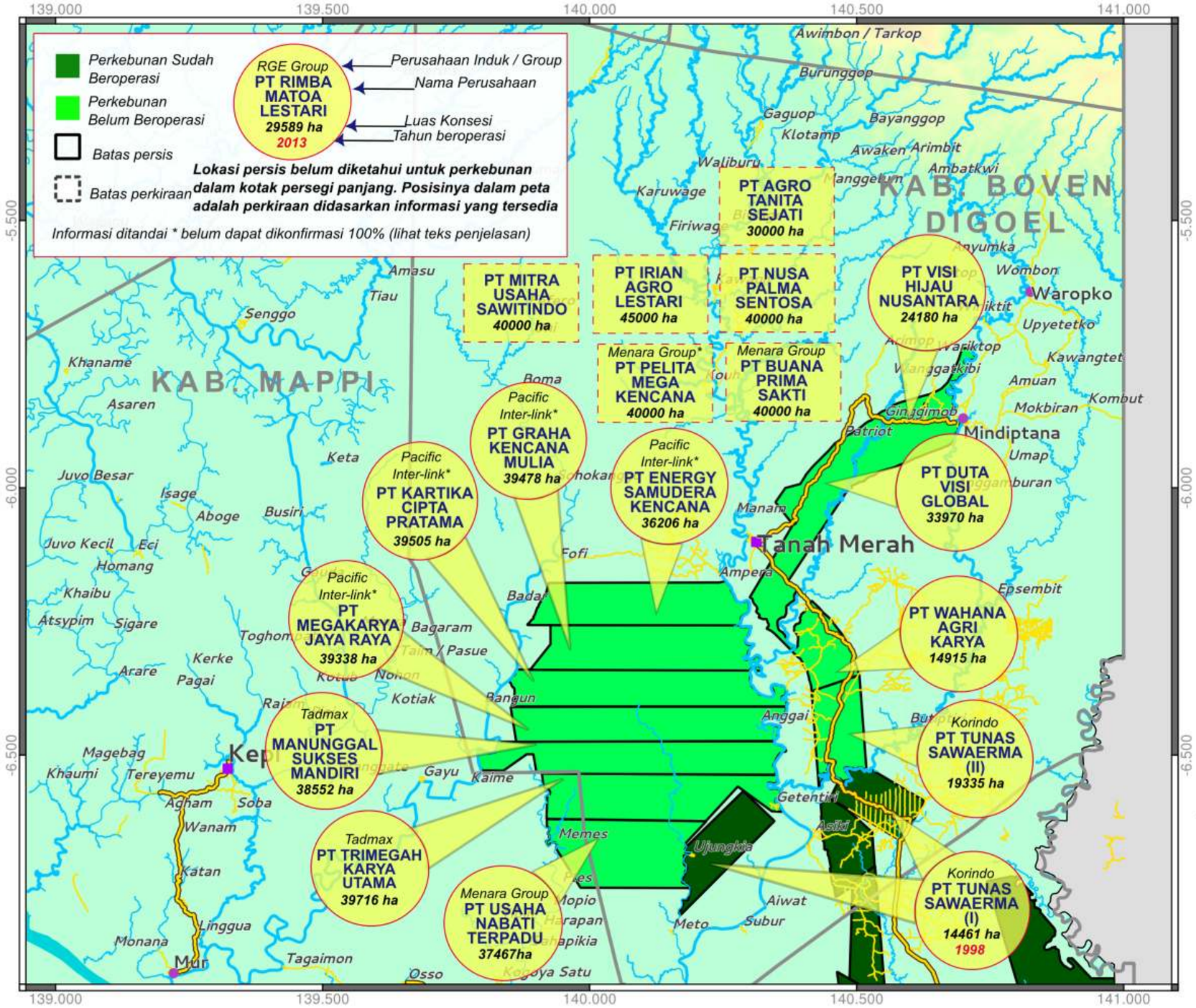

Kabupaten BOVEN DIGOEL

Skala 1:1.000.000

B O V E N D I G O E L

"Menara" Bisnis Perkebunan Kekuatan Modal Asing

Bagi banyak orang Indonesia, Boven Digoel dikenal sebagai tempat pembuangan para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda antara 1928 dan 1942. Andai saja bisa kembali ke Boven Digoel abad 21, mereka pasti akan kecewa melihat bagaimana mimpi mereka akan negara merdeka direalisasikan di garis terjauh negara Indonesia. Yang akan mereka temukan tak kurang dari tentara yang berorientasi bisnis, pemerintah daerah yang korup, dan hutan masyarakat adat dihancurkan oleh industri kayu lapis. Kini, industri kelapa sawit tengah tancap gas untuk melakukan penyerbuan besar-besaran.

Perusahaan asal Korea, Korindo, menjadi pelopor pembalakan hutan di daerah Boven Digoel. Dua konsesi hutan yang mencakup wilayah teramat luas telah berhasil mengalihkan fungsi hutan belantara menjadi pabrik kayu lapis. Selanjutnya pada 1998, Korindo mengantungi izin untuk menanam kelapa sawit di dua wilayah dekat Asiki yang serta merta ditolak mentah-mentah oleh masyarakat. Setelah upaya penolakan ini gagal, konflik sempat mencuat di antara warga. Salah satu konflik bermula ketika sebagian masyarakat yang wilayahnya terkena dampak konsesi dipindahkan ke perkampungan lain oleh Korindo. Ketika warga mulai memanen pohon sagu di sekitar pemukiman baru mereka, penduduk lama yang menempati wilayah itu menyerang mereka dengan menggunakan parang.[99]

Korindo telah sekian lama menjalin hubungan mesra dengan tentara yang menaruh minat terhadap peluang bisnis yang ditawarkan pabrik dan perkebunan. Investigasi Kontras melaporkan bahwa pada 2004, anggota militer rutin digaji oleh Korindo untuk menjadi pasukan pengamanan, sebagaimana kesepakatan yang disusun oleh para pimpinan TNI dan Korindo di Jakarta. Tentara juga mendapatkan pemasukan tambahan tidak resmi dari usaha minuman keras, serta memaksa warga untuk menyerahkan barang berharga seperti kulit buaya, tanduk rusa, atau ikan arwana.[100]

Dalam hasil investigasi tahun 2009 yang diselenggarakan oleh JPIC, ditemukan bahwa terdapat 12 pos TNI di dalam wilayah konsesi Korindo.[101] Pada 2014, dilaporkan bahwa petugas dari pos TNI AL telah

99 International Crisis Group, 2007, Indonesian Papua, a local perspective on the conflict
100 Kontras, 2004, Laporan Digoel, http://www.kontras.org/buku/Laporan_Digoel.pdf
101 http://iampapua.blogspot.com/2010/09/asikie.html
102 https://awasmifee.potager.org/?p=779

beberapa kali terlibat penganiayaan terhadap pemuda setempat di Bade yang terletak di hilir Sungai Digoel. TNI AL ditengarai hadir di daerah ini karena tergoda peluang untuk mengeruk keuntungan dari bergulirnya operasi Korindo.[102]

Saat ini, anak perusahaan Korindo yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit di Boven Digoel, PT Tunas Sawaerma, tengah mengajukan izin untuk memperluas areal perkebunannya hingga 20.000 hektar. Kuat dugaan bahwa Korindo juga tengah memanfaatkan jaringannya untuk mengupayakan masuknya tiga perusahaan lain yang hendak mengembangkan rantai perkebunan sepanjang 100 km dengan lebar 10 km. Wilayah yang disasar kurang lebih sepanjang jalan Trans-Papua; dimulai dari Asiki, melewati Tanah Merah hingga mencapai wilayah Mindiptana. Perusahaan-perusahaan itu adalah PT Wahana Agri Karya, PT Duta Visi Global, dan PT Visi Hijau Nusantara, namun informasi terkait kepemilikannya masih dirahasiakan. Alamat resmi yang terdaftar untuk ketiga perusahaan ini adalah sebuah firma hukum di Jakarta (Supramono, Vyori, Santoso). Saat dikunjungi, staf di kantor tersebut menolak memberikan informasi apapun terkait perusahaan kelapa sawit.

Ketika pengaruh TNI di Boven Digoel sedemikian kuatnya, pemerintahan daerah justru disibukkan dengan begitu banyak kekacauan akibat maraknya korupsi. Bupati Yusak Yaluwo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ketika ia memenangkan Pilkada tahun 2010 dan telah divonis lima tahun penjara. Anehnya, ia masih menjalankan tugas sebagai bupati, bahkan masih menandatangani surat keputusan, dari balik jeruji besi di penjara Sukamiskin Bandung.[103] Aktivis anti-korupsi setempat menuduh politisi lain di Boven Digoel, seperti anggota DPR, turut mendukung kekacauan ini karena mereka jelas-jelas memanfaatkan situasi ini demi keuntungan mereka sendiri.[104]

Dalam konteks ini, jelas bahwa salah satu bentuk perampasan tanah terbesar di Tanah Papua memang dibiarkan terjadi dengan begitu mulus. Kejahatan ini ditutup rapat-rapat dan tanpa menemui tantangan berarti.

Pengembang proyek perkebunan yang cukup misterius beroperasi didaerah Boven Digoel adalah Menara Group[105] yang dipimpin oleh pengusaha Indonesia bernama Chairul Anhar. Mantan Kapolri sekaligus Duta Besar, D'ai Bachtiar, tercantum sebagai salah satu anggota dewan eksekutif perusahaan. Perusahaan ini telah mendapat izin perkebunan kelapa sawit seluas 400,000 hektar di atas lahan milik

103 http://www.jurnalinfo.com/berita.html?id=Meski_Dipenjara,_Bupati_Digul_Tetap_Jalankan_Pemerintahan

104 http://forpabd.wordpress.com/2014/05/06/siaran-pers-no-04v2014-mendukung-langkah-pemulihan-kondisi-pemerintahan-kabupaten-boven-digoel-oleh-gubernur-papua/
105 https://awasmifee.potager.org/?p=829
106 https://awasmifee.potager.org/?p=338
107 https://awasmifee.potager.org/?p=829

suku Auyu yang sebagian besar masih diselimuti hutan belantara primer.[106]

Menara Group memiliki jaringan luas di Malaysia telah menjual beberapa anak perusahaannya kepada perusahaan-perusahaan asal Malaysia. Dua anak perusahaannya, yaitu PT Manunggal Sukses Mandiri dan PT Trimegah Karya Utama, dijual kepada perusahaan Tadmax, yang sejak dahulu aktif berkecimpung dalam industri kayu dan pembalakan hutan di Sarawak. Dokumen yang dipublikasikan oleh Tadmax mengindikasikan bahwa perusahaan ini utamanya lebih berminat kepada industri kayu dan tidak terlalu menaruh perhatian terhadap kelapa sawit. Kalkulasi yang dikeluarkan oleh Tadmax menunjukkan bahwa 75% kekayaan perusahaan bersumber dari industri kayu.[107]

Meskipun belum dapat dikonfirmasi, namun ada indikasi bahwa empat anak perusahaan lainnya, dengan lahan seluas 160.000 hektar, telah dijual kepada Pacific Inter-Link. Keempat perusahaan yang dimaksud adalah PT Energy Samudera Kencana, PT Graha Kencana Mulia, PT Kartika Cipta Pratama, dan PT Megakarya Jaya Raya. Perusahaan Pacific Inter-Link berkantor pusat di Malaysia dan dimiliki oleh konglomerat raksasa asal Yaman, Hayal Saeed Anam Group, yang juga berkecimpung dalam perdagangan minyak kelapa sawit dan produk-produk terkait lainnya.

Tadmax dan Pacific Inter-link kini telah menyatukan kerajaan bisnisnya dengan Shin Yang, sebuah perusahaan kayu asal Malaysia, serta Al Salam Bank Bahrain dan Yakima Dijaya Sdn Bhd. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengupayakan terbangunnya satu kompleks industri kayu yang lebih terintegrasi demi meraup keuntungan besar-besaran dari bisnis pembalakan kayu di wilayah ini. Belum ada kabar soal dimulainya operasi terkait megaproyek tersebut, namun perusahaan-perusahaan ini nampaknya telah mengantungi izin yang dibutuhkan untuk menanam kelapa sawit, termasuk izin pelepasan kawasan hutan dari Departemen Kehutanan. Menara Group secara resmi telah melakukan perjalanan ke empat desa di Distrik Jair dan Mandobo dan memberikan uang sebesar Rp 11,75 Miliar kepada para penduduk, padahal mereka tidak sepenuhnya paham apa yang terjadi. Tidak diragukan lagi, perusahaan-perusahaan ini akan mengklaim bahwa mereka telah bernegosiasi dengan masyarakat setempat dan telah memberikan uang kompensasi atas tanah tersebut, padahal sesungguhnya mereka merampas tanah-tanah itu dengan semena-mena.[108]

Selain enam perusahaan yang telah dijual oleh Menara Group, masih ada empat anak perusahaan lain yang sejatinya masih bagian dari Menara Group. Namun, belum ada informasi lebih lanjut apakah perusahan-perusahaan ini telah dijual. PT. Usaha Nabati Terpadu juga telah mengantungi prinsip pelepasan kawasan hutan. Sementara tiga perusahaan lain yang hingga kini lokasinya belum diketahui, yaitu PT Buana Prima Sakti, PT Pelita Mega Kencana dan satu perusahaan lagi yang namanya belum diketahui, perusahaan tersebut belum mengantungi izin yang dibutuhkan.

Setidaknya masih ada empat perusahaan perkebunan yang dicurigasi masih aktif beroperasi di Boven Digoel, yaitu PT Agro Tanita Sejati seluas 30.000 hektar, PT Irian Agro Lestari seluas 45.000 hektar, PT Nusa Palma Sentosa seluas 40.000 hektar, dan PT Mitra Usaha Sawitindo seluas 40.000 hektar. Terakhir kali terdengar kabar terkait empat perusahaan ini adalah pada tahun 2011.[109]

108 https://awasmifee.potager.org/?p=338

109 http://regional.kompas.com/read/2011/09/22/02551368/Lima.Investor.Siap.Buka.Kebun.Sawit.di.Boven.Digoel

REKOMENDASI

- Pemerintah pusat dan daerah harus mengadopsi undang-undang dan prosedur untuk melindungi, menghormati dan menjamin hak-hak masyarakat dalam memberikan dan atau tidak memberikan persetujuan secara bebas tanpa intimidasi, didahulukan dan diinformasikan atas seluruh usulan dan aktivitas pemanfaatan lahan dan tanah adat masyarakat, sebagaimana prinsip-prinsip *free, prior, informed consent*.
- Pemerintah pusat mengembangkan dan memastikan adanya sistem pengelolaan perizinan yang transparan dan fasilitas media elektronik (website) di daerah dan di pusat untuk menginformasikan berbagai dokumen dan perijinan usaha perolehan tanah, pengelolaan lahan dan perkebunan, yang murah dan mudah di akses oleh publik. Serta memberikan sangsi tegas atas kesengajaan dan kelalaian kepada pengelola yang tidak melaporkan perijinan dan dokumen dimaksud.
- Pemerintah segera melakukan peninjauan kembali atas berbagai izin dan aktifitas perusahaan perkebunan skala besar yang dilakukan tanpa persetujuan masyarakat, melakukan kajian penilaian atas kinerja perusahaan dan memberikan sangsi yang adil atas pelanggaran hak-hak masyarakat dan lingkungan, serta pembatasan penguasaan lahan hingga penutupan aktifitas perusahaan.
- Pemerintah harus mengkaji ulang pola pembangunan di Tanah Papua dan mengembangkan pola pembangunan berdasarkan hak dan kebutuhan masyarakat asli Papua sendiri. Pembangunan perkebunan besar berskala luas di Tanah Papua yang dipaksakan dari pusat mungkin meningkatkan ekonomi namun juga sangat berpotensi meningkatkan ketidakadilan dan memarjinalisasikan masyarakat asli Papua sehingga konflik lebih luas di Tanah Papua tidak pernah selesai. Biarkan orang Papua, khususnya masyarakat asli di pedesaan menentukan pembangunan seperti apa diinginkan. Pemerintah harus cukup rendah hati dan terbuka untuk dengarkan suara orang Papua saja.
- Pemerintah segera menyelesaikan konflik dan menyediakan akses yang efektif dalam memperoleh keadilan atas berbagai pelanggaran hak-hak masyarakat adat setempat, pemberian rekognisi, ganti rugi hingga pemulihan hak-hak masyarakat.
- Pemerintah Indonesia harus sungguh-sungguh mengambil tindakan untuk membatasi pengaruh industri kelapa sawit dan penghancuran hutan di Papua. Hutan Papua bukan komoditas yang bisa di kapling dan dibabat seenaknya. Hutan Papua adalah ekosystem yang unik. Keanekaragaman hayati di hutan Papua sangat istimewa karena lokasi geografis yang dalam sejarahnya tidak pernah ada jembatan darat dengan benua Asia.

REKOMENDASI

- Menghentikan pendekatan keamanan dan menarik aparat keamanan TNI dan Polri pada lokasi-lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pemerintah dan perusahaan bekerjasama dengan kelembagaan adat setempat untuk melakukan pengawasan, mengelola keamanan dan penyelesaian konflik berbasiskan ketentuan adat setempat.
- Perusahaan harus secara serius menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat, melakukan konsultasi yang tulus dan memberikan informasi proyek secara memadai, sebelum masyarakat memutuskan menyetujui rencana perusahaan, serta mengamankan sumber-sumber ekonomi, sumber pangan maupun mata pencaharian masyarakat.
- Masyarakat diberikan kebebasan berkonsultasi dan memperoleh pendamping independen untuk memahami kebijakan, kinerja perusahaan, berbagai perjanjian dari aspek legal dan teknis operasional perusahaan. Selain itu, pendamping dapat berperan membantu melakukan pembelaan dan meminimalkan tekanan pihak yang tidak bertanggung jawab.
- Perlu mengembangkan mekanisme kontrak penggunaan tanah dan pedoman tentang penilaian ganti kerugian terhadap tanah masyarakat untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit berdasarkan konsensus bersama, niai sosial budaya dan ekonomi, sehingga masyarakat mendapatkan rekognisi dang anti rugi yang relative adil atas penggunaan tanah masyarakat adat setempat.

Tabel Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Tanah Papua

Nama Perusahaan	Lokasi	Luas (Ha)	Kepemilikan	Tahap beroperasi	Tahun Mulai Menanam	Izin lokasi	Pelepasan Kawasan Hutan	IUP
PT Pusaka Agro Lestari	Mimika	35759	Noble Group / COFCO	Operasi dihentikan bupati Mimika	2012	SK Bupati Mimika 36/2007	SK.611/MENHUT-II/2009	SK Gubernur Papua 143/2008
PT Tunas Agung Sejahtera	Mimika	40000	Pusaka Agro Sejahtera	Persetujuan Prinsip melepaskan kawasan hutan		SK Bupati Mimika 169/2013	S.164/MENHUT-II/2014 (Persetujuan Prinsip)	
PT Merdeka Plantations	Mimika	200000	Merdeka Group	Tidak aktif setelah mengalami masalah namun masih tunggu situasi lebih kondusif				
PT Prima Sarana Graha	Mimika	28774		Pemohonan pelepasan Kawasan Hutan				
PT Nabire Baru	Nabire	13600	Carson Cumberbatch	Sudah Beroperasi	2012		Tidak perlu karena APL	
PT Sariwana Adi Perkasa Irian Jaya	Nabire	7160	Carson Cumberbatch	Sudah dapat IUP			Tidak perlu karena APL	
PT Indo Primadona Perkasa	Nabire	14000	Kim Hyeong Geun	Belum Jelas				
PT Sawit Makmur Abadi	Nabire	40000		Sudah Dapat IUP-P (2014)				
PT Artha Nusa Agrindo	Nabire	19377		Sudah Dapat IUP-P (2014)				
PT Dharma Buana Lestari	Sarmi	16726	Dharma Satya Nusantara	Sudah sosialisasi Lapangan (2013)		Sudah ada		
PT Gaharu Prima Lestari	Sarmi	31738	Raja Garuda Mas*	Sudah dapat IUP			184/Kpts-2/2000	90/KTS/HK.3150/DJ.BUN/II/2012
PT Musim Mas	Sarmi Distrik Pantai Timur Barat	33409	Musim Mas	Belum dapat izin pelepasan kawasan hutan		SK Bupati Sarmi 11/2012		
PT Brazza Sarmi Sejahtera	Sarmi Distrik Pantai Barat	50000		Belum Jelas				
PT Kebun Indah Nusantara	Sarmi Distrik Pantai Barat	50000		Belum Jelas				
PT Botani Sawit Lestari	Sarmi Distrik Pantai Barat	50000		Belum Jelas				
PT Daya Indah Nusantara	Sarmi Distrik Pantai Timur Barat	29910	Musim Mas	Belum dapat izin pelepasan kawasan hutan		SK Bupati Sarmi 12/2013		
PT Artha Indojaya Sejahtera	Sarmi	40000		Sudah dapat IUP-P (2014)				
PT Sumber Indah Perkasa	Kab. Jayapura	20143	Sinar Mas (Golden Agri Resources)	Sinar Mas tidak akan melanjut dengan rencana perkebunan			SK.394/MENHUT-II/2009	
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	Kab. Jayapura Distrik Kaure	20535	Sinar Mas (Golden Agri Resources)	Sudah Beroperasi	1994			
PT Permata Nusa Mandiri	Kab. Jayapura Distrik Unurum Guay, Namblong, Nimboran, Nimbokrang, Kemtuk, Kemtuk Gresi	32000	Pusaka Agro Sejahtera*	Sudah KA-ANDAL?		SK Bupati Jayapura 213/2011		
PT Siringo-ringo	Kab. Jayapura Distrik Kaureh dan Airu	29278	Musim Mas	Tahap lanjut perizinan, sudah pelepasan kawasan hutan		SK Bupati Jayapura 117/2011 (direvisi SK 250/2013)	SK. 21/MENHUT-II/2012	05/94/IUP/PMDN/2013
PT Wira Antara	Kab. Jayapura	31561	Musim Mas	Pemohonan pelepasan Kawasan Hutan ditolak			ditolak	

Tabel Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Tanah Papua

Nama Perusahaan	Lokasi	Luas (Ha)	Kepemilikan	Tahap beroperasi	Tahun Mulai Menanam	Izin lokasi	Pelepasan Kawasan Hutan	IUP
PT Intibenua Perkasatama	Kab. Jayapura Distrik Kaure	25773	Musim Mas	Belum ada pelepasan kawasan hutan		SK Bupati Jayapura 118/2011		
PT Rimba Matoa Lestari	Kab. Jayapura	29589	Agrindo Group (Raja Garuda Mas)	Sudah Beroperasi	2013		184/Kpts-2/2000	
PT Purni Jaya	Kab. Jayapura	16000	PT Purni Jaya	Belum Jelas				
PT Megasurya Mas	Kab. Jayapura	13390	Musim Mas	Tahap lanjut perizinan, sudah pelepasan kawasan hutan		SK Bupati Jayapura 119/2011	SK.111/MENHUT-II/2012	04/94/IUP/PMDN/2013
PT Paloway Abadi	Keerom		PT Paloway Abadi	Belum ada informasi				
PTPN 2	Keerom	17974	BUMN	Sudah Beroperasi	1982			SK Menteri Kehutanan 107/Kpts-II/1999
PT Bumi Irian Perkasa	Keerom	1068	PT Bumi Irian Perkasa	Sudah Beroperasi	?			
PT Bio Budidaya Nabati	Keerom Distrk Senggi	7400		Belum Jelas				
PT Semarak Agro Lestari	Keerom Distrk Senggi		Patria Group	Belum Jelas				
PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industries	Keerom Distrik Arso Timur	4885	PT Victory	Sudah sosialisasi			Tidak perlu karena APL	
PT Tandan Sawita Papua	Keerom Distrik Arso Timur	18337	BW Plantations (Rajawali)	Sudah Beroperasi	2010		Tidak perlu karena APL	
PT Berkat Cipta Abadi	Merauke Distrik Ulilin	14525	Korindo	Sudah Beroperasi	2013	SK Bupati Merauke 13/2007	SK 328/MENHUT-II/2011	
PT Bio Inti Agrindo	Merauke Distrik Ulilin	36401	Daewoo International	Sudah Beroperasi	2012	SK Bupati Merauke 9/2007	SK 572/MENHUT-II/2009	
PT Dongin Prabhawa	Merauke Distrik Ngguti	34058	Korindo	Sudah Beroperasi	2011	SK Bupati Merauke 12/2007	SK 750/MENHUT-II/2009	
PT Papua Agro Lestari	Merauke Distrik Ulilin	32347	Daewoo International	Sudah Beroperasi	2013	SK Bupati Merauke 16/2007	SK 552/MENHUT-II/2012	
PT Hardaya Sawit Papua	Merauke Distrik Jagebob	62150	Hardaya Inti Plantations	Belum Beroperasi		SK Bupati Merauke 2/2010 (diperpanjang SK 161/2010, dirubah SK 322/2011	Sebagian sudah APL	
PT Agriprima Cipta Persada	Merauke Distrik Muting	33540	AMS Plantations / Ganda Group	Sudah Beroperasi	2013	SK Bupati Merauke 42/2010	Sudah ditolak satu kali, sebagian APL	
PT Agrinusa Persada Mulia	Merauke Distrik Muting	40000	AMS Plantations / Ganda Group	Sudah Beroperasi?	2014	SK Bupati Merauke 04/2010	S.132/Menhut-II/2014 (persetujuan prinsip)	
PT Cahaya Bone Lestari	Merauke Distrik Muting	403	Pemkab Merauke	Sudah Beroperasi	2013			
PT Central Cipta Murdaya	Merauke Distrik Ulilin, Muting, Obelisk	31000	Berca Group	Belum Jelas				
PT Internusa Jaya Sejahtera	Merauke	18587	Indonusa Agromulia Group	Izin Lokasi, Konsultasi AMDAL		SK Bupati Merauke 339/2013		
PT Usaha Nabati Terpadu	Boven Digoel	37467	Menara Group	Sudah pelepasan kawasan hutan		SK Bupati Boven Digoel 113/2007	SK.120/MENHUT-II/2013	

Tabel Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Tanah Papua

Nama Perusahaan	Lokasi	Luas (Ha)	Kepemilikan	Tahap beroperasi	Tahun Mulai Menanam	Izin lokasi	Pelepasan Kawasan Hutan	IUP
PT Megakarya Jaya Raya	Boven digoel	39338	Menara Group / Pacific Interlink	Sudah pelepasan kawasan hutan		SK Bupati Boven Digoel 106/2007	SK.127/MENHUT-II/2012	
PT Energi Samudera Kencana	Boven Digoel	36206	Menara Group / Pacific Interlink	Sudah pelepasan kawasan hutan		SK Bupati Boven Digoel 110/2007	SK .217/MENHUT-II/2012	
PT Graha Kencana Mulia	Boven Digoel	39478	Menara Group / Pacific Interlink	Sudah pelepasan kawasan hutan		SK Bupati Boven Digoel 107/2007	SK.218/MENHUT-II/2012	
PT Kartika Cipta Pratama	Boven Digoel	39505	Menara Group / Pacific Interlink	Sudah pelepasan kawasan hutan		SK Bupati Boven Digoel 109/2007	SK.126/MENHUT-II/2012	
PT Buana Prima Sakti	Boven Digoel	40000	Menara Group	Belum Jelas		SK Bupati Boven Digoel 111/2007		
PT Pelita Mega Kencana	Boven Digoel	40000	Menara Group	Belum Jelas				
PT Visi Hijau Indonesia	Boven Digoel	24180	?	Persetujuan Prinsip melepaskan kawasan hutan			S.64/MENHUT-II/2014 (Persetujuan Prinsip)	
PT Wahana Agri Karya	Boven Digoel	14915	?	Persetujuan Prinsip melepaskan kawasan hutan			S.66/MENHUT-II/2014 (Persetujuan Prinsip)	
PT Duta Visi Global	Boven Digoel	33970	?	Persetujuan Prinsip melepaskan kawasan hutan			S.62/MENHUT-II/2014 (Persetujuan Prinsip)	
PT Trimegah Karya Utama	Boven Digoel	39716	Tadmax Sdn Bhd	Sudah pelepasan kawasan hutan		SK Bupati Boven Digoel 108/2007	SK.703/MENHUT-II/2011	(tanggal 08/02/11)
PT Manunggal Sukses Mandiri	Boven Digoel	38552	Tadmax Sdn Bhd	Sudah pelepasan kawasan hutan		(tanggal 8/12/07)	SK.702/MENHUT-II/2011	(tanggal 08/02/11)
PT Tunas Sawaerma (lama)	Boven Digoel	14461	Korindo	Sudah Beroperasi	1998		171/Kpts-II/1998	
PT Tunas Sawaerma (baru)	Boven Digoel	19335	Korindo	Persetujuan Prinsip melepaskan kawasan hutan			S.63/MENHUT-II/2014 (Persetujuan Prinsip)	
PT Mitra Usaha Sawitindo	Boven Digoel	40000	?	Belum Jelas				
PT Agro Tanita Sejati	Boven Digoel	30000	?	Belum Jelas				
PT Irian Agro Lestari	Boven Digoel	45000	?	Belum Jelas				
PT Nusa Palma Sentosa	Boven Digoel	40000	?	Belum Jelas				
PT Bangun Mappi Mandiri	Mappi	20000	Himalaya Everest Jaya	Pemohonan pelepasan Kawasan Hutan				
PT Mappi Sejahtera Bersama	Mappi	20000	Himalaya Everest Jaya	Pemohonan pelepasan Kawasan Hutan				
PT Himagro Sukses Selalu	Mappi	40000	Himalaya Everest Jaya	Pemohonan pelepasan Kawasan Hutan				
PT Putra Palma Cemerlang	Mappi	33775	Salim Group / Indofood Agri*	Pemohonan pelepasan Kawasan Hutan				
PT Dewi Graha Indah	Yahukimo			Belum Jelas				
PT Henrison Inti Persada	Sorong (Distrik Klamono)	32546	Noble Group / COFCO	Sudah Beroperasi	2006		SK.409/MENHUT-II/2006	
PT Inti Kebun Sejahtera	Sorong (Distrik Seget, Salawat)	23205	Kayu Lapis Indonesia Group	Sudah Beroperasi	2008		SK.516/MENHUT-II/2012	
PT Papua Barat Inti Kebun Sawit	Sorong (Distrik Seget)	13351	Kayu Lapis Indonesia Group	Persetujuan Prinsip melepaskan kawasan hutan			SK .582/MENHUT-II/2011 (persetujuan Prinsip)	
PT Inti Kebun Lestari	Sorong (Distrik Seget)	14377	Kayu Lapis Indonesia Group	Sudah pelepasan kawasan hutan			SK.262/MENHUT-II/2012	

Tabel Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Tanah Papua

Nama Perusahaan	Lokasi	Luas (Ha)	Kepemilikan	Tahap beroperasi	Tahun Mulai Menanam	Izin lokasi	Pelepasan Kawasan Hutan	IUP
PT Inti Kebun Makmur	Sorong (Distrik Seget)	20000	Kayu Lapis Indonesia Group	Belum Jelas				
PT Papua Lestari Abadi	Sorong (Distrik Segun)	15631	Mega Masindo Group	Sudah Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan				
PT Sorong Agro Sawitindo	Sorong (Distrik Klamono, Beraur, Segun)	18070	Mega Masindo Group	Sudah Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan			S.122/MENHUT-II/2014 (Persetujuan Prinsip)	
PT Mega Mustika Plantation	Kota Sorong	9835	?	Belum Jelas				
PT Cipta Papua Plantation	Kota Sorong	15971	?	Belum Jelas				
PT Semesta Bintang Sentosa	Sorong		?	Belum Jelas				
PT Permata Putera Mandiri	Sorong Selatan	34147	Austindo Nusantara Jaya	Sudah Beroperasi	2014	SK Bupati Sorong Selatan 83/2010	SK.731/MENHUT-II/2011	SK Gubernur Papua Barat 132/2010 dan 95/2010
PT Putera Manunggal Perkasa	Sorong Selatan / Maybrat	23424	Austindo Nusantara Jaya	Sudah Beroperasi	2014	SK Gubernur Papua Barat 522/30/II/2011	SK.41/MENHUT-II/2012	SK Gubernur Papua Barat 522/90/II/2011
PT Varia Mitra Andalan	Sorong Selatan (Distrik Moswaren dan Wayer)	20325	BW Plantations (Rajawali)	Sudah Beroperasi	2014	SK Bupati Sorsel 9/2007	SK .462/MENHUT-II/2013	
PT Julong Agro Plantation	Sorong Selatan (Distrik Saifi dan Seremuk)		Tianjin Julong Group	Belum Jelas				
PT Anugerah Sakti Internusa	Sorong Selatan	37000	Indonusa Agromulia Group	Sudah mohon pelepasan kawasan hutan				
PT Internusa Jaya Sejahtera	Sorong Selatan	40000	Indonusa Agromulia Group	Sudah mohon pelepasan kawasan hutan				
PT Dinamika Agro Lestari	Sorong Selatan	35000	Indonusa Agromulia Group	Sudah mohon pelepasan kawasan hutan				
PT Persada Utama Agromulia	Sorong Selatan	25000	Indonusa Agromulia Group	Sudah mohon pelepasan kawasan hutan				
PT Rimbun Sawit Papua	Fak-Fak	30596	Salim Group / Indofood Agri	Sudah pelepasan kawasan hutan				525/208/XII/2010
PT Cipta Palma Sejati	Kaimana	49000		Belum Jelas				
PT Agro Mulia Lestari	Kaimana	50500		Belum Jelas				
PT Pusaka Agro Makmur	Maybrat	24897	Austindo Nusantara Jaya	Sudah pelepasan kawasan hutan				
PT Varita Majutama	Bintuni	17270	Lion Group	Sudah Beroperasi	1996		112/Kpts-II/1996	
PT Varita Majutama (II)	Bintuni	35371	Lion Group	Sudah pelepasan kawasan hutan			SK.46/MENHUT-II/2013	
PT Subur Karunia Raya	Bintuni	38620		Sudah Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan			SK.285/MENHUT-II/2011 (persetujuan prinsip)	
PT HCW Papua Plantation	Bintuni	24000		Pemohonan pelepasan ditolak				
PTPN II	Manokwari Distrik Prafi	17974	Yong Jing Investment	Sudah Beroperasi	1980		638/Kpts-II/1992	
PT Medco Papua Hijau Selaras	Manokwari Distrik Sidey dan Masni	18000	Medco	Sudah Beroperasi	2008		SK 313/MENHUT-II/2012	
PT Berkat Setiakawan Abadi	Teluk Wondama	8937		Sudah pelepasan kawasan hutan			SK.13/MENHUT-II/2014	

PUSAKA adalah sebuah LSM di Indonesia, misinya untuk melakukan advokasi pemberdayaan hak masyarakat dan lingkungan melalui kegiatan riset advokasi, pendokumentasian dan promosi hak-hak masyarakat, pengembangan kapasitas dan penguatan organisasi masyarakat. Alamat: Kompleks Rawa Bambu Satu, Jl H No. 4, RT 001 RW 006, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, Phone and Fax: +62 21 7800844, email: yay.pusaka@gmail.com website: www.pusaka.or.id Kontak Person: Y.L. Franky (angkytm@gmail.com).

AwasMIFEE adalah situs web yang mengumpulkan berita tentang situasi hutan dan masyarakat adat Papua diterjemahkan ke bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesia. Pada awalnya focus utama adalah Merauke, karena sejak tahun 2010 kabupaten ini menjadi sasaran investasi besar-besaran oleh mega proyek MIFEE, namun sekarang AwasMIFEE muat berita dari seluruh Tanah Papua. Tujuan lain adalah menelusuri industri perkebunan di Papua dan perusahaan-perusahaan yang main di sektor ini. Alamat kontak: awasmifee@potager.org dan https://awasmifee.potager.org.

Jaringan Advokasi Sosial dan Lingkungan (JASOIL) Tanah Papua, adalah wadah komunikasi dan pengembangan kapasitas sumberdaya di Tanah Papua, sebagai wadah komunikasi bagi masyarakat sipil dan pengelenggara negara yang peduli terhadap kemanusiaan dan lingkungan hidup. Alamat: Jl. Manunggal No. 15, Amban, Manokwari, Papua Barat. Kontak Person: Pietsaw Amafnini: menawi2001@yahoo.com; http://www.jasoilpapua.blogspot.co.uk/. Alamat:

SAWIT WATCH adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia yang peduli dengan dampak negatif sosial dan lingkungan yang merugikan dari pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Organisasi ini aktif di 17 propinsi di mana perkebunan sawit sedang dikembangkan di Indonesia. Alamat: Perumahan Bogor Baru Blok C1 No. 10, Bogor, Jawa Barat 16129, Phone: +62 251 8352171 and Fax: +62 251 8352047, e-mail: info@sawitwatch.or.id; website: www.sawitwatch.or.id. Kontak person: Jefry Saragih: jefri@sawitwatch.or.id

Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) - Papua adalah jaringan LSM yang berkedudukan di Jayapura, Provinsi Papua. Visi JERAT untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam bidang ekonomi, social, budaya dan lingkungan hidup yang menghargai nilai-nilai budaya, HAM dan Demokrasi. Misi JERAT untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengorganisasian masyarakat adat, kampanye hak masyarakat adat, melakukan monitoring, investigasi dan pelaporan kasus sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta hak ekonomi social dan budaya, dan sebagainya. Alamat: Jalan Bosnik Blok C, No. 48, BTN Kamkey, Abepura (99351). Email: jeratpapua@gmail.com, website: http://www.jeratpapua.org, Kontak Person: Septer Manufandu, Email: septer_manufandu2@yahoo.com

BIN MADAG HOM adalah LSM yang bertujuan melakukan konservasi sumber daya alam dan advokasi lingkungan hidup, berkedudukan di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Alamat: Jl. Bina Kampung, Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat (99302), Indonesia. Kontak Person: Yohanes Akwan, HP. 0852 5456 2446 dan email: anesakwan@yahoo.co.id

Belantara Papua didirikan tahun 2005 dengan tujuan untuk melakukan advokasi dan pemberdayaan hak-hak masyarakat adat Papua, untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran kritis masyarakat agar dapat mandiri. Alamat Kontak: Jl. Puyuh no.3 Kampung Pisang, Remu Utara, Kota Sorong, Papua Barat (98416) Indonesia. Web: www.belantarapapua.org; Email: papua.belantara@gmail.com; Facebook: belantarapapua. Kontak Person: Max Binur, Email: macx.binur@gmail.com

KEUSKUPAN AGUNG MERAUKE/ SEKRETARIAT KEADILAN DAN PERDAMAIAN (SKP KAME) adalah institusi internal Gereja Katolik yang dibentuk pada tahun 2001. SKP KAME dibentuk sebagai kerja sama antara Keuskupan Agung Merauke dan Tarekat MSC di wilayah Papua. Lembaga ini menggeluti situasi lokal/regional, nasional dan internasional secara kontekstual. Isu-isu inti dan cakupan kerjanya adalah hak asasi manusia, keselarasan dengan alam, kebebasan, kesetaraan gender, keadilan dan perdamaian. Alamat: Jalan Kimaam Nomor 2, Merauke – Papua. Kontak Person SKP KAME: P. Anselmus Amo, MSC: amo.anselmus@yahoo.com dan skp_merauke@yahoo.com

PUSAKA
untuk memberdayakan hak rakyat